

Bagian 10: *Acolhimento* dan Dukungan pada Korban

Bagian 10: <i>Acolhimento</i> dan Dukungan pada Korban	1
Bagian 10: <i>Acolhimento</i> dan Dukungan pada Korban	2
10.1 Pendahuluan	2
10.1.1 Struktur Unit	3
10.1.2 Interpretasi	3
10.2 Penerimaan dan Penjangkauan	6
10.2.1 Latar Belakang	6
10.2.2 Monitoring terhadap orang-orang yang baru kembali	9
10.2.3 Menjangkau Timor Barat	12
10.3 Pemulihan martabat para korban	20
10.3.1 Pendahuluan	20
10.3.2 Audiensi Publik	21
10.3.3 Lokakarya Pemulihan	33
10.3.4 Reparasi Mendesak	45
10.3.5 Profil Komunitas	52
10.3.6 Pelajaran yang dapat dipetik	61

Bagian 10: Acolhimento dan Dukungan pada Korban

10.1 Pendahuluan

1. Bab ini adalah sebuah laporan tentang program-program divisi *Acolhimento* dan Dukungan pada Korban dari Komisi ini. Sesuai dengan namanya, divisi ini bekerja untuk memenuhi dua fungsi Komisi yang utama, namun cukup berbeda. Kedua fungsi ini melintasi semua aspek dari mandat Komisi, dalam arti bahwa prinsip-prinsip *acolhimento* dan dukungan bagi korban pelanggaran hak asasi manusia menjadi titik tolak bagi rancangan seluruh program Komisi.

2. Arti penting "*Acolhimento*" bagi pekerjaan Komisi, tercermin pada penggunaan kata "*acolhimento*" sebagai prinsip pedoman yang pertama dari tiga yang menonjol dalam nama *Comissão de Acolhimento, Verdade e Reconciliação de Timor-Leste*. Tidak seperti kebenaran dan rekonsiliasi, *acolhimento* tidak secara langsung disebutkan dalam Regulasi 10/2001, karena *acolhimento* lebih dari sekedar suatu fungsi langsung atau tujuan yang dapat terukur belaka, melainkan sebuah spirit yang mendasari segala aspek pekerjaan Komisi. Istilah ini menunjukkan pengakuan tentang pentingnya bagi orang Timor untuk saling menerima satu sama lain, setelah perpecahan dan konflik selama bertahun-tahun. Secara khusus, *acolhimento* merupakan tanggapan terhadap situasi orang-orang yang pergi ke Timor Barat pada tahun 1999 – baik mereka yang kembali ke Timor-Leste maupun mereka yang tetap tinggal di kamp-kamp dan pemukiman-pemukiman di Timor Barat. Dua program spesifik dikembangkan sebagai tanggapan terhadap situasi yang demikian itu:

- Sebuah program monitoring dan informasi untuk orang-orang yang baru kembali
- Sebuah program penjangkauan, yang dilaksanakan dalam kerjasama dengan organisasi-organisasi non-pemerintah di Timor Barat, bagi pengungsi-pengungsi yang masih berada di seberang perbatasan.

3. Berbeda dengan *acolhimento*, dukungan pada korban adalah sebuah tujuan spesifik Komisi yang tercantum dalam Regulasi 10/2001. Pasal 3 Regulasi menyebutkan, bahwa Komisi ini dimaksud untuk: "membantu memulihkan martabat korban-korban pelanggaran hak asasi manusia." Namun demikian Regulasi ini tidak menetapkan bagaimana Komisi seharusnya berjalan untuk mencapai tujuannya itu.

4. Seperti *acolhimento*, prinsip mendukung korban pelanggaran hak asasi manusia ini mendasari cara Komisi dalam menjalankan fungsi-fungsinya yang lain, yakni kebenaran, rekonsiliasi dan penulisan Laporan Akhir. Membantu orang-orang dan komunitas-komunitas yang selama ini menderita untuk pulih kembali, dan memulihkan harga diri mereka, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari upaya untuk memperbaiki hubungan-hubungan yang rusak selama berlangsungnya konflik, dan untuk membangun rekonsiliasi yang langgeng. Komisi ini dimaksud untuk menjadi corong bagi suara korban, yang telah begitu lama tidak dapat mengungkapkan penderitaan yang telah mereka alami, dan untuk memberikan sumbangan praktis bagi proses pemulihan mereka.

5. Divisi *Acolhimento* dan Dukungan pada Korban juga melaksanakan serangkaian program spesifik. Program-program ini meliputi:

- Audiensi publik, baik di tingkat nasional maupun sub-distrik
- Serangkaian Lokakarya Pemulihan di kantor nasional Komisi
- Sebuah skema Reparasi Mendesak untuk para korban yang mempunyai kebutuhan-kebutuhan mendesak
- Lokakarya partisipatoris di desa-desa, untuk mendiskusikan dampak konflik terhadap komunitas-komunitas (ini disebut Profil Komunitas).

10.1.1 Struktur Unit

6. Divisi *Acolhimento* dan Dukungan pada Korban berpusat di Dili. Kantor nasional Komisi mengkoordinasikan semua program *Acolhimento*. Meski para Komisaris Regional terkadang turut serta dalam kunjungan ke desa-desa yang memiliki orang-orang yang baru kembali, atau mengunjungi kamp-kamp di Timor Barat, sebagian besar pekerjaan dikelola dari kantor nasional.

7. Akan tetapi kerja dukungan bagi korban mengandalkan staf di distrik-distrik untuk melaksanakan program di tingkat distrik. Ini menjadi hal dasar dalam pekerjaan dukungan bagi korban, agar dapat menjangkau semua komunitas di Timor-Leste. Hal ini semakin penting di daerah-daerah pedesaan Timor-Leste, di mana banyak terdapat komunitas yang terisolasi, dan di mana orang-orang yang mengalami pelanggaran hak asasi manusia semasa konflik mungkin kini merasa dilupakan oleh mereka yang berada di tingkat nasional. Tim distrik terdiri dari orang-orang yang berasal dari daerah setempat, dan dua anggota dari tim ini, satu laki-laki dan satu perempuan, adalah sebagai petugas penjangkauan dan dukungan bagi distrik.

8. Struktur dan tanggung jawab Unit *Acolhimento* dan Dukungan pada Korban diuraikan secara rinci dalam Bagian 1: Pendahuluan.

10.1.2 Interpretasi

Acolhimento

9. Para Komisaris Nasional tidak berusaha mereduksi konsep '*acolhimento*' ke dalam sebuah definisi tunggal. Maknanya adalah bagian dari semangat pendekatan Komisi dalam pekerjaannya, dan semangat yang diharapkan oleh Komisi untuk bisa tumbuh subur di masyarakat. *Acolhimento* adalah orang menerima satu sama lain sebagai orang Timor-Leste, kembali menjadi diri sendiri, hidup bersama di bawah satu atap, setelah perpecahan dan kekerasan selama bertahun-tahun.

10. Hal ini berkenaan langsung dengan saudara-saudara kita orang Timor yang masih berada di Indonesia setelah eksodus tahun 1999, dan dengan mereka yang melarikan diri pada tahun 1975 atau setelahnya, yang hidup dalam pengasingan di negara-negara lain di seluruh dunia. Tetapi ini juga berkaitan dengan kita semua, baik kita yang meninggalkan Timor-Leste atau yang tetap berada di sini. Konflik selama dua puluh empat tahun telah menceraikan bangsa Timor ke seluruh dunia, memecahkan keluarga-keluarga dan komunitas-komunitas, dan menciptakan keterpecahan, bahkan di dalam diri seseorang. *Acolhimento* mewakili suatu semangat penerimaan dengan penuh rasa hormat terhadap satu sama lain dan diri kita sebagai manusia, sebagai orang-orang yang bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri dan terhadap satu sama lain. *Acolhimento* merupakan suatu prasyarat, agar bisa memiliki keberanian untuk berbicara, dan untuk mendengar kebenaran dan mengupayakan rekonsiliasi.

11. *Acolhimento* tumbuh dari suatu penghargaan yang mendalam terhadap, dan pemuliaan warisan budaya kita yang kaya. Warisan ini meliputi baik kebudayaan tradisional yang selama bertahun-tahun telah dikekang, maupun pengalaman-pengalaman kita tentang kolonialisme, perang dan pendudukan. *Acolhimento* merupakan suatu cara untuk membantu diri masing-

masing dalam menerima keragaman dimensi arti menjadi orang Timor, hidup bersama apa yang telah kita alami, dan menciptakan sebuah masyarakat yang meliputi kita semua, bahkan orang-orang yang telah melakukan kesalahan di masa lalu sekalipun. Dalam hubungan ini, kisah Alkitab tentang anak yang hilang merupakan kisah perumpamaan yang menunjukkan semangat *acolhimento*.

12. Sementara nama Komisi ini dalam Bahasa Inggris disebut Commission for Reception, Truth and Reconciliation (Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi), Komisi beranggapan bahwa kata "reception" ("penerimaan") tidak sepenuhnya mencerminkan apa yang kita maksud dengan kata "*acolhimento*." Sehingga oleh karenanya kata "*acolhimento*" akan terus digunakan di sepanjang bab ini.

Korban*

13. Regulasi 10/2001 mendefinisikan "korban" sebagai:

"orang yang secara individu atau bersama telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau pelanggaran haknya secara substansial akibat perbuatan yang termasuk dalam yurisdiksi Komisi untuk dipertimbangkan, dan termasuk sanak-saudara atau orang-orang yang hidup bergantung pada korban yang mengalami penderitaan/kerugian itu." [Pasal 1]

14. Komisi mengakui semua korban pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh semua pihak yang berkonflik. Ini termasuk warga sipil Timor yang menderita di tangan partai-partai politik Timor-Leste dalam konflik sipil tahun 1975, orang Timor yang menderita akibat pelanggaran yang dilakukan oleh militer Indonesia serta orang-orang sipil kepanjangan tangannya, dan orang-orang yang mengalami pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Fretilin atau Falintil setelah invasi Indonesia.

15. Komisi juga berupaya untuk menghormati mereka yang telah meninggal sebagai akibat konflik, dan menawarkan dukungan kepada keluarga dan komunitas mereka. Banyak orang telah mati di Timor-Leste selama 25 tahun yang menjadi mandat Komisi, baik karena pemindahan penduduk akibat perang, pemboman dan kelaparan, maupun akibat kekerasan yang diarahkan secara khusus. Dalam konteks tersebut, risiko bahwa orang-orang yang meninggal akan terserap menghilang dalam statistik umum adalah nyata. Pengakuan bagi orang-orang yang meninggal ini adalah bagian penting dari kerja Komisi. Keterbatasan waktu dan sumber daya Komisi membuat masih banyak pekerjaan yang harus terus dilakukan.

* Komisi mengakui adanya perdebatan di seputar penggunaan istilah 'korban' yang bisa menunjukkan hal pengorbanan pasif, yang bertentangan dengan istilah yang lebih kuat, 'survivor'. Komisi telah memilih untuk menggunakan istilah korban, sebagian karena konsistensi linguistik di antara tiga bahasa Laporan Akhir, dan sebagian karena pandangan bahwa banyak orang Timor merupakan korban dalam pengalaman mereka mengenai konflik-konflik politik di Timor-Leste. Banyak orang Timor tidak bertahan hidup. Karena Bagian ini menguraikan program-program untuk memberdayakan mereka yang bertahan hidup, maka istilah 'survivor' juga digunakan secara bergantian di sini.

Acolhimento

Acolhimento merupakan suatu elemen yang tak lazim untuk dimasukkan dalam sebuah komisi kebenaran dan rekonsiliasi. Ini adalah proses menyambut sepenuh hati, menerima, dan menunjukkan keramah-tamahan tanpa pamrih dalam budaya Timor. Keramah-tamahan formal ini diberikan kepada semua manusia, bahkan kepada mereka yang telah merugikan sekalipun. Ini adalah perilaku yang mulia kendatipun masih ada sikap sakit hati dan kemarahan. Sikap ini menciptakan ruang bagi kedua belah pihak untuk berubah. Ini adalah dasar untuk saling pengertian, memohon maaf dan mencari pengampunan.

Pemahaman orang Timor tentang *acolhimento* sebagian bersumber dari Lukas 15: 11-32, perumpamaan bapak yang kaya dan kedua anak laki-lakinya. Anak yang bungsu meninggalkan rumah, membawa pembagian kekayaan dari ayahnya, yang kemudian ia hambur-hamburkan. Karena menjadi miskin dan merasa bersalah, ia memutuskan untuk pulang ke rumah. Ia bersiap memohon belas kasihan keluarganya. Sebagai anak yang tak berharga, ia tahu bahwa ia hanya layak diperlakukan sebagai pelayan di rumah ayahnya. Melihat anaknya dari kejauhan, sang ayah merasa sangat terharu. Ia berlari untuk memeluknya dan menyambutnya kembali dengan mengadakan pesta pora, tanpa menyalahkan ataupun menghakimi. Melihat hal ini, anak yang lebih tua terluka oleh sikap ayahnya. Merasa sakit hati, ia menentang ayahnya. Sang ayah menjawab, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang tetapi didapat kembali." Perumpamaan ini mengajarkan bahwa rekonsiliasi dapat menjadi lebih sulit jika orang merasa dipersalahkan yang mencari pengampunan, daripada seorang yang memang merasa bersalah, yang mencari pengampunan.

Ke arah rekonsiliasi dan memutuskan lingkaran kebencian

Masyarakat dapat dikuatkan dalam semangat *acolhimento* dengan meningkatkan hubungan di antara anggota-anggota masyarakat, dan menyediakan ruang untuk keadilan dan rekonsiliasi. Ini merupakan sebuah proses yang panjang dan rumit. Proses ini membutuhkan ada kebenaran, pengakuan akan kesalahan dan usaha-usaha untuk mewujudkan perbaikan melalui saling pengertian. Hanya dengan demikian, akan ada kemungkinan untuk pengampunan dan pemulihan keseimbangan dalam hubungan-hubungan masyarakat.

Para pelaku pelanggaran hak asasi manusia di Timor Leste sejak tahun 1974 yang bersedia untuk mengakui kejahatan-kejahatan mereka dan yang ingin mencari pengampunan dari komunitas mereka dapat menemukan rekonsiliasi melalui sebuah proses yang sudah dibangun. Ada juga yang ingin kembali ke keluarga mereka, ke tanah mereka, ke komunitas mereka untuk membantu membangun kembali Timor-Leste. Kekerasan menggerogoti para pelaku. Dalam upaya untuk kembali hidup bersama lagi, kebenaran adalah sebagian dari langkah ke arah pemulihan pribadi dan kepada keadilan komunitas.

Orang-orang dalam komunitas-komunitas yang mengalami kerugian/kehilangan dan yang menghadapi perjuangan yang panjang untuk bertahan, membutuhkan penyembuhan. Kekerasan melukai tubuh dan juga merugikan jiwa. Ada kemungkinan pemulihan seiring berjalannya waktu. Orang-orang perlu mengungkapkan kehilangan mereka yang sesungguhnya dan didengarkan. Tetapi memaafkan bukan berarti melupakan atau memberikan pengampunan (amnesty). Orang akan menjadi bebas ketika kebenaran diungkapkan, dan orang menjadi bebas dari ketetapan hati dari kedua belah pihak bahwa segala sesuatu akan menjadi lebih baik. Hal ini memerlukan waktu dan upaya dari kedua belah pihak.

Orang Timor-Leste di Timor Barat

Komisi Kebenaran diusulkan pada akhir tahun 1999. Sepertiga penduduk Timor-Leste telah digerakkan ke Timor Barat, Indonesia. Ada keprihatinan mendalam akan keselamatan mereka dan seberapa cepat mereka kembali. Dalam waktu tiga bulan Oktober 1999, sekitar 100.000 orang spontan kembali, dan sejak saat itu, 120.000 orang lagi telah kembali. Sekitar 30.000 orang Timor-Leste masih berada di Timor Barat. Kalau saja mereka bebas dari intimidasi, propaganda negatif, dan lima tahun menggelandang sebagai pengungsi, mungkin mereka akan kembali ke Timor-Leste. Banyak di antara mereka adalah orang biasa, kehilangan keluarga dan sahabat, dan komunitas mereka di Timor-Leste kehilangan mereka pula.

Proses dan praktek memaafkan

Kembalinya dan pengintegrasian kembali mantan milisi, mantan TNI, dan para pendukung pro-tonomi merupakan tantangan serius. Mungkin yang kurang menantang adalah kasus para pegawai negeri periode 1974-1999. Beberapa orang akan memilih untuk tetap berada di wilayah Indonesia; sebagian lainnya mungkin ingin kembali ke Timor-Leste. Pemerintah Timor-Leste telah mengatakan, bahwa sambutan *acolhimento* bisa diperpanjang kepada mereka yang memutuskan untuk pulang sembari proses-proses kebenaran dan rekonsiliasi berlangsung. Banyak kelompok dan komunitas telah bekerja keras bagi penyatuan kembali mereka yang kembali dari Timor Barat secara damai. Ini adalah penghargaan kepada ketangguhan dan kesabaran mereka.

Komisi mencoba memediasi kembalinya para pelaku kejahatan-kejahatan ringan ke komunitas mereka melalui proses rekonsiliasi komunitas yang formal, yang memungkinkan berbagai pihak berintegrasi, berdiskusi dan mencari penyelesaian masalah-masalah dan keprihatinan-keprihatinan yang belum diselesaikan. Semangat *acolhimento* telah menerangi rancangan proses mediasi ini, dan dikombinasikan dengan tradisi Timor-Leste yang disebut *lisan*, kompensasi yang menyembuhkan sebagai bagian dari tanggungjawab sosial. Lebih dari 1400 orang yang kembali ke seluruh Timor-Leste telah diikutkan dalam proses penyembuhan ini, yang dipantau oleh Tim-Tim Distrik Komisi dan oleh pemerintah setempat untuk mencegah masalah-masalah yang dialami oleh orang-orang yang baru kembali. Seiring berjalannya waktu pula, para survivor dapat memahami dan memperoleh kepercayaan diri kembali dalam langkah mereka untuk memaafkan.

Namun demikian, mereka yang bersalah karena kejahatan berat harus menerima syarat-syarat keadilan legal dalam Pengadilan Timor-Leste sebagaimana dimandatkan oleh Konstitusi. Para survivor harus menantikan keadilan dalam kasus-kasus ini.

Tantangan bagi perorangan, keluarga dan komunitas, dan tentu saja bagi bangsa Timor-Leste adalah untuk menerima proses penegakkan kembali rasa saling percaya dalam hubungan-hubungan, untuk hidup bersama secara baik, dan untuk bekerja untuk menciptakan suatu masyarakat yang adil.

10.2 Penerimaan dan Penjangkauan

10.2.1 Latar Belakang

16. Selain program-program rekonsiliasi komunitas dan pencarian kebenaran, Komisi juga menciptakan sebuah program khusus yang disebut *Acolhimento*. Program-program *Acolhimento* diciptakan untuk menanggapi situasi orang-orang yang kembali dan para pengungsi di Timor Barat. Orang Timor-Leste mulai menyeberangi perbatasan ke Timor Barat jauh sebelum Konsultasi Rakyat pada tanggal 30 Agustus dan pengumuman hasil pada tanggal 4 September.

^{*} *Lisan* adalah sebuah kombinasi dari kepercayaan-kepercayaan, kebiasaan-kebiasaan dan tradisi-tradisi orang Timor-Leste. *Lisan* bervariasi dari komunitas ke komunitas dan pada umumnya merupakan sebuah aspek penting dari kehidupan komunitas, khususnya di wilayah pedesaan. *Lisan* seringkali disebut sebagai "adat" dalam bahasa Indonesia.

Orang Timor-Leste sudah mulai menetap sejak bulan April dan Mei 1999 di kamp-kamp di Kabupaten Belu (Nusa Tenggara Timur, Indonesia), yang berbatasan dengan Timor-Leste. Gelombang pengungsi besar-besaran ke Timor Barat terjadi pada minggu-minggu awal September 1999 setelah hasil Konsultasi Rakyat UNAMET diumumkan. Banyak di antara pengungsi ini dievakuasi secara paksa dari Timor-Leste oleh milisi bersenjata dan pasukan-pasukan Indonesia. Jumlah pengungsi yang menyeberang ke Timor Barat adalah sekitar 250.000 orang, yang kemudian ditampung di beberapa kamp pengungsian besar, seperti Noelbaki, Tuapukan dan Naibonat di Kupang, dua kamp di Kefa serta sekitar 200 penampungan lainnya.¹ sekitar yang ini diperkirakan sekitar sepertiga dari jumlah penduduk Timor-Leste pada saat itu. Tentara-tentara Indonesia dan milisi Timor mengontrol kebebasan bergerak para pengungsi secara ketat masuk dan keluar kamp-kamp ini, juga akses mereka kepada bantuan kemanusiaan.

17. Para pengungsi kembali dari Timor Barat dibagi dalam dua gelombang utama. Dalam periode tiga bulan pertama setelah Oktober 1999, lebih dari 100,000 pengungsi kembali ke Timor-Leste. Kemudian, selama tiga tahun berikut, 120.000 pengungsi kembali ke Timor-Leste dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil.² Orang-orang ini kembali ke situasi penerimaan yang tidak menentu di komunitas mereka. Banyak dari mereka adalah pendukung integrasi sebelum Referendum, dan beberapa bahkan menjadi anggota aktif milisi di komunitas mereka. Di beberapa tempat, tanah dan harta mereka telah diambil dan digunakan oleh keluarga-keluarga yang lain. Potensi ketidak-stabilan karena konflik-konflik antara orang-orang yang kembali dan komunitas mereka, merupakan persoalan besar bagi Komite Pengarah yang ditugasi untuk merancang mandat Komisi. (Lihat Bagian 1, Seksi tentang *Latar Belakang Pembentukan Komisi* memberi rincian lebih jauh mengenai hal ini.)

18. Walaupun sudah banyak pengungsi yang kembali, masih banyak juga yang menetap di Indonesia. Pada bulan Februari 2002 ketika Komisi dibentuk, terdapat lebih dari 60,000 pengungsi yang masih berada di Timor Barat. Pada tanggal 31 Desember 2002, semua pengungsi yang masih di Timor Barat dijadikan penduduk Timor Barat secara resmi dan status sebagai pengungsi dihilangkan. Masih ada di antara 25,000 dan 30,000 orang Timor-Leste yang tinggal di lebih dari 150 lokasi di berbagai penjuru Timor Barat pada waktu itu. UNHCR memperkirakan angka tersebut sampai pada 30 November 2004 adalah sekitar 25,000.³

19. Hidup tidaklah mudah bagi sebagian besar orang-orang ini. Banyak yang tinggal dalam kondisi-kondisi di bawah standar. Sebagian besar bertahan hidup dengan bertani, walaupun ada beberapa yang mendirikan kios-kios kecil untuk menjual makanan dan barang dagangan lainnya seperti minyak goreng, sabun, garam dan gula.

20. Selain itu, penduduk setempat di Timor Barat seringkali tidak senang dengan kehadiran mereka. Orang Timor-Leste kadang bertani atas izin dari penghuni lokal, dan kadang tidak. Di beberapa daerah, lahan pertanian sudah merambah sampai ke hutan, yang telah menimbulkan tekanan pada lingkungan Timor Barat yang kering dan pada hubungan antara pendatang baru dan masyarakat lokal. Di mana ada orang Timor-Leste dan Timor Barat yang menjadi makmur secara ekonomi, juga terjadi kasus-kasus kecemburuan lokal. Dan akhirnya, di antara para pengungsi itu ada beberapa mantan milisi yang dituntut atas kejahatan-kejahatan berat.

21. Walaupun demikian, masih ada banyak alasan untuk tidak pulang. Alasan-alasan itu termasuk ketakutan terhadap diskriminasi politik dan ekonomi di Timor-Leste terhadap mereka yang memiliki latar belakang pro-otonomi; ketakutan terhadap penuntutan atas kejahatan; ketakutan tidak dapat diterima kembali di komunitas desa lokal; jaminan ekonomi di Indonesia bagi mereka yang memiliki kedudukan di pemerintahan; dan kurangnya kepercayaan terhadap masa depan ekonomi Timor-Leste. Di kamp-kamp atau pemukiman-pemukiman, keputusan untuk menetap kadang tidak dilakukan secara sukarela melainkan cenderung dibuat oleh seorang ketua kelompok atau ketua kamp, yang punya alasan pribadi untuk menetap. Hal yang utama menurut pandangan Komisi, adalah banyaknya pengungsi yang tidak mempunyai akses terhadap informasi yang jelas atau akurat mengenai situasi di Timor-Leste.

22. Kenyataan bahwa ada begitu banyak orang Timor-Leste yang masih berada di Timor Barat merupakan kelanjutan dari perpecahan akibat konflik politik. Komisi ini, sebagai sebuah lembaga *acolhimento*, bermaksud untuk menjembatani perpecahan ini, dan membantu menciptakan kondisi bagi orang Timor-Leste dari semua latar belakang politik, untuk dapat saling menerima. Oleh karena itu program Timor Barat terfokus kepada informasi, dialog dan menciptakan pengertian yang lebih baik.

10.2.2 Monitoring terhadap orang-orang yang baru kembali

23. Program pemantauan Komisi terdiri dari pertemuan antara staf dengan orang-orang yang baru kembali untuk memonitor situasi mereka, menyediakan informasi mengenai proses rekonsiliasi komunitas, dan untuk membawa masalah-masalah yang diangkat oleh orang-orang ini kepada otoritas lokal, Komisaris-Komisaris Regional dan staf Komisi di distrik-distrik, dan juga lembaga-lembaga PBB, seperti UNHCR dan IOM.

24. Pada tahun 2003, 20 kunjungan dilakukan ke pusat persinggahan orang-orang yang kembali: 19 kunjungan ke pusat di Batugade di Bobonaro, dan satu ke Ambeno di Oecusse. Staf Komisi juga mengunjungi 33 desa di tujuh distrik di Timor-Leste dimana ada orang-orang yang baru kembali dari Timor Barat.

Table 1 - Desa-desanya yang dikunjungi oleh staf Komisi untuk bertemu dengan pengungsi yang kembali

Desa	Tanggal
Leolima (Hatu Udo, Ainaro)	1 April 2003
Palaka , Memo, Balibo, Raifun (Bobonaro)	9 Februari 2003
Maumeta (Liquiça)	10 Maret 2003
Atabae (Bobonaro)	10 Maret 2003
Balibo (Bobonaro)	11 Maret 2003
Maliana (Bobonaro)	11 Maret 2003
Lauala (Ermera)	24 Maret 2003
Casa (Ainaro)	2 April 2003
Ainaro Vila (Ainaro)	2 April 2003
Manutasi (Ainaro)	2 April 2003
Maubessi (Ainaro)	3 April 2003
Suai Vila, Fohorem, Fatumean, Maucatar (Covalima)	7 April 2003
Saburai (Maliana, Bobonaro)	4 Juni 2003
Marobo, Aidaba Leten, Maliana (Bobonaro)	23 Juni 2003
Cailaco (Bobonaro)	27 Juni 2003
Vatuboro, (Maubara, Liquiça)	1 Agustus 2003
Riheu (Ermera, Ermera)	2 Agustus 2003
Marobo Bobonaro	3 Agustus 2003
Leber (Bobonaro, Bobonaro)	8 Agustus 2003
Beco, Holabolo (Suai, Covalima)	9 Agustus 2003
Guguleur (Maubara, Liquiça)	10 Agustus 2003
Hudilaran (Dom Aleixio, Dili)	12 Agustus 2003
Gleno (Ermera, Ermera)	16 Agustus 2003
Lospalos Lore I (Lospalos, Lautém)	1 Desember 2003
Lospalos (Lautém)	1 Desember 2003

25. Pemantauan Ini bukan sebuah program publik yang besar. Sebaliknya ini merupakan kunjungan sederhana kepada orang-orang yang baru kembali dan keluarga mereka, untuk melihat bagaimana mereka diterima, dan apakah mereka merasa bahwa mereka sudah menyatu dengan komunitas masing-masing. Staf Komisi juga mengunjungi kepala-kepala desa dan pemuka masyarakat lainnya untuk memeriksa, secara informal, jika ada masalah-masalah yang timbul sehubungan dengan penerimaan orang-orang kembali ke dalam komunitas mereka.

26. Hubungan kerja dengan UNHCR dan IOM terutama adalah untuk mengatur kunjungan-kunjungan kepada pengungsi yang kembali dan untuk berbagi informasi mengenai kebutuhan orang-orang itu. UNHCR dan IOM memberi tahu Komisi jika ada program-program lintas-batas di mana Komisi dapat ikut berpartisipasi, termasuk kunjungan Presiden dan kunjungan resmi pejabat pemerintah lainnya.

Hal-hal yang ditemukan oleh Komisi

27. Banyak pengungsi kembali dengan perasaan yang bercampur antara terkucil, tidak berdaya dan trauma, dan juga kebingungan terhadap kelangsungan ekonomi dan status sosial mereka. Ketika mereka tiba, mereka menemukan banyak perubahan di Timor-Leste dengan pemerintahan independen yang baru dan perangkat hukum yang baru, dan juga sistem moneter serta ekonomi yang baru.

28. Komisi memperhatikan bahwa sebagian besar orang-orang yang kembali diterima oleh komunitas mereka dengan tangan terbuka. Di beberapa desa, masyarakat membantu orang-orang itu membangun penampungan sementara, atau memberikan akomodasi bagi mereka yang membutuhkan. Para pengungsi yang kembali itu mendapat akses untuk fasilitas umum seperti air, klinik-klinik kesehatan, dan sekolah-sekolah. Orang-orang ini juga dapat ikut dalam persaingan untuk mendapatkan pekerjaan di distrik-distrik, seperti guru, perawat, polisi, dan angkatan bersenjata.

29. Dalam beberapa kasus, kembalinya pemimpin eks-milisi disambut dengan kata-kata yang kasar dari para pemuda di komunitasnya. Walaupun demikian, dalam sebagian besar kasus, polisi setempat cepat mengambil alih situasi, dan berpatroli secara reguler di daerah yang belakangan didatangi orang-orang yang kembali, untuk mencegah terjadinya kekerasan. Seringkali konflik antara orang-orang yang kembali dengan penduduk lokal terjadi, bukan karena perbedaan politik melainkan karena perseteruan keluarga atau suku yang telah berjalan lama, berkenaan dengan masalah tanah atau masalah adat lainnya.

30. Untuk orang-orang yang kembali, tantangan terbesar yang dihadapi adalah mata pencaharian mereka. Banyak yang telah kehilangan aset mereka selama kekerasan tahun 1999 dan hanya bisa mendapatkan kembali sebagian kecil, setelah selama bertahun-tahun di kamp-kamp pengungsi. Sengketa atas tanah dan properti sering menjadi masalah utama. Beberapa dari orang-orang yang kembali pernah menjadi pegawai negeri sipil selama pendudukan Indonesia dan menerima gaji bulanan. Kelambatan mereka kembali ke Timor-Leste berarti, bahwa sebagian besar kesempatan kerja yang terbatas di distrik-distrik telah diambil oleh orang-orang lain. Keluarga-keluarga ini harus kembali mempelajari keahlian-keahlian pertanian subsisten. Sebagai akibatnya, banyak di antara orang-orang ini memilih untuk memulai kembali hidup mereka jauh dari kampung halaman, dan pindah ke Dili atau daerah perkotaan lainnya, untuk mencari kesempatan yang lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.

31. Untuk para wanita-orang tua tunggal dan anak-anak mereka, kelangsungan hidup sehari-hari lebih sulit. Dalam beberapa kasus, para perempuan dan anak-anak kembali ke Timor-Leste dalam kondisi kesehatan yang buruk, yang disebabkan oleh kekurangan gizi jangka panjang selama berada di kamp. Setelah kembali, mereka harus menanam dan menunggu hasil panen berikutnya untuk mereka makan. Walaupun otoritas lokal, lembaga-lembaga PBB dan LSM-LSM memberi perhatian khusus kepada keluarga-keluarga ini, tetap masih ada beberapa yang terlewatkan.

32. Komisi menemukan sejumlah kecil orang-orang yang, setelah kembali ke desa mereka, pada akhirnya memilih untuk kembali ke Timor Barat. Ini terjadi di desa-desa seperti Lauala (Ermera, Ermera) dan Leimea (Hatulia, Ermera), Maubara (Maubara, Liquiça) dan Balibo Kota (Balibo, Bobonaro). Komisi melakukan kunjungan-kunjungan ke desa-desa ini, dan bertemu dengan orang-orang yang memutuskan untuk kembali lagi ke Timor Barat, dengan alasan yang

berbeda-beda. Dalam beberapa kasus, orang-orang itu masih memiliki anggota keluarga dekat yang tinggal di Timor Barat. Dalam kasus-kasus lainnya, orang-orang yang kembali adalah eks-pemimpin milisi yang belum mendapat kesempatan untuk ikut serta dalam proses rekonsiliasi komunitas dan mengalami intimidasi dan serangan ringan oleh penduduk lokal.

Mendampingi pengungsi untuk pulang

Staf Komisi, bersama dengan UNHCR dan IOM, mendampingi sejumlah pengungsi yang kembali dalam perjalanan pulang mereka. Biasanya mereka adalah orang-orang yang dianggap rawan, dan didampingi untuk mengurangi kegelisahan mereka. Berikut ini tiga contoh yang terjadi pada bulan Mei-Juni 2003:

Pada tanggal 29 Mei 2003, staf Komisi mendampingi seorang perempuan dan anak-anaknya ke Laga, Baucau. Suaminya, yang pernah bertugas sebagai anggota (Milsas) dan sekarang ini bekerja di Koramil di Kupang (Timor Barat), ikut dalam kunjungan yang dengan berpaspor Indonesia ini. Dia ingin membawa keluarganya pulang dan kemudian kembali ke Timor Barat. Ketika mereka tiba di Laga, mereka disambut dengan hangat dan para penduduk lokal membantu mereka menurunkan barang-barangnya.

Pada tanggal 10 Juni 2003, seorang laki-laki berumur 19 tahun pulang ke Leopa (Dato, Liquiça), seorang diri. Staf Komisi mendampingi dia ke rumahnya di mana orangtuanya menerima dia dengan hangat.

Pada tanggal 12 Juni 2003, staf Komisi mendampingi seorang laki-laki berumur 34 tahun dengan anak laki-laknya yang berumur 5 tahun pulang ke desanya di Aidabaleten (Atabae, Bobonaro). Dia seorang mantan anggota milisi dari suatu kelompok yang dinamakan Harmoni, tetapi walaupun pernah ikut berpatroli, dia tidak melakukan kejahatan apa-apa. Dia telah mengunjungi keluarganya sebanyak enam kali sebelum dia diyakinkan untuk kembali secara permanen. Keluarganya dan penduduk lokal menerima dia dengan baik, dan membantu membongkar truk IOM yang membawa barang-barangnya.

Kesan-kesan dari Program Monitoring

33. Masyarakat Timor-Leste telah menunjukkan tingkat penerimaan dan keinginan untuk menerima kembali para mantan pengungsi. Namun keadaan seperti ini tidak boleh diterima begitu saja. Masih ada banyak orang Timor-Leste di Timor Barat yang mungkin kebanyakan akan memilih untuk kembali di tahun-tahun mendatang. Selain itu bagi beberapa orang yang kembali dalam tahun-tahun belakangan ini, mungkin masih ada masalah mengenai reintegrasi penuh ke dalam komunitas mereka. Banyaknya permintaan yang terus mengalir untuk diadakannya audiensi rekonsiliasi komunitas, menunjukkan bahwa masih banyak isu-isu di tingkat lokal yang belum selesai, termasuk mereka yang telah kembali sejak tahun 1999.

34. Adalah penting untuk terus memonitor situasi orang-orang yang baru kembali dan untuk bekerja dengan komunitas-komunitas untuk memberikan dukungan yang diperlukan. Ini akan melibatkan masyarakat sipil, LSM-LSM dan berbagai instansi pemerintah. Bagian 11: Rekomendasi membahas kebutuhan untuk pengawasan reintegrasi orang-orang yang kembali dan potensi konflik di masa mendatang.

10.2.3 Menjangkau Timor Barat

35. Komisi tidak dirancang untuk membantu memulangkan kembali orang Timor-Leste dari Timor Barat, dan tidak mempunyai wewenang untuk bekerja di negara lain selain Timor-Leste. Namun tugas untuk memasyarakatkan *acolhimento* dan rekonsiliasi menjadi dasar yang kuat untuk menjangkau para pengungsi, dan memberikan informasi mengenai Komisi serta situasi di Timor-Leste. Sebagai sebuah lembaga negara yang independen, Komisi ingin menunjukkan kepada pengungsi-pengungsi yang masih ada, bahwa negara baru Timor-Leste bersungguh-sungguh dengan komitmennya untuk membangun suatu masyarakat yang utuh, yang berdasar pada aturan hukum dan hak asasi manusia universal. Juga dianggap penting untuk memberi kesempatan kepada orang Timor-Leste di Timor Barat untuk berpartisipasi dalam program pencarian kebenaran, dengan memberikan pernyataan mereka kepada Komisi.

36. Pada akhir tahun 2002, Komisi merancang program Timor Barat. Komisi memulai program ini pada awal tahun 2003. Karena pertimbangan efisiensi dan keamanan, dan karena mandatnya hanya di wilayah Timor Leste, Komisi memutuskan untuk bekerja melalui LSM Indonesia yang sudah menangani masalah pengungsi di Timor Barat.

Program Menjangkau Timor Barat

37. Program Timor Barat Komisi memiliki empat tujuan utama:

1. Meningkatkan kesadaran dan pengertian di kalangan para pengungsi dan pemimpin-pemimpin utama komunitas tentang mandat Komisi.
2. Memfasilitasi penyebaran informasi tentang kegiatan-kegiatan Komisi yang berhubungan dengan dua fungsi utamanya, yaitu pencarian kebenaran dan rekonsiliasi komunitas.
3. Menjamin bahwa Komisi akan mendengar orang Timor-Leste dari semua pihak dalam konflik politik untuk mempersiapkan Laporan Akhirnya.
4. Menyampaikan pesan kepada para pengungsi Timor-Leste di Timor Barat, bahwa Timor-Leste bersungguh-sungguh dalam usaha pemulihan perpecahan masa lalu, dan memperbaiki kehidupan pribadi dan komunitas, berdasarkan prinsip-prinsip keterlibatan semua pihak dan penghormatan pada hak asasi manusia.

38. Program Timor Barat Komisi umumnya terdiri dari penyebaran informasi kepada para pengungsi mengenai proses rekonsiliasi komunitas, dan melibatkan mereka dalam pencarian kebenaran. Dalam hal pekerjaan rekonsiliasi, tujuannya bukan untuk melakukan prosedur-prosedur rekonsiliasi di Timor Barat. Melainkan untuk memastikan, bahwa komunitas-komunitas, termasuk para pelaku pelanggaran ringan, memahami bagaimana Komisi dapat membantu menyatukan kembali orang-orang dengan komunitas asal mereka, jika mereka itu memilih untuk kembali ke Timor-Leste.

39. Menawarkan kesempatan kepada orang-orang untuk memberikan pernyataan-pernyataan, sebagai jalan untuk mengumpulkan informasi yang akurat dan penting bagi pekerjaan pencarian kebenaran Komisi. Jalan ini memberi kepastian bahwa Komisi telah mendengar kisah-kisah dari semua pihak yang terlibat konflik politik. Ini juga jalan untuk menunjukkan rasa hormat dan perhatian bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia, dan dengan cara ini diharapkan dapat membantu proses pemulihan pribadi mereka.

40. Kelompok-kelompok tertentu dalam komunitas-komunitas di Timor Barat menjadi sasaran utama dari program ini. Kelompok-kelompok ini mencakup para pemimpin politik pro-tonomi dan mantan pemimpin milisi, individu-individu dan kelompok-kelompok yang belum membuat keputusan mengenai repatriasi, perempuan sebagai kelompok yang paling mungkin untuk tidak bisa membuat pilihan bebas mengenai repatriasi, dan mereka yang telah memilih

untuk tidak kembali tapi memiliki pengalaman atau pengetahuan tentang pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang dapat diceritakan kepada Komisi.

Pelaksanaan Program

41. Pada bulan Januari 2003, Komisi mengundang lima LSM Timor Barat ke kantor pusatnya di Dili untuk merencanakan sebuah program yang didasarkan atas tujuan-tujuan di atas. Masing-masing LSM mempunyai pengalaman bekerja dengan pengungsi-pengungsi Timor-Leste di Timor Barat. LSM-LSM tersebut adalah:

- CIS (*Center for Internally Displaced Persons Service*),
- Truk-F (Tim Relawan untuk Kemanusiaan - Flores),
- Lakmas (Lembaga Advokasi anti-Kekerasan terhadap Masyarakat Sipil)
- Yabiku (Yayasan Amnaut Bife “Kuan” — Yayasan Peduli Perempuan Kampung), dan
- YPI (Yayasan Peduli Indonesia).

42. Dengan dukungan dari Yayasan PIKUL (Penguatan Institusi dan Kapasitas Lokal) dan CRS (*Catholic Relief Services*), kelima LSM itu membentuk sebuah koalisi dan bekerja sama dengan Komisi.

43. Koalisi tersebut dibagi menjadi empat tim, masing-masing bertugas di satu kabupaten di Timor Barat. Tiga dari empat tim bekerja di kabupaten-kabupaten di mana mereka sudah memiliki hubungan yang lama dengan para pengungsi. Mereka adalah: CIS di Kupang, Lakmas dan Yabiku di Kefamenanu (Kabupaten Timor Tengah Utara), dan YPI di Atambua (Kabupaten Belu). Tim keempat adalah tim dari Kupang yang dipindahkan ke SoE (Kabupaten Timor Tengah Selatan), dan dengan cepat dapat membangun hubungan dengan orang-orang penting dalam komunitas pengungsi tersebut.

44. Sebuah program orientasi selama dua minggu diberikan kepada Koalisi LSM di Timor-Leste pada bulan Februari 2003. Di antaranya sesi pengarahan dan perencanaan dengan para Komisararis Nasional dan staf Komisi, dan meningkatkan pemahaman mengenai latar belakang, mandat dan organisasi Komisi. Juga diberikan pelatihan mengenai isu-isu seperti hak-hak asasi manusia dan keadilan transisi, dan keahlian spesifik seperti pengambilan pertanyaan. Kelompok tersebut melakukan perjalanan kerja ke distrik-distrik di Timor-Leste untuk mengamati tim distrik Komisi bekerja di dalam komunitas. Kelompok ini juga menghadiri audiensi nasional pertama Komisi yang bertemakan pemenjaraan politik.

45. Rencana kerja lima bulan kemudian dikembangkan bersama Komisi, yang menjamin bahwa semua komunitas pengungsi di Timor Barat mendapat kesempatan untuk mengetahui lebih banyak tentang CAVR, dan berpartisipasi dalam proses pengambilan pernyataan.

46. Begitu program dimulai, para Komisararis Nasional dan Regional melakukan kunjungan bulanan ke Timor Barat untuk memonitor kemajuan Koalisi, membantu semua permasalahan, dan untuk membantu proses informasi publik. Koalisi mencatat dalam laporan akhirnya kepada Komisi, bahwa: “kunjungan-kunjungan para Komisararis bagaikan kereta lokomotif yang membawa para pengungsi untuk menghadiri diskusi kelompok sasaran.” Kunjungan monitoring yang pertama pada akhir bulan Maret 2003, membantu meluncurkan program tersebut secara publik. Para Komisararis bertemu dengan pemimpin-pemimpin pemerintahan propinsi, komunitas gereja, LSM dan sektor media untuk membangun dukungan bagi kegiatan-kegiatan program. Sebuah rekomendasi tertulis dari Gubernur Nusa Tenggara Timur sangat berguna untuk Koalisi dalam mendapatkan akses ke kamp-kamp dan kesediaan polisi dan militer untuk memberi jaminan pengamanan.

Sosialisasi kepada komunitas pengungsi mengenai Komisi

47. Tujuan utama program tersebut untuk berbagi informasi dengan komunitas-komunitas pengungsi mengenai Komisi, dan bagaimana relevansi Komisi ini terhadap mereka.

48. Dua metode utama untuk memberitahu para pengungsi mengenai pekerjaan Komisi adalah: diskusi langsung dengan para pengungsi dan pemimpin utama mereka (Tabel 1 di bawah), dan penyebaran informasi melalui media cetak, radio dan video. Untuk membangun hubungan dan kepercayaan, tim-tim Koalisi melakukan kunjungan-kunjungan pribadi kepada para pemimpin utama pengungsi dan para koordinator kamp, menjelang pertemuan-pertemuan dengan masyarakat pengungsi. Para Komisaris Nasional dan Regional dan staf CAVR juga mengunjungi kamp-kamp, dan bertemu dengan mantan komandan-komandan milisi dan pemimpin-pemimpin politik pro-otonomi.

49. Penyebaran informasi termasuk memberikan 15 episode program radio yang diproduksi oleh Komisi, *Dalan ba Dame* (Jalan Menuju Damai), dipancarkan dari Dili dan disiarkan melalui sebuah stasiun radio di Kupang. Radio Timor Barat juga menyiarkan dialog-dialog antara Komisaris-Komisaris dengan tokoh-tokoh yang sudah dikenal pengungsi, seperti anggota-anggota Koalisi, seorang pendeta Timor Barat, dan pemimpin-pemimpin pengungsi. Film-film Komisi, termasuk *Dalan ba Dame* (Jalan Menuju Damai, sebuah perkenalan mengenai Komisi) dan rekaman-rekaman video mengenai pertemuan-pertemuan rekonsiliasi komunitas, dan beberapa audiensi publik nasional Komisi merupakan cara yang menyenangkan dan menarik bagi para pengungsi untuk memahami pekerjaan Komisi. Contohnya, film mengenai audiensi rekonsiliasi di sebuah desa memperlihatkan keadaan komunitas dan distrik-distrik tempat tinggal banyak pengungsi, dan membantu menunjukkan bagaimana komunitas-komunitas tersebut berusaha untuk mendamaikan konflik di masa lalu. Film dan radio sangat penting, karena banyak dari para pengungsi itu memiliki keahlian baca tulis yang terbatas.

Table 2 - Pembagian berdasarkan Wilayah Diskusi Kelompok Sasaran/Pertemuan Komunitas

Kabupaten di Timor Barat	Total	Peserta	
		L	P
Belu	33	2681	373
Timor Tengah Utara	31	365	163
Timor Tengah Selatan	17	1084	318
Kupang	18	860	146
Total	99	4990 (83%)	1000 (17%)

Sumber: Laporan Kegiatan Koalisi LSM, 13 Februari 2003 – 23 Juli 2003

50. Media cetak yang didistribusi di empat wilayah sasaran antara lain berupa buletin, poster, majalah, pamflet Komisi berkenaan dengan proses rekonsiliasi komunitas, kaus Komisi, dan sebuah pamflet khusus yang diproduksi bersama oleh Komisi dan Koalisi LSM Timor Barat.

Pengambilan Pernyataan

51. Pengambilan pernyataan untuk mencatat pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia ternyata sulit bagi semua tim Timor Barat. Pada bulan-bulan pertama pekerjaan mereka, tidak ada tim yang mengambil pernyataan karena mereka terfokus untuk menjalin hubungan dengan komunitas pengungsi, menjelaskan mandat Komisi dan cara-cara bagaimana masyarakat bisa berpartisipasi. Dengan cara ini mereka dapat memutuskan, tentang perlu atau tidak perlu bagi mereka untuk memberikan pernyataan.

52. Tim telah menetapkan target yang tidak terlalu tinggi, yaitu sebanyak 272 pernyataan, yang kurang-lebih konsisten dengan target 1% dari komunitas. Namun pada akhirnya hanya 90 pernyataan yang dapat diambil. Ada beberapa alasan untuk hasil seperti ini, tetapi secara umum hal ini mencerminkan sikap waswas orang-orang dalam komunitas pengungsi, yang ditujukan kepada Koalisi LSM dan Komisi. Hal ini dibahas lebih lanjut di bagian, Tanggapan-tanggapan Pengungsi, berikut ini.

53. Tabel 3 menunjukkan bahwa tim di Soe, di Timor Tengah Selatan, dapat mengumpulkan pernyataan terbanyak. Yang menarik dari hasil ini, bahwa dua belas dari pernyataan-pernyataan berasal dari Kodim di wilayah Soe, di mana para pengungsi Timor-Leste yang berafiliasi dengan militer tinggal. Tim Atambua (Belu), dekat perbatasan Timor-Leste dan tempat yang paling banyak dihuni pengungsi, mendapatkan jumlah pernyataan terbanyak kedua.

54. Walaupun seluruh jumlah pernyataan yang diambil adalah rendah, tetaplah penting bahwa Komisi menawarkan kesempatan ini kepada anggota-anggota komunitas pengungsi, karena isi pernyataan-pernyataan tersebut menjadi kontribusi penting untuk pencarian kebenaran Komisi.

Table 3 - Rincian Pengambilan Pernyataan berdasarkan Kabupaten

Kabupaten di Timor Barat	Total	Peserta	
		L	P
Belu	28	23	5
Timor Tengah Utara	9	8	1
Timor Tengah Selatan	50	43	7
Kupang	3	3	--
Total	90	77 (86%)	13 (14%)

Sumber: Laporan Kegiatan Koalisi LSM, 13 Februari 2003 – 23 Juli 2003

Tanggapan Pengungsi

55. Banyak pengungsi yang ingin tahu mengenai perkembangan mutakhir di Timor-Leste, terutama tentang pekerjaan rekonsiliasi Komisi yang berbasis komunitas. Namun tanggapan yang sangat dominan terhadap program Timor Barat adalah sikap yang waswas. Bahkan dalam beberapa kasus, para anggota Koalisi ditolak masuk ke kamp-kamp; dalam beberapa kasus lainnya pengungsi tidak berpartisipasi dalam kelompok-kelompok diskusi ketika diberi kesempatan.

56. Koalisi LSM menemukan bahwa ada tiga macam tanggapan dari pengungsi terhadap pekerjaan Komisi di Timor Barat: mayoritas yang tetap diam; mereka yang memberi dukungan dengan antusias atau hati-hati; dan mereka yang menolak Koalisi LSM dan Komisi. Bagian ini memasukkan kutipan-kutipan dari tanggapan orang Timor-Leste di Timor Barat, sebagaimana dilaporkan di dalam laporan Kegiatan Koalisi LSM, 13 Februari sampai 23 Juli 2003.⁴

57. Sebagian besar pengungsi tetap tidak bersuara. Walaupun beberapa sudah memiliki sikap yang pasti terhadap rekonsiliasi, tetapi karena isu ini telah dipolitisasi, maka mereka memilih untuk tetap diam. Orang-orang lainnya adalah mayoritas ambang yang sikapnya ditentukan oleh sekelompok kecil pemimpin elit, yang beroperasi dalam satu struktur kekuatan internal di kamp-kamp tersebut. Koalisi LSM sangat berhati-hati untuk tidak memaksa orang-orang untuk bertanya atau memberikan pendapat mereka, demi melindungi keselamatan pribadi mereka – dan mengingat bahwa tujuan program penjangkauan ini adalah untuk memberi informasi.

58. Beberapa pengungsi bangga, bahwa Timor-Leste telah memperoleh kemerdekaan, seperti yang diungkapkan seorang laki-laki dari Maubisse (Ainaro):

Kami sangat menghargai apa yang telah diberi oleh saudara-saudara kami dan sangat menghargai Komisi. Ini benar-benar bisa dikatakan sebagai mencari kebenaran. Kami juga berjuang untuk rakyat Timor-Leste walaupun pendapat kami berbeda-beda. Sekarang Timor-Leste sudah merdeka, kami harap bahwa di sana mereka sendiri merasa mereka telah merdeka, bahwa mereka memiliki Timor-Leste. Bahkan kami orang-orang pro-otonomi sebenarnya menginginkan kemerdekaan, mungkin dalam 15 tahun, tetapi saudara-saudara kami tidak sabar, mereka ingin kemerdekaan secepatnya...kami juga menghargai Fretilin. Hasil yang baik dari perjuangan Fretilin adalah bahwa Timor-Leste bisa dikenal dan merdeka. Kita semua harus bangga dengan perjuangan mereka.

59. Di antara mereka yang berada dalam kategori “menolak” adalah pengungsi-pengungsi yang mungkin pernah memiliki harapan untuk rekonsiliasi. Seperti yang dikatakan oleh seorang pemimpin di Kamp Naibonat di luar Kupang:

Saya bosan mendengar tentang rekonsiliasi. Saya sendiri menghadiri proses semacam ini di Bali [Indonesia], tapi apa hasilnya? Tidak ada. Kami tidak tahu apa yang akan menjadi hasil akhir dari proses rekonsiliasi Komisi...tapi jika rekonsiliasi hanya bicara saja, pembalasan dendam akan berlanjut.

60. Komentar orang-orang lainnya lebih bersikap memusuhi. Seorang pengungsi mengatakan, bahwa Komisi tidak lebih dari sekedar proyek yang menghabiskan uang dari para donor dengan agenda tersembunyi, yaitu semata-mata untuk membuat Timor-Leste menjadi negara boneka mereka. Dia berkata, bahwa dengan hanya dua tahun mandat bagaimana mungkin bisa menyelidiki kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama lebih dari 20 tahun dengan tuntas? Yang lainnya berkata, bahwa mereka merasa mendukung program Komisi sama saja dengan mengkhianati Indonesia. Tim Koalisi memperhatikan, bahwa beberapa koordinator dan pemimpin kamp, walaupun terkesan mendukung Komisi selama diskusi-diskusi kelompok, namun belakangan mereka akan berkata bahwa semua yang dikatakan oleh Koalisi adalah kebohongan belaka.

61. Sementara para Komisariss mendengar banyak komentar-komentar negatif dan skeptis mengenai Komisi pada kunjungan-kunjungan mereka ke Timor Barat, mereka juga mendengar beberapa komentar positif.

62. Diskusi-diskusi dengan komunitas pengungsi menunjukkan, bahwa kepedulian orang tentang status politik Timor-Leste sebelum kemerdekaan telah digantikan oleh kekhawatiran soal ekonomi. Ada skeptisisme yang mendalam mengenai kemampuan negara ini untuk berkembang, karena sumber daya manusia yang terbatas, teknologi yang tidak maju, infrastruktur yang lemah dan besarnya ketergantungan terhadap bantuan luar negeri. Juga terdapat masalah mengenai kendala pemulangan kembali.

63. Pengamatan dari kunjungan-kunjungan Komisariss dan staf untuk mendukung program Timor Barat menunjukkan sebuah kesamaan dalam daftar masalah di antara komunitas pengungsi. Masalah-masalah tersebut di antaranya:

Ketakutan

64. Banyak pengungsi yang mengatakan, bahwa mereka takut untuk kembali ke Timor-Leste karena teror dan intimidasi, bahkan pembunuhan, yang ditujukan kepada pengungsi yang berkunjung atau pulang. Beberapa berkata mereka hanya akan kembali ke Timor-Leste jika mereka diberi jaminan keamanan. Yang lain takut untuk kembali karena takut akan penuntutan. Mereka yang tidak mau memberikan pernyataan juga menyatakan ketakutan ini. Orang-orang ini seringkali meminta untuk rekonsiliasi dengan melupakan masa lalu, semacam amnesti historis atau *kore metan massal*.

Pengucilan Sosial

65. Beberapa pengungsi meragukan maksud baik yang dikumandangkan Timor-Leste untuk merangkul mantan pendukung penguasa Indonesia. Mereka telah mendengar, bahwa pendukung pro-otonomi di Timor-Leste diperlakukan sebagai rakyat kelas dua dan tiga, mengalami diskriminasi dalam mendapatkan kesempatan pekerjaan dan akses kepada layanan-layanan sosial. Yang lainnya menyebutkan adanya suatu hirarki sosial yang akan sangat merugikan mereka. Hirarki ini menempatkan orang-orang asing di tempat teratas, diikuti oleh orang Timor yang pernah tinggal di Portugal, dan kemudian elit pro-kemerdekaan dan pendukung pro-kemerdekaan lainnya, dan pendukung pro-otonomi di posisi paling bawah.

Pertimbangan-pertimbangan Ekonomi

66. Keluhan yang selalu muncul dalam diskusi kelompok adalah besarnya biaya yang diperlukan untuk masuk ke Timor-Leste, sesuatu yang mungkin lebih berlaku bagi mereka yang bermaksud untuk sekedar berkunjung ke Timor-Leste ketimbang untuk kembali pulang. Mereka yang masih bekerja sebagai pegawai negeri sipil Indonesia berkata, bahwa selama mereka tetap di Timor Barat mereka akan mendapat gaji yang cukup untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Seorang laki-laki bertanya, "Untuk apa kembali ke Timor-Leste di mana saya tidak ada jaminan untuk kerja?" Masalah lain yang diungkapkan adalah status aset terdahulu – banyak yang mengatakan bahwa mereka ragu untuk kembali, jika mereka tidak bisa memperoleh kembali tanah dan rumah mereka yang dulu. Lainnya menyuarakan kekhawatiran mengenai tingginya ketergantungan Timor-Leste pada negara-negara donor. Seorang pengungsi dari Lospalos (Lautém) di kamp Tuapukan dekat Kupang, berkata kepada Komisaris-Komisaris dan staf Komisi:

Saudara-saudara, anda seharusnya memberi informasi mengenai situasi yang sebenarnya di Timor-Leste. Di sana hidup penuh dengan penderitaan, penderitaan yang terus menerus...di sana saudara jauh lebih menderita daripada kita di sini.

67. Dia meneruskan dengan berbicara kepada para pengungsi yang hadir,

Mungkin orang-orang putih merasa kasihan kepada mereka dan memberi mereka uang untuk melaksanakan tugas ini [rekonsiliasi]...Apakah saudara-saudara ini ingin kemajuan atau kemunduran? Bagi kami, hidup bersama Republik Indonesia adalah kemajuan, [bukan dengan] saudara-saudara ini yang hanya datang dengan janji-janji palsu.

* "Kore metan massal" adalah sebuah frase yang mencampurkan Bahasa Tetum dan Bahasa Indonesian dan digunakan oleh beberapa orang Timor Leste di dalam kamp-kamp Timor Barat. "Kore metan" (Bahasa Tetum) adalah acara adat yang menandai akhirnya masa berdukacita 12-bulan (arti harfiah mengangkat hitamnya). Ini adalah frase yang digunakan oleh beberapa orang Timor Leste ketika mereka berbicara dengan komisi di Timor Barat.

Ras

68. Beberapa pengungsi menyatakan penolakan penuh terhadap orang-orang kulit putih, yang dipandang sebagai orang-orang yang sangat berkuasa atas Timor-Leste. Beberapa mengatakan mereka tidak akan kembali ke Timor-Leste selama orang-orang kulit putih masih menetap di sana.

Isu-isu Politik

69. Walaupun kedaulatan Timor-Leste tidak mendominasi diskusi-diskusi kelompok, ada masalah-masalah politik yang diutarakan. Beberapa pengungsi merasa dirisaukan dengan digunakannya bahasa Portugis sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah, khawatir apabila mereka kembali anak-anak mereka akan menghadapi kesulitan. Lainnya menuntut bahwa, sebelum ada rekonsiliasi, tiga partai utama pada tahun 1974-1975 – UDT, Fretilin, Apodeti – mempertanggungjawabkan tindakan-tindakan mereka pada masa lalu. Lainnya bersikukuh bahwa rekonsiliasi harus dimulai di antara para pemimpin dengan latar belakang politik yang berbeda, sebelum rakyat biasa dapat diharapkan ikut berpartisipasi dalam upaya rekonsiliasi. Fokus kepada para pemimpin ini tampak sebagai cara bagi beberapa pengungsi untuk membebaskan mereka dari tindakan-tindakan kriminal, karena mereka hanya “orang-orang kecil” yang tidak tahu apa-apa, atau hanya menjalankan perintah dari atasannya. Seorang pengungsi dari Baucau di kamp Tuapukan menyimpulkan, ketika dia berkata:

Jika pemimpin-pemimpin pro-otonomi dan pro-kemerdekaan bersatu kami pasti akan kembali; karena hal-hal di masa lalu adalah perintah, dan kami orang kecil hanya melaksanakannya, dan sebagai akibatnya kamilah yang paling menderita.

70. Ada kecenderungan untuk melihat, bahwa mandat pencarian kebenaran Komisi hanya terbatas pada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pada tahun 1999. Hal ini disertai dengan tuntutan-tuntutan, bahwa sejarah hanya bisa “diluruskan”, jika pelanggaran-pelanggaran yang dimulai pada tahun 1974-1975 diselidiki secara tuntas.

Pengungsi perempuan dan rekonsiliasi

71. Perempuan secara khusus dipengaruhi oleh struktur kekuatan yang ada dalam kamp-kamp, dalam hal kebebasan mereka untuk berinteraksi dengan Koalisi LSM. Posisi perempuan dalam rekonsiliasi dan repatriasi hampir sepenuhnya ditentukan oleh suami, ayah, dan paman mereka, yang telah membawa mereka ke Timor Barat. Secara ekonomi dan fisik mereka bergantung pada sosok laki-laki, yang seringkali mengandalkan perlindungan mereka, sementara itu perempuan juga mengalami intimidasi dan pelecehan.

72. Baik Tabel Dua dan Tiga di atas menunjukkan, bahwa penjangkauan terhadap perempuan tidak seefektif laki-laki. Tim-tim Koalisi LSM mencatat bahwa, bahkan ketika perempuan menghadiri diskusi kelompok sasaran, mereka jarang berbicara atau hanya setuju dengan apa yang dikatakan oleh suami mereka atau para pemimpin pengungsi. Koalisi LSM menghubungkan lemahnya partisipasi perempuan kepada beberapa hal. Beberapa hal itu, mereka menyebutkan, kebudayaan patriarki orang Timor, peran perempuan yang terbatas hanya pada keluarga, rekonsiliasi yang tampak sebagai isu politik yang harus dihadapi oleh laki-laki saja. Selain itu pada umumnya perempuan juga memiliki tingkat pendidikan dan kesehatan yang lebih rendah daripada laki-laki, dan juga seringkali menjadi korban pelecehan fisik dan psikologis.

73. Masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk dapat memberi akses kepada perempuan terhadap informasi dan kemampuan untuk memainkan peran yang menentukan dalam mengambil keputusan untuk kembali ke Timor-Leste.

Refleksi pada program

74. Program Timor Barat yang berjalan enam bulan dalam bekerja sama dengan LSM Indonesia merupakan bagian penting dari pekerjaan Komisi. Dalam mandat, waktu dan sumber daya yang terbatas Komisi mencoba untuk menjangkau orang Timor-Leste yang menetap di Timor Barat secara praktis dan efektif. Hubungan kerja dan maksud baik yang ditunjukkan oleh pemerintah, LSM serta lembaga-lembaga masyarakat sipil dan perorangan merupakan dasar yang penting untuk pekerjaan di masa mendatang, yang harus tetap menjadi prioritas bagi pemerintah Timor-Leste dan Indonesia, LSM dan pekerja-pekerja sosial, dan komunitas lokal di masing-masing negara.

75. Komisi menyadari kerumitan dan kepekaan dalam melaksanakan program penjangkauan di Timor Barat. Sikap hati-hati dalam pendekatan para pengungsi kepada pekerjaan Komisi berarti, bahwa Komisi tidak dapat mencapai angka target pernyataan yang diambil. Namun banyaknya pengungsi yang diberi kesempatan untuk menceritakan kisah mereka, juga pemahaman terhadap program rekonsiliasi Komisi dan kehidupan di Timor-Leste yang merdeka, merupakan suatu pencapaian yang penting.

76. Pengalaman Komisi di dalam bidang ini menunjukkan bahwa upaya mencapai rekonsiliasi dengan para pengungsi di Timor Barat akan membutuhkan komitmen dan pemikiran kreatif. Kerumitan isu-isu ini membutuhkan komitmen dalam jangka panjang, yang melibatkan pemerintah Timor-Leste, dan organisasi-organisasi dan institusi non-pemerintah, serta dengan dukungan dari masyarakat internasional. Bagian Pelajaran Yang Dipetik pada akhir bab ini akan mengusulkan prinsip-prinsip yang harus menjadi dasar untuk pekerjaan ini, Rekomendasi-rekomendasi Komisi akan membahas isu-isu ini lebih rinci. (Lihat Bagian 11: Rekomendasi)

10.3 Pemulihan martabat para korban

10.3.1 Pendahuluan

77. Kerusakan yang diakibatkan oleh kekerasan terhadap kehidupan orang-orang, keluarga dan komunitas mereka selama 25 tahun sangat mendalam. Komisi tidak berharap untuk dapat mewujudkan pemulihan individu atau komunitas, baik secara cepat atau menyeluruh, dengan hanya melakukan satu program. Oleh karenanya dikembangkan suatu program yang multi-dimensi untuk membantu, walau hanya sedikit, proses pemulihan martabat para korban pelanggaran hak asasi manusia.

78. Beberapa bagian dari program Komisi bermaksud menangani kebutuhan nasional untuk pemulihan. Pada beberapa tingkat tertentu, seluruh rakyat Timor-Leste dan masyarakat sebagai satu kesatuan, adalah korban dari konflik-konflik politik yang terjadi antara tahun 1974 dan 1999. Oleh karena itu fokus awal dari kerja dukungan pada korban Komisi ini, untuk mempersiapkan tim-tim distrik memadukan suatu pendekatan yang terpusat pada korban dengan kerja pencarian kebenaran dan rekonsiliasi komunitas mereka. Sering dikatakan, bahwa pengambilan pernyataan merupakan langkah pertama dalam proses pemulihan yang didukung oleh Komisi. Para pengambil pernyataan di distrik dilatih dengan berbagai metode kerja yang peka, termasuk kemampuan untuk mengidentifikasi ketika orang yang memberi pernyataan memerlukan dukungan lebih lanjut. Para pengambil pernyataan juga menyerahkan orang-orang yang rawan kepada tim Dukungan untuk Korban, yang kemudian akan berusaha menghubungkan mereka dengan pertolongan spesialis jika memungkinkan. Tim rekonsiliasi distrik bekerja sama secara erat dengan tim dukungan untuk korban, dalam mempersiapkan dan membantu para korban pelanggaran hak asasi manusia yang berpartisipasi dalam audiensi.

79. Komisi juga menyadari bahwa, tanpa mengukur penderitaan masing-masing orang, pada saat ini ada sejumlah orang yang lebih membutuhkan dibandingkan yang lain karena berbagai pelanggaran yang mereka alami. Komisi merasa diharuskan oleh mandat dan prinsip-prinsipnya, untuk mengembangkan program-program tertentu yang ditujukan untuk menangani kebutuhan-kebutuhan khusus ini.

Audiensi Publik

80. Audiensi Publik memberikan pengakuan dan pemulihan secara simbolis. Kerja ini diawali dengan pengambilan pernyataan dari korban oleh anggota tim distrik. Mendengarkan dengan baik dan merekam kisah mereka adalah langkah-langkah pertama dalam rangka membantu pemulihan. Bagi beberapa di antaranya, hal ini berlanjut dengan menceritakan kisah mereka pada audiensi publik. Di tingkat nasional, sub-distrik dan desa, audiensi menempatkan para korban di tengah-tengah komunitas mereka. Masyarakat mendengarkan dan menghargai kisah mereka, mengakui penderitaan mereka, dan membantu mereka agar dapat merasa, bahwa mereka diperhatikan dan beban mereka telah dibagi.

Lokakarya Pemulihan

81. Lokakarya Pemulihan melibatkan para korban dengan cara yang lebih mendalam serta menawarkan dukungan emosional dan psikologis. Lokakarya ini menjadi sebuah forum yang aman bagi para survivor untuk bertemu dengan korban lain yang telah mengalami penderitaan berat, untuk berbagi pengalaman dan untuk mengurangi perasaan terisolasi yang dialami oleh begitu banyak korban. Lokakarya ini juga merupakan cara bagi Komisi untuk dapat mengenal korban lebih baik, dan belajar dari mereka mengenai berbagai tantangan dalam kehidupan sehari-hari mereka, dan soal apa saja yang perlu dibantu.

Reparasi Mendesak

82. Reparasi Mendesak merupakan suatu skema yang dikembangkan untuk menangani setidaknya beberapa kebutuhan mendesak korban. Komisi ini memahami, bahwa hingga saat ini masih banyak korban yang mengalami penderitaan, sebagai akibat dari kerugian tertentu yang berhubungan langsung dengan berbagai pelanggaran yang pernah mereka alami. Menjadi suatu hak dasar bagi korban pelanggaran untuk menerima reparasi. Sebagai suatu organisasi yang didirikan di atas prinsip-prinsip hak asasi manusia, membuat sejumlah kontribusi kecil untuk mewujudkan hak untuk para korban ini adalah bagian yang penting dari pekerjaan Komisi untuk para korban. Terkadang kebutuhan yang harus ditangani itu berupa cacat fisik atau luka-luka. Terkadang merupakan masalah kesehatan psikologis, dan terkadang karena keadaan ekonomi yang timbul dari pelanggaran tersebut. Sehubungan dengan Skema Reparasi Mendesak Komisi juga mendapat pelajaran yang mempengaruhi pembahasan tentang Program Reparasi apa akan merupakan program yang sesuai untuk keadaan Timor Leste. Program demikian akan dibuat hanya berdasarkan kebutuhan dan harapan masyarakat yang akan dibantu, serta dengan kemampuan yang akan membuat program itu. Desain program reparasi ini menjadi bagian dari Bagian 11: Rekomendasi.

Profil Komunitas

83. Profil Komunitas merupakan catatan tentang pengalaman bersama komunitas desa atau kampung selama jangka waktu 25 tahun konflik politik. Tim-tim distrik melaksanakan lokakarya dan membantu masyarakat dalam membuat catatan yang tetap tentang kisah-kisah tersebut dengan proses menuliskan kisah-kisah mereka dan membuat peta tempat dimana kejadian kunci terjadi. Proses ini mengakui baik kedalaman pengalaman kekerasan masyarakat dan kekayaan tradisi bercerita rakyat Timor. Pada awalnya lokakarya ini dirancang sebagai alat penelitian lokal dalam kerja pencarian kebenaran Komisi, tapi kemudian diakui sebagai kegiatan yang sangat berharga untuk mengembangkan pemahaman dan pemulihan komunitas.

84. Berbagai macam pendekatan ini memastikan bahwa Komisi melaksanakan program untuk mendukung para korban diseluruh wilayah negara hingga sampai ke tingkat bawah, dan Komisi juga melaksanakan kegiatan secara nasional bertaraf tinggi dan juga kegiatan-kegiatan yang lebih intensif dengan jumlah korban yang lebih sedikit. Bagian ini akan menjelaskan secara lebih jelas berbagai macam aspek dari program komisi ini.

10.3.2 Audiensi Publik

85. Audiensi publik merupakan bagian penting dari pekerjaan Komisi, baik di tingkat nasional, maupun di tingkat sub-distrik dan desa. Jenis-jenis audiensi yang berbeda mempunyai tujuan yang berbeda-beda pula, namun tujuan dasar dari semua jenis audiensi yang ada adalah untuk menciptakan suatu proses untuk menghormati dan turut membantu memulihkan martabat para korban pelanggaran hak asasi manusia.

86. Komisi telah menyelenggarakan delapan audiensi publik nasional. Audiensi yang pertama dengan tema khusus Audiensi Korban. Sedangkan tujuh audiensi berikutnya merupakan audiensi tematis yang membahas tema-tema besar pelanggaran hak asasi manusia yang tercakup dalam mandat Komisi, walaupun fokus utamanya adalah untuk mendengarkan kesaksian langsung dari para korban pelanggaran hak asasi manusia.

87. Tim-tim distrik menyelenggarakan audiensi publik di masing-masing sub-distrik di penghujung program triwulan mereka. Audiensi-audiensi ini dikenal sebagai Audiensi Korban, yang berfokus pada sejumlah anggota komunitas terpilih yang telah memberikan kesaksiannya pada Komisi dengan menceritakan kisah-kisahnyanya kepada para Komisaris Regional, pemuka masyarakat dan komunitasnya.

88. Audiensi Proses Rekonsiliasi Komunitas (PRK) dimaksud untuk membantu memperbaiki hubungan antar-warga di dalam suatu komunitas, sebagian dengan memulihkan martabat para korban. Audiensi-audiensi ini tidak dimulai dari para korban, tetapi oleh orang-orang yang telah merugikan komunitasnya. Secara teknis audiensi PRK ini tidak bergantung pada persetujuan seorang korban. Walau demikian, Komisi bermaksud untuk menjadikan audiensi-audiensi ini sebagai suatu proses yang mendorong pemulihan, baik para korban maupun hubungan di dalam komunitas yang lebih luas.

89. Dalam beberapa audiensi PRK tidak terdapat korban individu, melainkan komunitasnya secara keseluruhan yang diidentifikasi sebagai korban oleh pelakunya. Jika ada korban individu, Komisi akan melibatkannya di dalam proses. Biasanya mereka akan duduk di depan para hadirin, di sebelah anggota panel yang memimpin sidang. Mereka mempunyai hak untuk menjawab atau bertanya kepada pelaku, dan panel terkadang akan bertanya kepada para korban, "tindakan rekonsiliasi" apa yang layak untuk dikenakan kepada deponen. Dengan cara ini ada pengakuan sosial terhadap penderitaan yang dialami korban, dan juga perasaan berbesar hati oleh korban yang turut berperan dalam membantu reintegrasi mantan pelaku kembali ke masyarakat desanya.

90. Bagian 9 dari Laporan ini tentang Rekonsiliasi Komunitas membahas peran korban dalam audiensi rekonsiliasi komunitas dengan lebih rinci. Bagian ini berfokus pada audiensi tingkat nasional dan sub-distrik.

Tujuan audiensi publik

91. Audiensi publik nasional dan sub-distrik menjadi bagian yang besar dari kerja Komisi. Audiensi-audiensi ini ditujukan untuk menumbuhkan pengakuan nasional mengenai kebenaran dari pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu, serta dampaknya yang mendalam atas kehidupan seseorang, keluarga, komunitas dan bangsa. Dengan menjadikan kesaksian pribadi para korban pelanggaran sebagai tonggaknya, pendidikan mengenai hak asasi manusia dan peningkatan kesadaran akan nilai-nilai hak asasi mengalir dari kekuatan kisah-kisah itu, untuk menjangkau semua orang di Timor-Leste. Dari sejumlah kecil mantan korban yang bersaksi, orang-orang di seluruh penjuru negeri dapat mengenali pengalaman mereka atau keluarga mereka masing-masing.

92. Penggunaan media massa berperan penting demi keberhasilan audiensi nasional; televisi dan radio nasional menyiarkan secara langsung audiensi-audiensi ini hampir secara utuh ke berbagai penjuru negara, kemudian disiarkan ulang secara berkala. Hal ini memastikan bahwa para pengambil keputusan negara juga mendengarkan berbagai cerita dan pandangan para korban pelanggaran hak asasi manusia. Dengan memberi penghormatan dan pengakuan kepada para korban dalam audiensi-audiensi tersebut, Komisi bermaksud untuk meningkatkan rasa pemulihan dan rekonsiliasi.

93. Audiensi publik bukanlah merupakan proses investigasi formal, dan tidak menuruti aturan hukum dan prosedur pengumpulan bukti. Tidak ada pengakuan dari pelaku, atau membawa pelaku dan korban untuk saling berhadapan. Tujuannya adalah untuk mengetengahkan dimensi kemanusiaan sepenuhnya dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Timor-Leste, dan memetik pelajaran dari berbagai faktor yang mempengaruhi dan pola di balik pelanggaran-pelanggaran ini, serta untuk membangun komitmen nasional terhadap ungkapan "jangan lagi." Menceritakan kebenaran diharapkan dapat menjadi sarana untuk meningkatkan semangat rekonsiliasi pribadi dan masyarakat.

Para korban yang dipilih untuk bersaksi

94. Orang-orang yang dipilih staf Komisi untuk bersaksi pada audiensi diambil dari para korban yang telah memberi pernyataan kepada tim pencari kebenaran tingkat distrik. Kriteria

seleksi di antaranya adalah: apakah seseorang korban akan merasa nyaman berbicara di depan orang banyak; apakah mereka akan memetik manfaat dari pengalaman ini; apakah pernyataan mereka dapat dipercaya; apakah dengan menceritakan kisahnya akan membantu rekonsiliasi melalui pengakuan kebenaran; dan, apakah mereka dapat mewakili yang lainnya yang juga memiliki cerita serupa, akan tetapi tidak memiliki kesempatan untuk bersaksi.

95. Tim pencari kebenaran Komisi tingkat distrik telah mengambil 7.824 pernyataan, dan sekitar 90% pemberi pernyataan mengatakan bahwa mereka bersedia untuk bersaksi di audiensi publik. Bagi sebagian besar orang, dirasa penting untuk menceritakan kisahnya kepada komunitas dan di hadapan Komisi. Ini menjadi satu alasan mengapa format audiensi publik dikembangkan ke tim-tim distrik untuk menyelenggarakan audiensi di tingkat sub-distrik.

96. Kisah seorang Iria Moniz memperlihatkan betapa pentingnya bagi banyak orang untuk memberikan pernyataan mereka, serta menceritakan kisahnya pada audiensi Komisi.

Dari desa terpencil ke audiensi publik

Bagi Iria Moniz kesempatan untuk berbagi pengalaman di audiensi publik bagaikan suatu anugerah yang didapat melalui ketabahan dan komitmen. Ia menceritakan:

Pada mulanya saya tidak tahu, bahwa program Komisi akan datang ke sub-distrik dan desa kami, karena Kepala Desa kami tidak memberi tahu. Saya tinggal di desa terpencil yang sulit dijangkau oleh kendaraan mobil dan motor, karena memang tidak ada jalan. Inilah alasan kenapa kabarnya tidak sampai ke kami.

Jadi setelah Komisi pergi...saya sendiri yang pergi untuk mencari mereka di kantor Komisi di Maliana (Bobonaro) untuk memberi pernyataan...Saya merasa program mereka ini sangat penting, karena saya banyak menderita selama perang...

Ketika saya pergi ke kantor Komisi di Maliana, mereka menyambut saya dengan baik dan mewawancarai saya. Saya tidak merasa takut untuk memberikan pernyataan saya kepada Komisi. Komisi juga memberi saya kesempatan untuk berbicara mengenai rasa sakit dan penderitaan saya di depan umum. Mereka tidak memaksa saya untuk ikut serta dalam Audiensi Publik Bobonaro. Saya (punya) mau sendiri, supaya dapat membagi beban yang selama bertahun-tahun telah saya pikul. Setelah itu saya merasa lebih lega.⁵

97. Pada audiensi publik di tingkat nasional maupun di sub-distrik, Komisi melakukan seleksi para korban yang selamat (survivor), dengan maksud untuk mendapatkan wakil-wakil dari berbagai daerah, yang berbicara tentang kejadian-kejadian dari periode yang berbeda-beda, dan melibatkan kelompok pelaku yang cukup mewakili. Juga diupayakan agar ada keseimbangan antara perempuan dan laki-laki. Ini merupakan hal yang penting agar komunitas dapat memahami, bahwa Komisi adalah lembaga yang netral secara politik, yang memiliki mandat untuk menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia dalam konteks konflik politik, tanpa memandang siapa yang melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut.

98. Walaupun audiensi-audiensi ini tidak berusaha untuk mempertemukan korban dan pelaku, selalu ada kemungkinan terjadi ketegangan di daerah setempat, terutama pada audiensi komunitas di tingkat sub-distrik. Komisi tidak memiliki kapasitas perlindungan saksi, dan semata-mata mengandalkan aparat kepolisian sub-distrik setempat untuk menjaga keamanan. Jika seseorang korban merasa, kesaksiannya dapat membahayakan keselamatan pribadinya, Komisi akan menganjurkannya agar tidak memberi kesaksian di audiensi publik.

Audiensi publik nasional

99. Audiensi publik nasional pertama oleh Komisi diselenggarakan pada tanggal 11-12 November 2002, di auditorium bekas kompleks UNAMET dan CNRT di Balide, Dili. Tiga tahun sebelumnya, ribuan orang mencari perlindungan di kompleks ini, pada hari-hari yang penuh kekerasan menyusul Konsultasi Rakyat 1999. Tanggal itu sengaja dipilih, agar bertepatan dengan peringatan 11 tahun pembantaian Santa Cruz, tanggal 12 November 1991. Baik lokasi maupun tanggalnya memberi arti, bahwa audiensi ini bertujuan untuk memberi penghormatan kepada penderitaan para korban pelanggaran hak asasi manusia.

100. Audiensi ini dikenal dengan “Audiensi Korban”, dengan tema “Dengarlah Suara Kami” (atau “*Rona Ami nia Lian*” dalam bahasa Tetum). Enam perempuan dan delapan laki-laki dari ke-13 distrik di Timor-Leste memberi kesaksian mereka. Mereka dari rentang usia antara dua puluhan awal sampai enam puluhan lebih, dan menceritakan mengenai pelanggaran yang terjadi selama masa 24 tahun periode mandat Komisi. Mereka bercerita mengenai kekerasan yang terjadi selama masa konflik internal tahun 1975 oleh partai-partai politik Timor-Leste, dan pelanggaran-pelanggaran selama bertahun-tahun di bawah militer Indonesia dan kaki tangannya.

101. Radio Timor-Leste dan Radio Rakambia menyiarkan audiensi ini secara langsung, serta diliput oleh berbagai media massa mancanegara.

102. Audiensi melibatkan berbagai upacara adat Timor, paduan suara, puisi dan pidato. Acara ditutup dengan misa dan prosesi ke pekuburan Santa Cruz, di sana karangan bunga diletakkan untuk memperingati para korban pembantaian tahun 1991 itu. Elemen budaya audiensi membantu menciptakan suasana yang mendukung bagi mereka yang bersaksi, serta untuk membedakan audiensi dari sidang pengadilan resmi. Pelibatan budaya Timor tradisional dan modern menjadi unsur penting dari semua audiensi Komisi.

103. Setelah diambil sumpahnya oleh para Komisaris Nasional, para survivor diberi kesempatan untuk menceritakan kisah masing-masing tanpa interupsi, terkadang, di ujung akhir kesaksian, diajukan beberapa pertanyaan singkat oleh para Komisaris untuk penjelasan. Ini menciptakan dinamika, di mana pemberi kesaksian tidak hanya berbicara kepada para Komisaris, tapi juga langsung kepada para hadirin dan pendengar radio dan pemirsa televisi. Kesempatan berbicara langsung kepada Komisi dan masyarakat luas, merupakan bagian penting untuk menghormati martabat para mantan korban, dan menjadi bagian dari seluruh audiensi yang diselenggarakan Komisi.

Dengarlah Suara Kami - Rona Ami-nia Lian

Audiensi publik nasional yang pertama oleh Komisi memperdengarkan enam orang perempuan dan delapan laki-laki korban pelanggaran berat hak asasi manusia dari seluruh distrik di Timor-Leste. Audiensi ini diadakan pada tanggal 11 dan 12 November 2002, untuk turut memperingati pembantaian Santa Cruz tahun 1991, dan memberi penghormatan pada para korban kekejaman ini.

Teresinha da Silva dari Aileu, perempuan kecil yang sudah lanjut usia ini, berbicara mengenai pemukiman paksa penduduk sipil di kamp-kamp oleh Fretilin pada tahun 1975, sebelum invasi Indonesia, dan kematian lebih dari 20 anggota keluarganya, sebagai akibat kelaparan yang terjadi kemudian.

VN bercerita, bagaimana dia disekap sebagai budak seks di markas militer Indonesia di Ermera, dari tahun 1977 sampai 78. Dia bercerita, bahwa dia melahirkan dua orang anak, dan salah seorang sudah meninggal. Dia juga bercerita, bagaimana dia dan anak laki-laknya masih terus dikucilkan oleh komunitasnya.

Atanasio da Costa berbicara mengenai serangan kejam oleh milisi di luar rumahnya di Oecusse pada bulan April 1999. Setelah ditebas berulang kali dengan parang, dia akhirnya rebah, dan kemudian dihunjam duburnya dengan laras senapan. Atanasio da Costa memperagakan kembali adegan-adegan penyerangan ini, untuk menunjukkan bagaimana ia diserang ketika ia tergeletak tak berdaya di tanah, lalu membuka baju-kausnya untuk memperlihatkan bekas-bekas luka dari penyerangan ini. Dia bercerita pada para Komisaris mengenai perawatan medis yang pernah diperoleh untuk menyembuhkan cedera yang dialaminya, termasuk sepuluh kali operasi, dan kelemahan kondisi fisik akibat dari serangan itu masih terus dirasakannya dalam kehidupannya sehari-hari.

Seorang perempuan muda dari Suai (Covalima) membuat para hadirin berlinang air mata dalam kesaksian terakhir audiensi ini. Seorang perempuan muda yang penuh harga-diri. Ia menceritakan tentang pengalamannya setelah pembantaian penduduk sipil di Gereja Suai, setelah Konsultasi Rakyat tahun 1999. Ia dibawa ke sebuah gedung sekolah bersama beberapa perempuan lainnya, dan di sana ia diperkosa berulang kali di depan orang banyak selama seminggu. Dia kemudian dibawa ke Timor Barat, Indonesia, di mana kekerasan seksual ini berlanjut. Sebagai akibatnya ia melahirkan seorang anak. Dia bertanya pada hadirin, apakah ia boleh memperlihatkan bayinya yang berumur satu tahun. Hadirin serentak menyahut, "Ya!", dan anak dia yang berumur satu tahun dibawa ke panggung oleh neneknya. Diberi nama mengikuti nama seorang mantan Komisaris Tinggi PBB, yang pernah mengunjungi perempuan muda itu dan korban-korban perempuan Suai lainnya pada tahun 2000. Bayi dia benar-benar merupakan lambang penyembuhan dan hak asasi manusia di Timor-Leste.

Di semua penjuru auditorium kelompok orang-orang menangis dan berangkul. Cerita-cerita ini mengungkit kembali pengalaman traumatis mereka sendiri. Seorang perempuan muda yang dikelilingi teman-temannya yang menangis, teringat kembali pada peristiwa pembunuhan suaminya hanya selang satu hari setelah pernikahan mereka di bulan Agustus 1999. Seminggu setelah audiensi ini, Tim Komisi yang berkunjung ke desa diperbukitan di Nitibe di daerah kantong Oecusse, salah satu daerah paling terpencil di Timor-Leste, diberi cerita oleh orang-orang di sana, bahwa mereka juga mendengarkan siaran langsung audiensi, dan bahwa mereka turut menangis ketika mendengar kesaksiannya.

Aniceto Guterres Lopes, Ketua Komisi, menyimpulkan tanggapan dari orang-orang yang hadir,

Anda semua telah menceritakan mengenai penderitaan anda selama dua hari audiensi ini, tapi saya ingin mengatakan bahwa anda tidak sendiri. Melalui cerita-cerita anda, anda telah berbagi penderitaan anda dengan kami, dan sekarang kami semua turut merasakannya bersama anda sekalian. Anda dapat melihat di sini hari ini, bagaimana kisah-kisah penderitaan anda itu telah mempengaruhi kita semua. Kami membuka hati kami semua untuk anda.

Audiensi nasional tematis

104. Tujuh audiensi nasional yang lain memiliki karakter yang agak berbeda. Masing-masing memiliki fokus tematis, yang didasarkan pada bidang-bidang pokok pembahasan dari penelitian pencarian kebenaran Komisi. Tema-tema itu ialah:

- Pemenjaraan Politik (Februari 2003),
- Perempuan dan Konflik (April 2003),
- Pemindahan Paksa dan Kelaparan (Juli 2003),
- Pembantaian massal (November 2003),
- Konflik Internal 1974-1976 (Desember 2003),
- Penentuan Nasib Sendiri dan Masyarakat Internasional (Maret 2004),
- Anak-anak dan Konflik (Maret 2004).

105. Sebagian besar audiensi berlangsung selama dua hari, walaupun audiensi tentang Pembantaian massal serta Penentuan Nasib Sendiri dan Komunitas Internasional masing-masing berlangsung selama tiga hari, dan Konflik Internal 1974-1976 berlangsung selama empat hari.

106. Format audiensi tematis nasional didasarkan pada kesaksian orang-orang yang mengalami pelanggaran, yang berhubungan dengan tema yang menjadi pembahasan. Rata-rata 10 korban memberi kesaksian pada tiap audiensi. Komisi juga mendengarkan kesaksian dari para ahli dan submisi dari lembaga dan individu, yang memiliki latar belakang mengenai permasalahan yang sedang dibahas, atau mempunyai pengetahuan khusus mengenai kejadian-kejadian di Timor-Leste. Kesaksian ahli membantu Komisi dan hadirin untuk menempatkan kesaksian korban di dalam sebuah konteks, dan untuk memahami dengan lebih baik beberapa penyebab dan pola dari pelanggaran-pelanggaran itu.

107. Dua dari audiensi itu memiliki format yang agak berbeda. Audiensi mengenai Konflik Internal 1974-1976 selain mendengarkan kesaksian dari empat korban pelanggaran selama periode tersebut, juga mendengar kesaksian dari orang-orang dan partai-partai mereka yang memainkan peran sejarah yang penting pada kejadian-kejadian pada tahun 1974-1976. Diantara para pembicara yang memainkan peran langsung pada kejadian-kejadian tersebut, dan dikenal sebagai “pelaku-pelaku sejarah” (“*agentes do processo*”) ialah Presiden Timor-Leste, Xanana Gusmão, Perdana Menteri Mari Alkatiri, Pemenang Nobel Perdamaian dan Menteri Luar Negeri Dr. José Ramos-Horta dan Francisco Xavier do Amaral, mantan Presiden Fretilin.

108. Audiensi di bulan Maret 2004 tentang Penentuan Nasib Sendiri dan Komunitas Internasional tidak melibatkan kesaksian korban sama sekali. Komisi mendengarkan submisi mengenai berbagai kebijakan pemerintah asing mengenai masalah Timor-Leste selama masa 1974-1999, juga mengenai aksi masyarakat sipil internasional tentang Timor-Leste selama periode ini. Juga didengarkan kesaksian mengenai peran orang-orang Timor-Leste di pengasingan.

109. Di dalam pandangan masyarakat umum Audiensi Korban dan audiensi tematis nasional ini dalam banyak hal merupakan titik tertinggi pencapaian kerja Komisi. Dengan peliputan penuh oleh media, audiensi-audiensi ini disaksikan di seluruh penjuru negeri dan diberitakan oleh media

internasional. Peliputan luas ini menjadi penting untuk memperluas pemahaman mengenai dukungan bagi korban serta pekerjaan Komisi. Suara para korban adalah hal utama yang didengar oleh masyarakat dalam dialog nasional mengenai pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu.

Hal-hal penting dari audiensi nasional

110. Hal pokok dari audiensi-audiensi termasuk peresmian kantor nasional Komisi di bekas penjara politik Comarca di Balide. Kantor nasional dibuka dengan audiensi mengenai Pemencaraan Politik yang menyajikan kesaksian dari para mantan tahanan, termasuk beberapa orang yang pernah ditahan di Comarca. Audiensi tentang Perempuan dan Konflik memberi sekilas pandang mengenai hidup dan penderitaan para perempuan selama periode konflik. Audiensi yang diberi tajuk Pembantaian Massal mendengarkan kesaksian dari para korban tindakan-tindakan terkejam selama periode mandat Komisi, termasuk di antaranya tidak hanya Pembantaian Kraras, Pembantaian Santa Cruz tahun 1991, Pembantaian Gereja Liquiça tetapi juga kejadian yang tidak begitu terkenal yang terjadi pada periode konflik internal partai politik, setelah invasi Indonesia ke Dili, dan selama akhir tahun 1970-an dan awal tahun 1980-an.

111. Audiensi Pemindahan Paksa dan Kelaparan membahas satu periode tragis dalam sejarah Timor-Leste. Kelaparan dan penyakit akibat perang telah membunuh puluhan ribu penduduk sipil selama 24 tahun periode mandat. Cerita mengenai pengepungan dan kampanye pemboman terhadap penduduk sipil di gunung, kamp 'konsentrasi' bagi orang-orang yang menyerahkan diri di pulau penjara Ataúro, tidak pernah diulas secara publik sebelumnya.

112. Bagi banyak orang, audiensi di bulan Desember 2003 mengenai Konflik Politik Internal 1974-1976 akan menjadi momen yang paling dikenang dari kerja Komisi. Untuk pertama kalinya para pemimpin Timor-Leste berbicara di hadapan umum, dan dalam sebuah forum resmi, mengenai kekerasan antar sesama orang Timor-Leste pada tahun 1974-1976. Ketidak-pastian mengenai bagaimana para pemimpin politik akan bereaksi terhadap kesempatan ini mewarnai jalannya audiensi. Pada akhirnya, semangat kerendahan hati, tanggung jawab dan kesedihan yang mendalam, serta rekonsiliasi antara musuh-musuh politik lama menjadi suatu momen yang unik dalam sejarah Timor-Leste.

113. Audiensi tentang Penentuan Nasib Sendiri dan Masyarakat Internasional memberi kesempatan langka bagi orang Timor-Leste untuk mengetahui tentang persepsi internasional yang lebih luas, serta pengaruhnya bagi perjuangan panjang mereka untuk penentuan nasib sendiri. Kesaksian dari teman-teman lama Timor-Leste seperti Pat Walsh, David Scott dan James Dunn dari Australia, Arnold Kohen dari Amerika Serikat, Monica Nakamura dari Jepang, Luisa Teotonia Pereira dari Portugal, dan Francesc Vendrell dari PBB, mengingatkan kita semua bahwa bahkan di masa-masa kekerasan yang paling suram pun, masih ada orang-orang di berbagai penjuru dunia yang berusaha untuk membela hak orang Timor-Leste untuk penentuan nasib sendiri. Kesaksian Ian Martin, Wakil Khusus Sekretaris-Jendral pada masa UNAMET mengingatkan kembali orang Timor-Leste bahwa penderitaan mereka belum terakhir sejak Masyarakat Internasional mengakui tanggungjawabnya untuk membiarkan mereka menggunakan hak kolektif untuk menentukan nasib sendiri.

114. Partisipasi pembela hak asasi manusia dari Indonesia, seperti teman-teman baik para tahanan politik Timor-Leste, Ibu Ade Rostina Sitompul dan Luhut Pangaribuan, serta anggota dan staf Komnas Perempuan, Tim LSM Kemanusiaan Timor Barat, dan aktivis hak asasi manusia Yeni Rosa Damayanti dan Nugroho Katjasungkana merupakan simbol penting mengenai hubungan baru dengan Indonesia, yang didasari atas prinsip-prinsip hak asasi manusia. Mereka juga mengingatkan kita, bahwa ada beberapa warga negara Indonesia yang mengambil resiko besar untuk membela hak asasi manusia di Timor-Leste.

115. Audiensi terakhir tentang Anak-anak dan Konflik pantas menutup kerja Komisi yang ini, karena audiensi ini tidak hanya mengangkat penderitaan tragis yang dialami oleh para korban anak, tetapi juga menyampaikan ketahanan dan kekuatan generasi muda Timor-Leste.

116. Dampak dari audiensi publik ini di seluruh Timor-Leste merupakan perkembangan besar dalam kerja Komisi. Untuk meneruskan pelajaran yang didapat dari audiensi-audiensi ini, Komisi telah menerbitkan buku mengenai masing-masing audiensi. Dengan menyediakan catatan tetap kepada masyarakat Timor-Leste, Komisi mengharapkan bahwa pelajarannya yang terdapat tetap bergema.

Pidato pembukaan Uskup Basilio do Nascimento pada Audiensi Publik Nasional tentang Konflik Politik Internal 1974-1976

Mengapa kita berkumpul di sini hari ini? Karena saat bersejarah...karena luka-luka masa lalu, semua orang Timor sudah menunggu...supaya kita bisa rekonsiliasi. Rekonsiliasi demi penderitaan masa lalu, untuk tanah air kita. Semua orang Timor sudah menderita. Kita orang Timor harus melakukan rekonsiliasi dengan diri kita sendiri, dengan tanah air kita dan dengan sejarah kita. Kita sadar ini merupakan suatu gagasan yang baik, akan tetapi ini sulit untuk dilakukan. Kita mendengar kata-kata pembenaran dan rasionalisasi: "Karena perang saya melakukan ini dan itu"...Kita perlu memeriksa ini.

Tentang moralitas-rekonsiliasi di dalam diri sendiri hanya akan terjadi jika kita dapat melepaskan diri dari rasa sesal yang mendalam. Jika tidak, ada suara yang akan selalu menghantui kita, selalu menyeru-nyeru di kepala kita, di pikiran kita. Itulah mengapa saya katakan, bahwa rekonsiliasi akan dapat dicapai jika kita dapat terlepas dari penyesalan yang mendalam. Kita dapat saja mengarang berbagai alasan dan argumentasi penalaran, tapi kalau kita tidak melakukan rekonsiliasi dengan diri sendiri, kita akan selalu terpecah-belah. Tidak hanya sebagai bangsa atau kelompok, tapi juga di dalam diri kita masing-masing seperti layaknya berkepribadian ganda: mulut kita berkata satu hal, tindakan kita melakukan sesuatu yang lain.

Kita tahu saudara-saudara kita yang sudah meninggal tidak akan pernah kembali, tapi kita perlu tahu keadaan tentang bagaimana mereka meninggal. Apa yang kita orang Timor maksudkan dengan keadilan ialah istimewa. Saya melihat, bahwa orang Timor tidak menunggu untuk menghukum orang-orang yang telah berbuat salah. Ini sampai suatu keadaan ketika anak laki Bibi Maria dibunuh di gunung keadilan bagi orang Timor kebanyakan meliputi pembersihan nama mereka, dan memastikan bahwa orang tidak melupakan (para korban). [Kutipan dari pidato tanggal 15 Desember 2003]

Audiensi korban sub-distrik

117. Tim-tim distrik bekerja di masing-masing sub-distrik dalam distriknya selama sekitar tiga bulan. Selama masa ini mereka mengambil pernyataan-pernyataan untuk pencarian kebenaran, memfasilitasi audiensi rekonsiliasi komunitas, melakukan lokakarya profil komunitas dan memberi dukungan bagi korban pelanggaran hak asasi manusia.

118. Di akhir masa kerja tiga bulannya, tim menyelenggarakan audiensi publik di sub-distrik tersebut, yaitu Audiensi Korban Sub-Distrik. Pejabat pemerintah sipil setempat, pemuka adat dan masyarakat dari sub-distrik dan distrik, diundang untuk menghadiri audiensi tersebut, bersama para Komisararis dan staf dari kantor nasional. Pada audiensi tim distrik melaporkan kegiatannya selama tiga bulan sebelumnya kepada komunitas. Komunitas kemudian mendengarkan kesaksian dari para korban pelanggaran hak asasi manusia, yang dipilih dari anggota komunitas yang telah memberi pernyataan kepada tim distrik. Biasanya antara empat sampai enam korban yang memberi kesaksian.

119. Audiensi Korban Sub-Distrik diilhami oleh kuatnya pengaruh audiensi nasional, dan oleh harapan-harapan yang dinyatakan dari begitu banyak korban yang ingin bersaksi. Audiensi-audiensi ini merupakan peringatan bagi orang-orang yang tewas, dan pernyataan syukur dari anggota masyarakat yang selamat, serta komitmen mereka untuk menyembuhkan perpecahan masa lalu dengan semangat rekonsiliasi. Audiensi juga merupakan kesempatan untuk berbagi hasil kerja selama tiga bulan bersama komunitas; untuk menekankan kembali, bahwa salah satu peran Komisi ialah membantu memulihkan martabat para korban dalam komunitas mereka; dan untuk menutup dengan cara seremonial kegiatan Komisi di sub-distrik.

120. Secara total ada 52 Audiensi Korban Sub-Distrik telah diselenggarakan. Enam puluh lima perempuan dan 149 laki-laki memberi kesaksian, dan diperkirakan sekitar 6.500 anggota masyarakat telah ikut ambil bagian.

Audiensi Sub-Distrik: Natarbora

Natarbora adalah sebuah sub-distrik terpencil di pedalaman tenggara distrik Manatuto. Tim distrik Komisi untuk Manatuto bekerja di sub-distrik ini selama bulan Februari sampai Mei 2003. Audiensi sub-distrik untuk menandai penutupan partisipasi komunitas dalam kegiatan-kegiatan Komisi, yang diadakan pada 12 Mei 2003, dan dihadiri oleh sejumlah besar warga masyarakat.

Pada audiensi ini tiga orang korban pelanggaran hak asasi manusia bersaksi di depan Komisi dan komunitas mereka. Kesaksian mereka tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tahap-tahap penting konflik, yaitu antara 1975 - 1999.

Senhora Filomena (nama keluarga dirahasiakan) berbicara tentang pengalamannya, sebagai anggota organisasi perempuan OPMT, antara 1975 – 1979, yang membantu prajurit-prajurit Falintil. Ia berbicara tentang penangkapannya dalam tahun 1980, sesudah salah seorang anggota keluarganya menceritakan pada tentara tentang kegiatan-kegiatannya. Ia mengatakan, sekarang ia tinggal di Indonesia. Sra Filomena menceritakan, bagaimana penyiksaan yang dialaminya selama pemeriksaan oleh tentara Indonesia. Selanjutnya ia ceritakan, bahwa pada tahun 1999 kios miliknya dibakar habis oleh tentara Indonesia, dengan bantuan orang-orang Timor-Leste, termasuk pejabat pemerintah sub-distrik. Ia juga mengatakan, seandainya mereka itu akan kembali ke masyarakat, ia akan bersedia menerima mereka kembali.

WN bercerita tentang peristiwa tragis yang menimpa keluarganya dalam tahun 1977 - 1978. Diceritakannya, sesudah ayahnya menyerah kepada tentara Indonesia, anggota-anggota Falintil datang dan memperkosa bibinya, yang ketika itu masih muda dan belum bersuami. Ia mengatakan, mereka mengancam akan membunuhnya jika ia hendak menghalangi pemerkosaan terhadap bibinya itu. Kemudian diceritakannya, tidak lama sesudah kejadian itu, ibunya dan kelima adiknya serta bibinya tersebut semuanya dibunuh oleh tentara Indonesia di dekat laut.

João Graciano menceritakan pengalamannya di penjara, sesudah ia menyerah pada tentara pada tahun 1982 di Soibada. Ia, ayahnya, adik laki-lakinya, dan tujuh penduduk sipil dipenjarakan selama enam minggu. Di sana, katanya, mereka hampir tidak pernah diberi makan. Sesudah dilepas ia dan adik laki-laki itu diambil oleh tentara Indonesia, dan dijadikan TBO (Tenaga Bantuan Operasi). Mereka berdua dipaksa bekerja sebagai TBO di hutan dekat Barique selama empat bulan. Tentara itu kemudian memerintahkan anggota Hansip Timor untuk menawan mereka di Soibada. Selama dalam tahanan mereka berdua dipukuli habis-habisan oleh sepuluh orang lebih tentara dan anggota Hansip, sehingga adiknya sampai sekarang masih menderita cacat fisik.

Audiensi merupakan proses untuk menghormati pengalaman individu yang telah menderita selama mandat Komisi, juga untuk menceritakan dan menghormati masyarakat luas di wilayah Natarbora selama tahun-tahun itu, dan untuk mengenang mereka yang telah tewas. Audiensi direkam dan disiarkan oleh pogram radio Komisi setiap minggu, dan melalui wahana ini pengalaman warga masyarakat dari daerah terpencil bisa dibagikan pada masyarakat di seluruh Timor-Leste.

Dampak keikut-sertaan terhadap Korban

121. Komisi melakukan evaluasi terhadap tanggapan peserta dalam Audiensi Korban Sub-Distrik antara Januari dan Maret 2004. Bagian ini juga termasuk tanggapan yang diberikan oleh orang-orang Timor-Leste, sesuai yang didokumentasikan dalam survey.⁶ Karena keikut-sertaan dalam audiensi ini bersifat sukarela, bukan sesuatu yang mengejutkan bila para korban melaporkan pengalaman yang positif tentang audiensi-audiensi ini.

122. Carlos Vitorino yang berusia 70 tahun mengungkapkan perasaan, yang juga dirasakan oleh peserta lainnya ketika ia mengatakan:

Saya merasa bahagia karena orang-orang di Viqueque dan orang-orang penting di Dili datang untuk mendengarkan sendiri kata-kata kita...Saya merasa sungguh puas.

123. Domingas Piedade ikut serta dalam Audiensi Korban di Sub-Distrik Quelicai. Ia menekankan arti penting pengakuan terhadap penderitaan yang dialami olehnya dan orang-orang lain untuk pemulihan:

Saya merasa bahagia karena saya mendapat kesempatan untuk berbicara...semua hal dalam audiensi ini sungguh baik, karena telah menyembuhkan kesusahan kami.

124. Teófilo da Costa Barros dari Lolotoe (Bobonaro) mengatakan, bahwa bebannya telah terangkat oleh audiensi:

Setelah saya bersaksi di audiensi publik, saya merasa lega karena saya dapat membuang beban emosional saya. Beban ini telah terbang, dan sekarang saya sudah tidak risau lagi. Saya juga telah membebaskan diri dari rasa benci terhadap orang-orang yang telah melukai saya di masa lalu. Sekarang saya akan selalu menerima mereka dengan tangan terbuka.

125. Sama halnya dengan Tito Soares de Araújo dari sub-distrik Cailaco (Bobonaro) yang mengatakan betapa ia merasa senang dengan audiensi.

Saya merasa bahwa audiensi ini luar biasa, sangat bagus...sekarang saya merasa ringan dan bahagia, karena beban di hati telah saya tumpahkan.

126. Lourença da Cunha Moniz dari sub-distrik Maliana (Bobonaro) merasa puas, karena ia telah bisa berbuat bagi generasi mendatang dengan menceritakan apa yang pernah terjadi padanya.

Saya tidak menyimpan hal-hal buruk yang terjadi pada saya di dalam hati. Saya akan menceritakannya agar dapat dicatat dalam sejarah untuk anak cucu kita.

127. Banyak korban berbicara mengenai arti penting audiensi ini bagi hubungan keluarga dan komunitas mereka. Biasanya keluarga dan teman-teman akan membantu korban, dengan memberikan apa yang mereka perlukan sebelum, selama dan sesudah audiensi. Florentina Gama, yang bersaksi dalam audiensi Balibo (Bobonaro), mengatakan bahwa banyak anggota keluarga dan komunitasnya yang ada di sekitarnya. Dia mengatakan:

Ketika saya ambil bagian dalam audiensi, banyak keluarga saya yang mendukung keinginan saya untuk bicara di depan umum. Mereka tidak berkeberatan. Mereka berterima kasih, bahwa saya dapat bercerita mengenai penderitaan yang saya alami selama hidup, dan bahwa para pemimpin dapat mendengarkannya dan menaruh peduli pada kami...Setelah saya memberi kesaksian dalam audiensi publik, tetangga dan keluarga tidak ada yang kecewa. Mereka merasa senang, karena saya telah mewakili korban-korban lain dari kota saya, dan menceritakan penderitaan yang telah dialami oleh setiap keluarga.

128. Tanggapan keluarga Lourença da Cunha Moniz, dari sub-distrik Maliana (Bobonaro), pada awalnya mengejutkan. Karena mereka belum pernah sebelumnya mendengarkan cerita Lorença itu. Pada audiensi itu, keluarga Lourença menangis bersama dia:

Ketika saya bersaksi di audiensi, keluarga saya terkejut, karena saya telah merahasiakan cerita saya dari mereka. Baru setelah Komisi datang, saya bagi rasa sakit dan derita saya di muka umum dan di hadapan para pejabat setempat...Ketika saya bersaksi di audiensi publik itu, keluarga dan teman-teman saya juga turut sedih dan menangis mendengar penderitaan yang saya alami...

129. Tetapi yang lainnya menerima reaksi yang berbeda-beda dari keluarga dan komunitasnya. Keputusan Teofilo da Costa Barros di Lolotoe (Bobonaro) untuk mengikuti audiensi disambut dengan diam dan tak acuh oleh keluarga dan tetangga, walaupun tidak terang-terangan menentang:

Ketika saya pergi ke audiensi, tidak seorang pun dari keluarga saya yang mendukung. Mereka tidak mengucapkan kata sepatah pun. Sesudah saya memberi kesaksian, saya pulang, dan keluarga serta tetangga tidak ada yang mengancam atau marah pada saya.

130. Di Sub-Distrik Bobonaro (Bobonaro), Iria Moniz, bekas pemimpin klandestin di desanya, mengatakan bahwa pada awalnya keluarganya menuduh ia telah mengkhianati Xanana Gusmão dengan memberi kesaksian di audiensi. Tapi setelah audiensi:

Banyak orang yang merasa sedih dan beberapa datang dan memeluk saya dan menangis, karena cerita saya membuat hati mereka merasa pilu.

131. Pengalaman Irina Moniz membukakan kenyataan, bahwa bicara tentang kekerasan yang terjadi antara sesama orang Timor, masih merupakan masalah yang peka, meskipun yang dibicarakan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi bertahun-tahun yang lalu. Tekanan untuk tetap diam bisa sangat kuat, sehingga bisa berakibat terus mengucilkan korban dalam penderitaannya. Kenyataan seperti ini perlu selalu diperhatikan, jika mengingat program-program masa depan dalam membangun rekonsiliasi di tingkat komunitas.

Dampak dari audiensi publik

132. Audiensi korban merupakan pengalaman bangsa bersama-sama untuk mendengarkan suara korban dan menghadapi kebenaran serta akibat pelanggaran hak asasi manusia di masa

lalu. Audiensi-audiensi ini menjadi dasar untuk dialog lebih lanjut di tingkat nasional dan komunitas, tentang bagaimana menghadapi pelanggaran di masa lalu dalam semangat rekonsiliasi. Audiensi sub-distrik khususnya menjadi sangat penting dalam membawa proses ini keluar dari kota Dili dan masuk ke komunitas-komunitas lokal.

133. Audiensi nasional merupakan pengalaman baru bagi korban dan bangsa. Sebagian besar korban berasal dari pedesaan, dan tidak pernah mendapat kesempatan berbicara pada suatu acara resmi apa pun. Melalui tayangan televisi Dili dan siaran radio ke seluruh penjuru negeri, suara korban mencapai komunitas dan keluarga di seluruh Timor-Leste. Audiensi memberi mereka kesempatan yang istimewa untuk berbicara secara langsung kepada para pemimpin nasional, ketika para Komisaris Nasional bertanya, apakah ada pesan dari para korban yang hendak disampaikan kepada bangsa. Dengan demikian audiensi telah menempatkan orang-orang awam di tengah-tengah perdebatan bangsa tentang penyembuhan, rekonsiliasi dan keadilan.

134. Komisi telah mengangkat isu-isu yang sensitif pada audiensi publik, khususnya pada audiensi nasional. Untuk pertama kalinya, masyarakat mendengar kesaksian langsung mengenai pelanggaran-pelanggaran kejam yang dilakukan oleh partai politik Timor-Leste pada tahun 1974-1976. Korban juga bercerita mengenai kekerasan yang dilakukan oleh orang Timor-Leste yang ada di dalam militer Indonesia atau kaki-tangannya. Dimensi keluarga dan komunitas dari kekerasan semacam ini sangat mendalam. Orang-orang perempuan berbicara dengan terus terang tentang kekerasan seksual yang mereka alami, melawan pendapat umum yang mengatakan bahwa budaya Timor melarang membicarakan soal-soal seperti ini. Audiensi mengingatkan dimensi pribadi dari pelanggaran yang hebat dan lama oleh tentara Indonesia selama masa mandat Komisi. Proses kerja penuturan kebenaran di depan publik ini dipuji oleh masyarakat luas, karena memberi arah yang baik bagi prakarsa membangun perdamaian di masa depan.

135. Komisi menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam pada para korban, yang sudah dengan berani menyumbang pada proses dialog dan pendidikan komunitas ini. Kami berharap agar orang-orang yang telah berpartisipasi dalam proses ini dapat merasakan, bahwa dengan ini mereka telah terbantu dalam perjalanan penyembuhan mereka.

10.3.3 Lokakarya Pemulihan

Latar belakang

136. Program Lokakarya Pemulihan muncul dari pengalaman komisi bekerja dengan para korban dalam tiga audiensi publik nasional yang pertama. Tim-tim distrik yang bekerja di desa-desa menjadi sadar, bagaimana kekerasan di masa lalu masih mempengaruhi kehidupan para korban. Mereka melihat bahwa beberapa korban memerlukan lebih dari sekadar dukungan yang ditawarkan melalui pengambilan pernyataan, dan kunjungan-kunjungan lanjutan yang singkat. Sebelum setiap audiensi publik nasional, Komisi mengadakan lokakarya dengan para peserta untuk membantu mempersiapkan mereka secara emosional dalam menghadapi pengalaman berbagi kisah mereka di hadapan umum. Lokakarya ini didukung oleh LSM Fokupers.

137. Dengan mempertimbangkan berbagai pengalaman tersebut sebagai langkah awal, Komisi melaksanakan evaluasi atas kerjanya pada bulan Mei 2003. Komisi membahas cara yang ditempuhnya dalam memberi dukungan kepada para korban pelanggaran hak asasi manusia, dan memutuskan untuk mencoba memberikan dukungan yang lebih intensif guna membangun kembali kehidupan para korban. Program Lokakarya Pemulihan kemudian dibuat oleh Tim Dukungan pada Korban.

138. Model lokakarya ini menuntut kerja intensif bersama para korban, dan jelas bahwa lokakarya itu hanya akan menjangkau sejumlah kecil peserta. Oleh karenanya kriteria untuk

partisipasi kemudian dibuat, yaitu sebagian besar dengan memperhatikan tingkat kerawanan korban, dan penilaian staf Komisi distrik bahwa mereka akan diuntungkan oleh proses semacam itu.

139. Karena Komisi tidak memiliki ahli kesehatan jiwa yang terlatih secara profesional, Komisi bekerjasama dengan Fokupers. Sejumlah organisasi dan perorangan lain juga memberikan kontribusi mereka terhadap pelaksanaan lokakarya, termasuk kelompok seni yang berbasis di Dili Arte Moris, Suster-suster Canossian di Balide, yang menyediakan akomodasi, para musisi Timor dan Organisasi Migrasi Internasional, yang membantu dengan transportasi. Staf Dukungan untuk Korban tingkat distrik dan nasional berperan penting dalam memfasilitasi proses tersebut, dan memberikan dukungan kepada para peserta.

Maksud dan tujuan

140. Lokakarya pemulihan mempunyai empat maksud dan tujuan utama, semuanya terkait dengan pengembangan hubungan yang lebih erat antara Komisi dengan para korban berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Maksud dan tujuan utamanya adalah untuk:

- memberi lebih banyak dukungan bagi para korban sesuai dengan kemampuan Komisi
- mengantar para survivor kepada layanan dan organisasi lain untuk memperoleh bantuan
- menolong para korban dalam perencanaan penggunaan dana bantuan Reparasi Mendesak, dan
- mendengarkan pandangan-pandangan para korban mengenai apa yang perlu direkomendasikan oleh Komisi untuk tindakan selanjutnya dalam Laporan Akhir.

141. Termasuk dalam maksud dan tujuan tersebut, Lokakarya pemulihan secara khusus bertujuan untuk:

- Menciptakan tempat yang aman bagi para korban pelanggaran berat hak asasi manusia berat, untuk berkumpul dan bercerita mengenai pengalaman dan kehidupan mereka saat ini.
- Memberi kesempatan para survivor untuk saling berbagi cerita.
- Memberi kesempatan para survivor untuk berpartisipasi dalam kerja kelompok, dan berbagai kegiatan kreatif untuk membantu dalam pemulihan.
- Menciptakan proses yang memberi kesempatan para korban untuk mengeksplorasi beraneka macam bentuk emosi, termasuk kesenangan, tawa dan pujian terhadap kekuatan korban secara perorangan maupun komunitas.
- Membantu para survivor dalam merencanakan penggunaan dana yang diberikan melalui program Reparasi Mendesak.
- Mengidentifikasi berbagai kebutuhan dan mengirim para survivor kepada organisasi lain untuk memperoleh bantuan.
- Membuat dan mencatat berbagai rekomendasi konkret dari para korban, untuk membantu Komisi dalam menyelesaikan laporan akhir, dengan cara yang mencerminkan berbagai pengalaman dan pemikiran-pemikiran mereka.

Lokakarya Pemulihan: bantuan yang lebih mendalam

Maksud dan tujuan Lokakarya Pemulihan sederhana saja, dan berusaha untuk realistis. Kami berusaha menangani berbagai kebutuhan para peserta di berbagai tingkatan. Lokakarya tiga hari tidak akan pernah menjadi awal dan akhir dari suatu proses pemulihan, terutama karena setiap peserta yang hadir berada pada tahapan proses penyembuhan yang berbeda. Dalam proses kelompok, dengan mencakup jenis-jenis kegiatan yang beragam, kami berusaha menciptakan berbagai cara untuk berefleksi dan berinteraksi, yang memberi kesempatan kepada orang-orang yang berbeda-beda untuk menemukan cara yang sesuai bagi mereka.

Adalah penting untuk menciptakan sebuah ruang, di mana para korban merasa diperhatikan dan dihormati, dan di mana mereka pada saat yang sama bisa memberi perhatian dan penghormatan kepada rekan sesama korban. Berhubungan dengan sesama yang menderita merupakan bagian penting dari program yang ditawarkan Komisi. Hal ini membantu para korban merasa tidak terkucil, dan untuk menyadari bahwa mereka tidak sendiri dalam menanggung beban yang berat. Hal itu juga membantu menunjukkan, bahwa beberapa pemulihan bukanlah sekedar menyangkut keahlian khusus para dokter, tapi tentang bagaimana menyentuh ke dalam lubuk-hati diri sendiri, dan tentang bagaimana saling mendukung.

Juga penting untuk menangani berbagai kendala yang bersifat material bagi kesejahteraan hidup para korban, dan karenanya Komisi berupaya untuk menghubungkan korban dengan institusi-institusi yang menawarkan layanan pengobatan yang layak dan layanan-layanan yang lain. Bagi sejumlah orang yang menghadiri lokakarya tersebut, lokakarya ini tidak bermakna apa-apa selain sebuah kunjungan ke dokter. Bagi yang lain, menghadiri lokakarya ini, bisa berarti intervensi medis yang rumit dan drastis seperti dipasang anggota badan palsu di Indonesia.

Bantuan terhadap masalah-masalah kesehatan fisik dan pengaturan bagi lingkungan yang aman, yang mendorong rasa saling percaya dan rasa berbagi, membentuk landasan untuk mencapai tujuan utama Lokakarya Pemulihan, antara lain untuk menolong para survivor mengetahui bahwa pemulihan dari dalam adalah suatu proses yang membutuhkan perhatian dan tenaga, untuk mengidentifikasi dalam tahapan mana mereka sedang berada dalam proses pemulihan, dan untuk mengambil beberapa langkah maju dalam proses tersebut. Kieran Dwyer, Penasehat CAVR

Peserta

142. Enam lokakarya diadakan di kantor nasional Komisi di Dili. Lima diperuntukkan bagi kelompok-kelompok campuran laki-laki dan perempuan dan satu khusus untuk peserta perempuan. Para peserta datang dari semua distrik di Timor-Leste, dan berbagai upaya dilakukan untuk melibatkan para korban dari sejumlah daerah yang paling terpencil di negara Timor-Leste.

143. Seluruh peserta sebelumnya telah memberikan pernyataan mereka kepada tim distrik pencarian kebenaran Komisi ini. Selain itu tim distrik untuk dukungan bagi korban telah mengidentifikasi para peserta, dan telah memenuhi kriteria untuk Skema Reparasi Mendesak. Walau hanya sedikit jumlah penerima Skema Reparasi Mendesak yang berpartisipasi dalam lokakarya pemulihan, namun lokakarya ini merupakan bagian dari Skema tersebut.

144. Keseluruhannya, ada 156 orang berpartisipasi dalam enam lokakarya, 82 perempuan (52%) dan 74 laki-laki (47%).

Program lokakarya

145. Langkah pertama dalam lokakarya bagi kebanyakan peserta adalah perjalanan ke Dili. Banyak peserta yang berasal dari komunitas-komunitas daerah terpencil, belum pernah berkunjung ke ibukota negara, sehingga perjalanan ke Dili dan jauh dari keluarga serta komunitasnya merupakan suatu langkah besar. Bantuan dalam tahap ini dan dalam setiap langkah proses tersebut merupakan bagian penting dari lokakarya. Tim-tim distrik Komisi bertanggung jawab atas pengaturan perjalanan dan membantu para peserta selama proses tersebut.

146. Para peserta lokakarya pertama yang berasal dari luar Dili tinggal di sekolah pelatihan guru, berlokasi di bekas kompleks UNAMET. Para peserta lokakarya berikutnya tinggal di Kesusteran Canossian di Balide, dekat dengan kantor Komisi. Pelayanan sehari-hari yang diberikan oleh para Suster di Kesusterannya merupakan sumbangan yang sangat berharga. Para peserta biasanya tiba di Dili sehari sebelum lokakarya berlangsung. Pengaturan praktis ini penting dalam mengembangkan perasaan di antara para peserta, bahwa mereka diperhatikan dan dihargai.

147. Membawa peserta ke Dili merupakan suatu keputusan yang disengaja. Ini memungkinkan para peserta untuk sementara waktu keluar dari kehidupan sehari-harinya, dan mengkhhususkan waktu sehari-hari hanya untuk diri mereka sendiri. Bagi kebanyakan mereka, khususnya para peserta perempuan, bebas dari rutinitas kerja rumah tangga sehari-hari yang melelahkan merupakan kesempatan yang langka. Selain itu dengan membawa mereka jauh dari desa masing-masing, diharapkan akan memungkinkan untuk bisa berbicara lebih bebas mengenai berbagai pengalaman dan perasaan mereka. Lokakarya ini juga memungkinkan orang-orang dari seluruh daerah untuk saling bertemu, dan melalui lokakarya ini mungkin mengurangi keterkucilan yang dirasakan oleh kebanyakan korban, dengan menawarkan rasa dukungan terhadap rekan sesama korban.

148. Lokakarya berlangsung selama tiga hari. Program ini dilaksanakan dengan memadu kegiatan formal dan informal. Setiap kelompok peserta berbeda, dan dalam setiap kelompok masing-masing anggotanya berbeda-beda pula dalam menanggapi pengalaman, sehingga penting bagi lokakarya untuk fleksibel dengan cara yang demikian Perpaduan antara kegiatan yang terstruktur dengan yang informal memungkinkan para peserta untuk saling berbaur dengan caranya masing-masing, untuk berbicara bebas satu sama lain dan saling memberi dukungan.

149. Sebagian besar kegiatan lokakarya bertempat di kantor nasional Komisi, bekas penjara politik di Balide. Lokakarya ini membawa para korban ke pusat kerja sehari-hari Komisi, menciptakan rasa keterlibatan dalam dan rasa memiliki pada Komisi. Setiap kali lokakarya berlangsung, bekas penjara yang menjadi kantor nasional berubah dengan kehadiran para

korban. Mereka menceritakan pengalaman pribadi masing-masing yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, dan masing-masing terinspirasi dengan ketabahan serta saling mendukung satu sama lain.

Hari pertama

150. Lokakarya diawali dengan sambutan seorang Komisaris Nasional, biasanya Komisaris Isabel Guterres, yang mempunyai tanggung jawab khusus untuk kerja dukungan pada korban. Sesi pertama berfokus pada pengenalan, dan dengan perlahan-lahan menciptakan rasa nyaman di antara anggota kelompok, kemudian disusul dengan menjelaskan secara ringkas program tiga hari lokakarya kepada para peserta.

151. Staf Komisi kemudian menjelaskan apa yang dimaksud sebagai perjalanan pemulihan. Penjelasan ini membantu para peserta memahami, bahwa pemulihan merupakan suatu proses yang dapat mereka mulai dan jalani sendiri. Ini memberikan kerangka kerja untuk kegiatan dan sebuah acuan untuk pembahasan selama tiga hari lokakarya tersebut.

152. Kegiatan utama pada hari pertama adalah menceritakan kisah masing-masing. Ini disebut sebagai 'konseling kelompok'. Sesi ini difasilitasi oleh para penasihat perempuan dari Fokupers, dengan bantuan dari staf Komisi. Fokupers memiliki lebih banyak pengalaman bekerja dengan para korban kekerasan, dan sumbangan mereka sangat penting bagi efektifnya lokakarya. Para penasihat itu kemudian bekerja dalam kelompok-kelompok kecil, menggunakan teknik-teknik kreatif untuk membantu para korban menemukan cara berbicara mengenai pengalaman mereka. Tetapi tidak ada kewajiban berbicara, dan jika ada peserta yang memilih berbicara, ia dapat bercerita sebanyak atau sesedikit yang ia mau. Mendengarkan, sebagai bagian yang penting dari sesi ini, berarti menciptakan rasa hormat dan peduli pada sesama korban.

153. Sesi ini secara emosi melelahkan bagi peserta maupun pekerja. Dampak atas setiap peserta selalu dipantau, dan dukungan ekstra segera diberikan apabila perlu.

Perjalanan pemulihan

Pada hari sebelum lokakarya pemulihan yang pertama, Komisi beruntung dengan adanya kunjungan dari pastor Anglikan Selandia Baru, Pastor Michael Lapsley. Pastor Lapsley seorang aktivis hak asasi manusia di Afrika Selatan. Pada masa menjelang berakhirnya rejim apartheid ia selamat dari bom surat yang dialamatkan kepadanya, tapi kehilangan dua tangan dan satu matanya menjadi buta, dan harus menjalani operasi yang ekstensif dan rehabilitasi. Ia datang pertama kali ke Timor-Leste pada tahun 1999, untuk memantau pemilu UNAMET, setelah bertemu dengan Xanana Gusmão di penjara Cipinang (Jakarta, Indonesia). Ia belajar mengenai penderitaan panjang rakyat Timor.

Di Afrika Selatan, pada masa Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (TRC), Pastor Lapsley menyadari bahwa para korban yang selamat dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia memerlukan lebih dari sekadar dukungan jangka pendek, seperti yang bisa ditawarkan oleh TRC. Ia mendirikan Institut Pemulihan Memori untuk meneruskan kerja pemulihannya di Afrika Selatan. Pastor Lapsley membagi kisah pengalamannya dengan Komisararis Nasional dan staf Komisi, kemudian kisah dan kinerjanya menjadi inspirasi bagi pekerjaan Komisi..

Gagasan Pastor Lapsley tentang perjalanan pemulihan dipraktikkan oleh Komisi, dan membantu dalam mendukung jalannya lokakarya Komisi.. Pastor Lapsley bercerita tentang empat tahap tentang pengalaman korban:

- Pertama, masa dalam kehidupan seseorang sebelum pelanggaran terjadi, yang melibatkan keluarga dan sanak-saudara lainnya yang mendukung orang yang bersangkutan.
- Kemudian, masa ketika pelanggaran terjadi, yang biasanya berlangsung dalam waktu yang lama. Pada tahap ini banyak terlibat perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan hancurnya dasar kehidupan seseorang. Banyak orang yang tidak bisa bertahan dalam masa ini, dan mereka inilah yang disebut sebagai korban.
- Ketiga, mereka yang bisa bertahan hidup, yaitu yang disebut survivor. Tapi seringkali kehidupan mereka terhenti, selalu teringat tentang kepedihan dan penderitaan dari pelanggaran. Banyak survivor yang selama hidup masih tetap dan terus-menerus merasakan kepedihan itu.
- Akhirnya, merupakan kerja seumur hidup bagi para survivor untuk beralih dari seorang korban menjadi seorang pemenang atas kepedihan dan kekerasan.

Empat langkah ini digunakan secara praktis untuk membuat kerangka kerja kegiatan dan diskusi di dalam lokakarya pemulihan.

Banyak karya seni dari para korban yang mencerminkan tema dasar perjalanan pemulihan. Marcelina Poto membuat dua buah gambar dalam lokakarya yang diikutinya. Mengenai gambar tersebut ia berkata, "Saya menggambar rumah ini karena di depan rumah ini mereka membunuh suami." Tentang gambar yang kedua ia menjelaskan, "Bunga ini melambangkan keinginan saya untuk keluar dari penderitaan ini."

Regina Freitas, menjelaskan tentang tiga buah gambar yang ia buat:

Rumah ini melambangkan masa, sewaktu keluarga saya masih lengkap. Pohonnya melambangkan hidup saya. Pohon yang tidak berdaun melambangkan saat ketika mereka membunuh suami saya, dan senjata melambangkan persenjataan yang digunakan tentara Indonesia untuk membunuhnya.

Marta Ximenes memperlihatkan dua gambar yang ia buat:

Rumah dengan tamannya melambangkan saat, ketika mereka membunuh suami saya di rumah ini dan menembak kaki saya. Bunga-bunga ini melambangkan kebahagiaan yang saya rasakan, karena saya telah membagi penderitaan saya dengan yang berwenang.

Kesempatan membangun kesepahaman

Berbagi cerita tentang pelanggaran di masa lalu merupakan suatu pengalaman yang sulit bagi para peserta. Mendengarkan dengan penuh perhatian dan dukungan dari rekan-rekan sesama peserta, merupakan bagian penting dari proses tersebut. Terkadang dalam kesempatan ini terangkat pertanyaan-pertanyaan sensitif bagi para peserta, dan lokakarya menjadi satu forum untuk membahas masalah-masalah yang sulit.

Pada lokakarya bulan Maret 2004, satu kelompok kecil tengah membagi kisah mereka. Seorang perempuan muda dari Suai (Covalima) menceritakan kisah pedih pemerkosaan terhadapnya oleh militer Indonesia pada tahun 1999. Kelompok tersebut mendengarkan dengan penuh perhatian, ketika perempuan muda itu menceritakan kisahnya sambil menangis. Seorang pemuda menyela, dengan sopan, mengatakan bahwa menurutnya dalam budaya Timor tidak pantas perempuan bercerita tentang pengalaman semacam itu. Ia sendiri adalah survivor dari penyiksaan hebat berkali-kali sepanjang tahun 1990-an.

Fasilitator kemudian bertanya pada perempuan muda dan kelompok kecil itu, bagaimana menurut pendapat mereka.. Seorang perempuan paroh baya yang duduk di antara pemuda dan perempuan muda tersebut, dengan satu tangan di pundak si perempuan muda mengatakan, bahwa banyak orang perempuan telah diperlakukan buruk di masa lalu. Maka jika sekarang mereka ingin berbicara mengenai hal itu, tidak ada kata-kata dalam budaya Timor yang mengatakan bahwa mereka tidak boleh melakukannya. Ia bahkan mengatakan, sekaranglah saat yang tepat bagi kaum perempuan untuk berbicara. Ia mengatakan hal itu dengan lemah-lembut, sambil menenangkan juga si pemuda dengan menepuk-nepuk pundaknya. Ia sendiri pun salah seorang korban perkosaan. Kelompok kecil dan pemuda itu mengangguk setuju, dan perempuan muda tersebut melanjutkan ceritanya.

Hari kedua

154. Kegiatan pada hari kedua dan ketiga sengaja dirancang untuk memberikan imbalan pada kisah-kisah yang diceritakan pada hari pertama, yaitu dengan membiarkan para peserta menyatakan kisah dan perasaan mereka dengan cara lain, dan juga untuk mengalami emosi-emosi lain seperti kegembiraan dan puji-pujian.

155. Kegiatan hari kedua meliputi cara-cara kreatif untuk mengekspresikan perasaan, yang berlangsung dalam suasana santai dan menyenangkan. Menyanyi, permainan drama dan menggambar serta melukis merupakan kegiatan utama. Fokusnya sedikit bergeser dari pengalaman masa lampau ke kehidupan yang dijalani para survivor saat ini, dan apa harapan mereka untuk masa depan. Kelompok seni pemuda Arte Moris ikut hadir pada beberapa kali lokakarya, demikian pula Gil dan Jimmy Madeira. Musik, pada khususnya, merupakan sebagian kekayaan dari budaya Timor. Maka selagi para peserta datang dari seluruh distrik di Timor, dan berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda, tapi mereka tampaknya tahu lagu-lagu yang sama dalam bahasa Tetum. Dengan menghubungkan lagu-lagu pada berbagai pengalaman dan emosi, para survivor berdiskusi mengenai apa yang mereka rasakan dalam kehidupan saat sekarang sehubungan dengan apa yang mereka alami di masa lalu, mengenai hal-hal yang baik dan yang sulit dalam kehidupannya, serta mengenai dukungan keluarga dan komunitas, apa yang mereka dapati atau yang tidak mereka dapati.

156. Bernyanyi dan bermain drama juga memungkinkan peserta mengungkapkan perasaan yang lembut melalui sarana gerak-gerik. Cara ini terutama penting karena banyak survivor yang menderita cacat fisik selamanya, atau yang merasa kaku tubuh mereka setelah mengalami

penderitaan fisik dan emosi yang luar biasa. Ragam-ragam kegiatan ini bertujuan membantu para peserta untuk mengidentifikasi, dan mensyukuri, kemampuan mereka bertahan terhadap penderitaan dan keberanian mereka untuk membangun kembali kehidupan. Pengakuan atas kekuatan dan keindahan para peserta, dan belajar dari semuanya itu sebagai kelompok, merupakan perhatian utama dalam hari kedua lokakarya.

157. Setelah kegiatan hari kedua selesai, para peserta dibawa berkeliling kota Dili. Perjalanan yang menyenangkan ini seringkali merupakan pengalaman pertama bagi kebanyakan peserta. Melihat objek-objek nasional semacam patung Kristus di pinggir kota Dili, kuburan Santa Cruz, parlemen nasional, universitas nasional dan pantai Dili. Kesempatan ini juga digunakan untuk mengantar korban kepada pelayanan lain, seperti dokter dan lain-lainnya yang ada di rumah sakit nasional.

Hari ketiga

158. Hari ketiga dimulai dengan para anggota kelompok saling memperlihatkan karya seni masing-masing di kelompok mereka, dan berdiskusi tentang arti gambar-gambar itu bagi mereka. Ada diskusi mengenai arti lukisan-lukisan itu bagi perjalanan pemulihan selanjutnya; lalu diikuti dengan fokus puji-memuji prestasi besar atau kecil tiap-tiap peserta. Para peserta kemudian diberitahu mengenai aspek finansial Skema Reparasi Mendesak. Diputuskan untuk tidak memberitahu para peserta sejak awal acara, agar lokakarya tidak sama sekali terfokus pada masalah-masalah finansial. Para anggota tim Komisi memfasilitasi diskusi kelompok kecil dengan para peserta, untuk bertukar pikiran tentang bagaimana penggunaan dana bantuan guna memperbaiki kehidupan dengan cara yang bisa dibenarkan. Setelah itu, para peserta mengikuti diskusi kelompok, untuk mengidentifikasi rekomendasi-rekomendasi yang mereka harapkan akan dikemukakan Komisi dalam Laporan Akhir.

159. Lokakarya diakhiri dengan upacara renungan, terkadang misa, dengan pemberian sertifikat bagi para peserta atas partisipasi dan sumbangan mereka.

Tarian orang-orang yang terluka

Seorang anggota tim Komisi teringat pada saat yang mengharukan dalam hari kedua lokakarya pemulihan pertama dalam bulan Juni 2003:

Ini untuk pertama kalinya kami mencoba kegiatan bernyanyi, dengan diiringi permainan gitar Gil Madeira. Sekitar 15 orang dari kami duduk membentuk lingkaran, dan sambil bercerita tentang masa-masa yang berbeda dalam hidup kami,, masa-masa bahagia dan menderita, Gil bertanya pada para anggota kelompok, barangkali ada lagu yang mereka tahu, yang berkaitan dengan pengalaman pada masa itu. Perlahan, kami menyanyi bersama ketika ada anggota yang memberi usul atau mulai menyanyi.

Seorang perempuan paroh baya dari Aileu minta, ketika istirahat minum kopi, jika ada waktu untuk menari bersama, menarikan tebe-tebe yang berbeda-beda dari daerah ke daerah di Timor-Leste. Waktu kami menyanyi, ia berdiri dan perlahan mulai menarikan tebe-nya. Para peserta sedikit malu-malu, dan tidak ada seorang pun yang berdiri untuk bergabung dengannya. Karena itu saya bergabung dengannya, tapi sambil memintanya untuk mengajari saya. Kami bergandengan tangan, dan perlahan bergerak melingkar. Satu per satu peserta bergabung. Gerakan tarian tebe yang kami tarikan waktu itu pelan sekali. Sejumlah peserta dengan tubuh cacat sangat parah, akibat pelanggaran hak asasi manusia yang mereka alami, meskipun sudah lama terjadi. Kami tidak berbicara, hanya saling pandang-memandang, dan saling menyemangati dengan mata kami pada para peserta yang belum bergabung dalam tarian. Akhirnya kami membentuk lingkaran penuh, berayun perlahan dan bergerak sesuai irama tebe Aileu saudara perempuan tua kami.

Setelah selesai menari kami semua duduk dalam kesunyian yang membahagiakan. Kami tahu kami telah berbagi sesuatu yang sangat berarti.

160. Selain kegiatan yang telah direncanakan, pengalaman para peserta dalam waktu yang tidak direncanakan pun penting untuk memperkaya pengalaman mereka selama lokakarya. Bagi banyak peserta, istirahat minum kopi atau makan merupakan saat untuk merenungi manfaat yang bisa diambil dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. Para anggota tim Komisi siap untuk mendengarkan, memberikan kenyamanan atau bantuan selama lokakarya berjalan.. Ada kalanya para peserta bisa duduk bersama-sama dan menjalin persahabatan. Pada malam hari, para peserta kembali ke tempat mereka menginap di Kesusteran Canossian. Staf Komisi menemani mereka dan terus memberikan perhatian dan dukungan.

161. Bagi sejumlah peserta kegiatan-kegiatan harian itu membangkitkan masalah emosional dan psikologis yang berkaitan dengan pengalaman masa lalu; sehingga mereka selalu diawasi dan dibantu jika perlu. Staf dukungan bagi korban di tingkat nasional berperanan penting dalam pekerjaan ini. Staf dukungan bagi korban di tingkat distrik juga memainkan peran dukungan yang berharga selama lokakarya, karena mereka berasal dari komunitas para peserta dan telah melakukan perjalanan bersama peserta ke Dili. Mereka biasanya berbicara dengan bahasa yang sama dan telah menjalin hubungan, yang dapat terus berlanjut, sesudah mereka kembali ke distrik masing-masing.

Dukungan sesama korban

Menciptakan lingkungan di mana para survivor dapat saling bertemu, saling berbagi kisah dan saling mendukung, sangat penting untuk keberhasilan lokakarya pemulihan. Setiap kelompok membangun dinamika dan interaksinya sendiri, namun saling peduli dan saling dukung selalu merupakan inti lokakarya.

Peran khusus yang dimainkan sementara survivor dalam menciptakan suasana seperti itu, memberi kesan bahwa dukungan antar-sesama korban dapat digunakan dalam pekerjaan di bidang ini pada masa depan. Olga yang berasal dari desa Mauchiga (Hatu Builico, Ainaro) di wilayah pegunungan tengah, memberikan kesaksian pada Audiensi Publik Nasional Komisi mengenai Perempuan dan Konflik pada bulan April 2003. Kisahnya tentang kekerasan seksual dan perbudakan seksual yang terus menerus terjadi pada tahun 1982 merupakan kisah yang pertama kali didengar bangsa Timor tentang penderitaan perempuan di Mauchiga, setelah penduduk desa bergabung dalam pemberontakan melawan militer Indonesia. Pada bulan Januari 2004 Olga dan anak perempuannya yang masih remaja, menemani seorang perempuan paroh baya dari Mauchiga mengikuti lokakarya pemulihan khusus untuk perempuan. Selama berlangsung lokakarya Olga memberi dukungan kepada perempuan paroh baya tersebut dan juga kepada para peserta lainnya, serta membagi pengalamannya pada mereka. Anak perempuannya turut dalam kegiatan menyanyi dan melukis dan sangat disayang oleh para peserta.

Peranan Olga sebagai seorang pendukung selain membantu temannya dari Mauchiga, juga merupakan langkah lebih lanjut dalam memulihkan dirinya sendiri. Ia juga menunjukkan kepada para peserta yang lain, bahwa perlahan-lahan survivor dapat berjalan di sepanjang perjalanan ini. Olga juga menunjukkan, bagaimana jaringan survivor dapat saling bantu-membantu satu sama lain.

Refleksi tentang lokakarya pemulihan

162. Berbagai komentar yang dibuat selama berlangsungnya lokakarya dan juga sebuah evaluasi internal Komisi tentang kerja-kerja dukungan korban yang dilaksanakan dengan para peserta tertentu, menunjukkan bahwa Lokakarya Pemulihan mempunyai dampak yang sangat penting dan positif terhadap para peserta. Meskipun menceritakan kembali kisah-kisah mereka seringkali menyakitkan dan emosional, namun para peserta mengungkapkan rasa terima kasih untuk kesempatan berbagi pengalaman-pengalaman mereka. Misalnya, Marcelina Poto dari Oecusse menceritakan bahwa ia menyaksikan pembunuhan terhadap suaminya dan pembakaran rumahnya yang dilakukan oleh milisi. Ia berkata:

Pada saat saya berbicara di sini saya merasakan kepedihan yang mendalam, namun saya juga merasakan sedikit kebahagiaan, karena saya mempunyai kesempatan untuk berbicara dengan teman-teman yang penderitaannya sama dengan penderitaan yang saya alami.

163. Seorang perempuan dari Viqueque juga merasa bahwa pengalamannya sulit tapi berharga. Ia teringat telah diperkosa setiap hari dalam jangka waktu yang panjang oleh seluruhnya sekitar 40 laki-laki. Ia berkata, bahwa karena perkosaan-perkosaan ini ia hamil dan melahirkan empat anak. Ia berkata:

¹ Bagian ini dan bagian tentang Skema Reparasi Mendesak CAVR di bawah termasuk kutipan-kutipan dari orang Timor-Leste yang berpartisipasi di dalam evaluasi dukungan korban yang dilaksanakan oleh Divisi *Acolhimento* dan dukungan korban. CAVR. Arsip CAVR Maret 2004.

Ketika saya teringat dan menceritakan kisah ini, saya merasa malu dan sakit hati, tapi saya harus bicara, sehingga dapat mengurangi penderitaan saya.

164. Ketika ditanya lebih langsung bagaimana pendapat mereka mengenai Lokakarya Pemulihan, para peserta mengatakan mereka puas dengan program tersebut, dan berterima kasih kepada Komisi yang telah memberi kesempatan kepada mereka untuk berpartisipasi.

Pokok-pokok program menurut pandangan peserta

Bagi kebanyakan peserta, bagian yang paling penting dari program itu adalah konseling kelompok – kesempatan untuk berbagi kisah mereka dengan yang lain. Ketika mereka ditanya apa yang mereka harapkan untuk diperoleh selama tiga hari tersebut, sebagian besar peserta menjawab seperti yang dikatakan oleh Rosa Kolobere dari Suai:

Saya datang untuk membagi pengalaman saya dengan teman-teman. Ketika kita saling berbagi kita dapat meringankan penderitaan kita, dan hidup sehari-hari menjadi lebih mudah.

Atau seperti yang dikatakan oleh Angelina da Costa dari Ainaro dengan singkat, “Saya ingin menceritakan kisah saya.”

Mengingat kembali program tersebut, Verónica Moniz dari Bobonaro mengatakan bahwa ia menyukai lokakarya tersebut karena keragaman kegiatannya.

Lokakarya Pemulihan membuat saya senang dan membuat saya berhenti cemas, karena lokakarya-lokakarya itu membuat kami melakukan banyak kegiatan, seperti menggambar bunga, menyanyi, dan yang lainnya.

“Saya menyukai semuanya,” ujar Bernadino Loeleto dari Maliana, “tapi bagian yang paling saya sukai adalah drama singkat yang lucu, tentang mengundang orang datang ke pernikahan. Saya memainkan peran sebagai bapak baptis.”

Luis Afonso dari Lolotoe (Bobonaro) berkomentar, bahwa ia banyak belajar dari program ini secara umum. Baginya dan yang lain bagian terpenting dari pengalaman ini adalah kunjungan ke Dili.

Kutipan-kutipan dari Evaluasi Program Acolhimento dan dukungan Korban CAVR. Januari ke Maret 2004.

165. Lokakarya pemulihan untuk masyarakat selama tiga hari ini merupakan interaksi yang paling intensif, yang pernah dilakukan oleh Komisi dengan para korban. Dari interaksi ini, dan juga dari interaksi-interaksi lain dengan korban, Komisi memperoleh sejumlah pelajaran praktis yang penting, yang bisa digunakan dalam pekerjaan dalam bidang ini di masa depan.

166. Harapan Komisi terhadap Lokakarya Pemulihan ini sederhana saja. Dari kerjanya dengan para survivor, Komisi menyadari bahwa kebutuhan mereka sebenarnya jauh lebih besar dari yang bisa ditangani dalam tiga hari. Komisi bermaksud memberi sedikit sumbangan positif demi pemulihan setiap korban, dengan menolong mereka agar menyadari potensi mereka untuk berkembang melampaui kepedihan penderitaan mereka. Kadangkala dalam pekerjaan ini, Komisi merasa tak kuasa menahan haru atas berbagai pengalaman sangat buruk yang telah dialami oleh mereka yang bergabung dengan kami; karena dukungan yang bisa ditawarkan Komisi jelas tidak akan mencukupi kebutuhan mereka.

167. Para korban pelanggaran hak asasi manusia membutuhkan berbagai macam bantuan yang terus menerus. Bantuan itu meliputi bantuan ekonomi, layanan pendidikan dan kesehatan,

pengakuan secara simbolik, dan tuntutan keadilan. Juga terdapat kebutuhan yang lebih bersifat pribadi, seperti kebutuhan pengakuan pribadi, harga diri, pemberian perhatian dan kasih sayang. Bagi kebanyakan korban masalah yang paling mendesak adalah masalah kesehatan, baik kesehatan fisik maupun, mental. Begitu sangat mendasar kebutuhan-kebutuhan itu, sehingga berpengaruh terhadap semua aspek lain dalam kehidupan para korban.. Walaupun kecil sumbangan Komisi dapat dilihat sebagai fondasi, yang di atasnya lembaga-lembaga dan program-program masa depan dapat membangun. Program Reparasi yang dianjurkan Komisi berusaha menjawab banyak kebutuhan para survivor dari konflik yang berlangsung selama 25 tahun.

10.3.4 Reparasi Mendesak

Latar belakang

168. Ketika tim-tim distrik mulai bekerja di desa-desa di seluruh wilayah Timor-Leste, menjadi jelas bagi mereka bahwa banyak korban pelanggaran hak asasi manusia menghadapi berbagai kebutuhan mendesak yang berkaitan secara langsung dengan berbagai pelanggaran yang pernah mereka alami. Para korban melihat Komisi mungkin sebagai satu-satunya lembaga nasional yang ada untuk membantu mereka. Tampaknya tidak cukup dengan mengatakan kepada para korban agar menunggu sampai datangnya Laporan Akhir dan rekomendasi-rekomendasi Komisi untuk mendapatkan bantuan. Oleh karena itu Komisi mengambil langkah sementara untuk menangani beberapa kebutuhan mendesak para korban, yaitu Skema Reparasi Mendesak.

Alasan adanya skema reparasi

169. Dasar dari Skema tersebut adalah prinsip hukum internasional hak asasi manusia, bahwa para korban tindakan pelanggaran memiliki hak atas reparasi. Perjanjian dan hukum kebiasaan internasional serta berbagai instrumen hukum internasional lain, menganjurkan bahwa unsur-unsur pokok reparasi meliputi:

- Restitusi (ganti rugi);
- Kompensasi;
- Rehabilitasi;
- Kepuasan; dan
- Jaminan tidak-terulang.

170. Sebagai sebuah lembaga negara yang independen, dengan mandat yang didasarkan atas prinsip-prinsip hukum hak asasi manusia internasional, Komisi berusaha untuk menghormati hak para korban atas reparasi dengan membuat Skema Reparasi Darurat. Komisi menekankan bahwa Skema tersebut dibuat hanya sebagai langkah sementara, untuk dilaksanakan selama Komisi ini ada. Dengan cara apa pun Komisi tidak akan merugikan hak para korban atas reparasi penuh, sebagai bagian dari penyelesaian jangka panjang. Kecilnya komponen dana bantuan dari Skema tersebut jelas tidak memenuhi persyaratan suatu skema reparasi penuh, berdasarkan prinsip-prinsip yang tercantum di atas.

171. Sebagai negara baru yang sedang berusaha menetapkan prinsip-prinsip demokratis, yang bertumpu pada kesetaraan seluruh warga negara, Timor-Leste memiliki tanggung jawab moral untuk menjamin agar warga negaranya yang menderita kerugian akibat pelanggaran masa lalu, mampu melakukan kewajibannya sebagai warga negara Timor-Leste yang berpartisipasi penuh. Negara harus mengambil tindakan yang diperlukan sejauh kemampuannya. Prasyarat sosial atas reparasi terletak pada penciptaan perdamaian dan tujuan pembangunan Timor-Leste. Satu langkah dasar dalam memulihkan perpecahan yang ada akibat konflik bertahun-tahun, adalah dengan membantu para korban kekerasan membangun kembali kehidupan mereka. Tanpa perbaikan semacam itu, kekurangan dan pengucilan dapat menciptakan kelompok arus bawah yang tidak puas, yang pada gilirannya akan berakibat pada kekacauan sosial. Demikian pula prioritas pembangunan nasional dan pengentasan kemiskinan di Timor-Leste mensyaratkan, bahwa seluruh warganegara dapat memainkan peran aktif dan konstruktif dalam membangun negara baru. Para korban pelanggaran masa lalu beresiko untuk dilupakan dalam proses pembangunan ini.

Pendanaan

172. Komisi sendiri tidak mempunyai dana untuk membuat suatu skema reparasi. Komisi dibantu melalui kerjasama dengan Proyek Pemberdayaan Komunitas dan Pemerintahan Lokal (CEP), sebuah proyek yang dijalankan di bawah Kementerian Dalam Negeri dan didanai oleh Dana Amanah untuk Timor-Leste (Trust Fund for East Timor-TFET), yang dana itu dikelola oleh Bank Dunia. CEP mempunyai sebuah program untuk membantu “kelompok-kelompok rawan” dan dukungannya untuk Skema Reparasi Mendesak diatur melalui program ini.

Maksud dan tujuan Program

173. Maksud dan tujuan utama Skema Reparasi Mendesak adalah untuk memberi reparasi kepada para survivor pelanggaran hak asasi manusia, yang kebutuhannya mendesak, dan tidak mudah dapat dipenuhi dengan cara lain. Melalui pelayanan kesehatan atau dukungan, atau sedikit sumbangan finansial, Skema ini berusaha memenuhi sejumlah kebutuhan mendesak dari orang-orang yang membutuhkan. Langkah reparasi tidak dianggap sebagai restitusi (ganti rugi) penuh. Juga tidak dianggap untuk menggantikan kewajiban negara dalam jangka waktu yang lebih panjang, untuk memberi reparasi bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia.

174. Komisi tidak pernah membayangkan, bahwa program ini akan menyelesaikan masalah tersebut. Namun program tersebut setidaknya akan meringankan masalah dalam jangka pendek, dan membantu para korban agar terus maju dalam proses pemulihan dan restorasi yang lebih panjang. Selain itu Skema tersebut mengembangkan suatu pendekatan berbasis komunitas, bekerjasama dengan LSM hak asasi manusia dan berbagai organisasi komunitas nasional terkemuka, dalam mendanai sejumlah model pendekatan yang berorientasi pembangunan komunitas demi pemulihan dan restorasi.

Siapa yang berhak menerima bantuan

175. Tim-tim distrik mengidentifikasi mereka yang berhak menerima bantuan dari program tersebut, di antara orang-orang yang dapat ditemui melalui kegiatan pencarian kebenaran dan rekonsiliasi. Penerima hak yang utama adalah para survivor pelanggaran langsung seperti: perkosaan, penahanan, dan penyiksaan; demikian juga mereka yang menderita secara tidak langsung akibat penculikan, penghilangan, atau pembunuhan anggota keluarganya. Para calon penerima hak harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Kebutuhannya harus parah, mendesak, dan berkaitan langsung dengan pelanggaran hak asasi manusia, yang terjadi pada masa mandat tahun 1974-1999. Misalnya, seseorang yang masih menderita luka yang didapat selama penyiksaan, atau seorang janda dengan pendapatan yang tidak memadai karena suaminya dibunuh.
- Orang-orang yang jelas-jelas rawan; misalnya, perempuan janda, yatim piatu, orang cacat, atau seseorang yang dikucilkan dalam komunitasnya. Kerawanan yang dimaksud di sini adalah mereka yang keadaan hidupnya buruk karena konsekuensi-konsekuensi yang bersifat fisik, psikologis, emosional, atau ekonomis yang terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia yang mereka alami.
- Sumber-sumber lain untuk memenuhi kebutuhan tidak ada atau tidak mudah untuk didapat.
- Bantuan ini akan membantu penerima secara berkelanjutan. Misalnya, bantuan tersebut akan memfasilitasi pemulihan harga diri, mencegah pelanggaran lebih jauh, atau akan memberi sumbangan bagi pemberdayaan atau pemulihan yang akan meningkatkan kualitas hidup dalam jangka panjang bagi orang yang bersangkutan.

Bentuk-bentuk reparasi

176. Jenis-jenis reparasi yang dapat diberikan oleh Komisi meliputi:

- Dana bantuan darurat sebesar US\$ 200.
- Perawatan medis dan/atau psiko-sosial yang mendesak
- Peralatan dan/atau pelatihan bagi orang cacat
- Membentuk kelompok-kelompok swadaya korban, yang mempunyai berbagai kegiatan untuk memulihkan martabat manusia, seperti kegiatan teater, kegiatan-kegiatan produktif, dll.
- Peringatan suatu peristiwa, dengan tujuan memberi pengakuan dan restorasi martabat para korban.
- Penyediaan batu nisan atau monumen untuk meningkatkan pengakuan komunitas atas para korban hilang, dengan demikian membantu memberi rasa penyelesaian emosional bagi keluarga korban.
- Perjanjian dengan berbagai organisasi lokal seperti gereja atau kelompok dukungan, untuk menyediakan jasa yang berkelanjutan bagi para survivor.

Penerapan skema

177. Pada bulan Mei 2003, Komisi membentuk sebuah Komite Reparasi Korban untuk mengawasi program tersebut. Komite itu terdiri dari dua Komisaris Nasional, Koordinator Divisi Dukungan Korban, Manajer Program CAVR, perwakilan anggota LSM hak asasi manusia Timor, Fokupers dan Yayasan Hak, dan seorang biarawati dari Susteran Carmelita.

178. Staf distrik mengidentifikasi calon-calon individu atau komunitas penerima, yang memiliki kebutuhan yang mendesak, dan mengajukan masalah mereka kepada Komite Reparasi. Setelah komite menyetujuinya, Komisi memberikan dana bantuan.

179. Komisi juga menugasi organisasi lain untuk menyediakan dukungan bagi para korban. Di sepuluh distrik, Komisi menugasi LSM atau kelompok-kelompok keagamaan yang terlibat dalam penyediaan layanan kesehatan, untuk memberikan dukungan mereka kepada korban-korban yang sudah diidentifikasi selama masa enam bulan. Kesepuluh organisasi tersebut adalah SATILOS (*Fundacao Saude Timor Lorosae*) di Dili, Susteran Canossian di Ainaro, Manatuto dan Lautém, Komisi Perdamaian dan Keadilan Katolik di Maliana, *Centro Feto Enclave Oecusse*

(Lembaga Perempuan Oecusse), Kongregasi Susteran Bayi Yesus di Manufahi dan Baucau, Susteran Fransiskan di Viqueque, dan Susteran PRR (Putri Renha Rosario) di Liquiça.

180. Setelah Komisi menutup kantor-kantornya di distrik pada bulan Maret 2004, Komisi memutuskan untuk memperpanjang Skema Reparasi Mendesak, tapi dibatasi untuk komunitas atau kelompok tertentu. Komisi mendanai tiga LSM Timor untuk menyediakan berbagai layanan dukungan tersebut: Asosiasi HAK, Fokupers dan LSM perempuan ET-Wave. Sebuah program enam bulan direncanakan bersama tiap organisasi, dengan menggunakan berbagai prinsip pembangunan komunitas untuk memberi dukungan kepada para korban. Program-program ini lebih cenderung untuk berusaha bekerjasama dengan para korban dan komunitas mereka, ketimbang menentukan korban untuk pemberian bantuan perorangan.

Hasil – bantuan yang diberikan

181. Komponen bantuan dana dari Skema Reparasi Mendesak didistribusikan antara bulan September 2003 dan Maret 2004. Dalam periode ini, 516 laki-laki (73% dari penerima) dan 196 perempuan (27%) tiap orangnya menerima uang tunai sebesar US\$ 200 dengan jumlah seluruhnya US\$ 142,400 untuk 712 survivor pelanggaran hak asasi manusia.

182. Seluruh 156 orang peserta Lokakarya Pemulihan di kantor nasional Komisi adalah penerima dana bantuan Reparasi Mendesak. Dua dari para penerima itu diantar ke Yogyakarta, Indonesia, di mana kepada masing-masing dipasang dan dilatih untuk menggunakan anggota badan buatan.

183. Di sepuluh distrik, 417 survivor – 322 laki-laki (77%) dan 95 perempuan (23%) – terus menerima dukungan dan bantuan yang diberikan oleh LSM setempat dan kelompok-kelompok gereja. Bantuan ini berupa obat-obatan, mengantar ke layanan kesehatan di rumah-rumah sakit distrik, konseling dan bantuan dasar, termasuk anjangsana ke rumah-rumah. Diharapkan bahwa bantuan tersebut akan menguntungkan para korban lebih lanjut, dalam hubungannya dengan penyedia layanan kesehatan di tingkat distrik dan dukungan yang berkesinambungan, meskipun masalah sumber daya di tingkat lokal merupakan suatu masalah yang mendesak.

184. Ketiga LSM, yang dikontrak Komisi untuk menyediakan berbagai layanan bantuan setelah Komisi meninggalkan distrik-distrik, memusatkan upayanya pada kelompok-kelompok atau komunitas-komunitas tertentu. Yayasan HAK memfokuskan kerjanya di komunitas Kraras-Lalerik Mutin di Viqueque. Komunitas Kraras mengalami pembantaian yang mengerikan pada tahun 1983, dan para survivor kejadian itu dipindahkan ke dekat Lalerik Mutin. Daerah itu sekarang dikenal sebagai “desa janda”. Dalam program enam bulan, Yayasan HAK bekerja dengan komunitas tersebut untuk mengidentifikasi kebutuhan dan prioritas komunitas, dan juga untuk membangun sebuah pusat pendidikan masyarakat.

185. Fokupers dan ET-Wave memberi dukungan lanjutan kepada perempuan yang telah memberikan pernyataan, dan berpartisipasi dalam audiensi dan/atau Skema Reparasi Mendesak. Fokupers bekerja di lima distrik: Dili, Liquiça, Bobonaro, Ermera dan Suai. ET-Wave bekerja di Lautém. Selain melakukan tindak lanjut dengan perempuan secara perorangan, organisasi tersebut bekerja dengan komunitas-komunitas untuk menangani pengucilan yang dialami oleh para korban, khususnya orang-orang perempuan di pedesaan.

David Rodriguez, penerima kaki buatan

David Rodriguez masih muda ketika invasi Indonesia terjadi pada tahun 1975. Ia dan ayahnya terluka parah ketika terjadi penembakan dan pemboman yang dilakukan oleh militer Indonesia. Tangan ayahnya terluka sangat parah hingga akhirnya ia meninggal akibat infeksi. David dirawat dengan obat-obat tradisional, seperti daun jagung, dan selamat dari luka pada kakinya. Tapi, karena ia terjebak di gunung tanpa akses ke layanan kesehatan, lukanya terkena infeksi dan kaki David mulai membusuk. Selama tujuh bulan kakinya membusuk, mengeluarkan bau yang sangat kuat hingga ia dipaksa hidup di pengasingan. Setiap hari keluarganya mengirim makanan dan kemudian meninggalkannya. Akhirnya kakinya putus dan David merawat bagian kakinya yang masih ada dengan obat-obat tradisional. Ia belajar berjalan lagi dengan menggunakan sebuah tongkat. Pada tahun 1979 ia menyerah kepada militer Indonesia di Rotutu (Same, Manufahi). Orang-orang Indonesia mengobati orang-orang Timor lain yang terluka; beberapa orang bahkan dibawa ke Indonesia untuk dipasang anggota badan buatan. Namun karena David berasal dari desa Mauchiga (Hatu Bulico, Ainaro), yang dikenal sebagai desa pro-Fretilin, ia tidak menerima bantuan apa pun.

Setelah kemerdekaan, David memberi pernyataan kepada Komisi. Ia berpartisipasi dalam sebuah Lokakarya Pemulihan, di mana ia diberi dana bantuan reparasi darurat sebesar US\$ 200. Ia juga diantar ke Yogyakarta (Indonesia) di mana ia menghabiskan waktu dua minggu untuk dipasang kaki palsu dan diberi latihan penggunaannya. Sepulang ke Timor-Leste, ia datang ke kantor nasional Komisi dengan wajah berseri-seri, kemudian membuka sepatu dan kaus kakinya untuk memperlihatkan kaki barunya kepada staf dan kawan-kawan. Ia berkata kepada anggota Komisi yang menemaninya ke Yogyakarta:

“Kadang saya pikir saya bermimpi. Saya orang buta huruf, tidak sekolah, tapi saya bisa naik pesawat, mengunjungi tanah lain, dan mendapatkan bantuan macam ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Komisi dari lubuk hati saya yang dalam atas semuanya.”

Carminda dos Santos, Rumah Milik Sendiri

Ketika Indonesia menginvasi Timor-Leste pada tahun 1975, Carminda dos Santos, bersama suami dan kedua anaknya yang masih kecil, mengungsi ke hutan di mana suaminya meninggal dunia.

Tanggal 14 Juli 1993, Carminda dan kakak laki-lakinya ditangkap oleh tentara Indonesia dan dibawa ke pos Koramil di Bobonaro, karena dicurigai membantu paman mereka Martinho, seorang pejuang gerilya di hutan. Carminda juga dituduh terlibat dalam penghancuran patung Bunda Perawan Maria di Malilait Grotto di sub-distrik Bobonaro. Carminda dan kakak laki-lakinya dihajar habis-habisan, kepala mereka dibenturkan ke tembok, mereka ditendang dengan sepatu lars tentara, dan tubuh mereka diinjak. Sejak saat itu Carminda menderita kejang-kejang.

Setelah rumah Carminda dijarah dan dibakar oleh milisi pada tahun 1999, ia dan anak perempuannya pindah dan tinggal bersama kakak laki-lakinya. Tetapi mereka tidak pernah merasa benar-benar nyaman, karena ia dan kakak laki-lakinya selalu bertengkar. Carminda merasa bahwa ia dan anaknya terlantar. Mereka tidak memiliki rumah sendiri, dan baik pemerintah setempat maupun keluarganya sendiri tidak ada yang memperhatikan atau membantu mereka.

Ketika tim distrik Komisi mulai mengambil pernyataan di Bobonaro, anak perempuan Carminda, Regina dos Santos, memberi pernyataan termasuk tentang kisah bagaimana ibu dan pamannya disiksa oleh tentara Koramil di Bobonaro pada tahun 1993. Ia menceritakan tentang kondisi syaraf dan hilangnya ingatan Carminda. Staf Dukungan untuk Korban mengunjungi Carminda dan menawarkan konsultasi padanya. Ia juga diberi US\$ 200 sebagai bagian dari Skema Reparasi Mendesak. Dalam kunjungan kembali beberapa bulan kemudian, staf Dukungan untuk Korban melihat berbagai perbaikan di dalam hidup Carminda. Ia sudah memiliki rumah sendiri, syaraf dan ingatannya telah kembali normal. Carminda sangat bahagia dan mengucapkan terima kasih yang teramat sangat kepada Komisi. Walaupun ia dan anak perempuannya hanya tinggal di dalam sebuah gubuk kecil, namun gubuk itu milik mereka sendiri.

Penggunaan dana bantuan

186. Jumlah uang sebesar US\$ 200 untuk satu bantuan, dirancang agar cukup bagi si penerima untuk meningkatkan kualitas hidupnya secara praktis, dengan melakukan berbagai kegiatan atau untuk jual-beli barang dan jasa. Tentu saja ini tidak cukup untuk membiayai intervensi besar atau yang bersinambung, seperti yang umumnya diperlukan oleh kebanyakan korban pelanggaran hak asasi manusia berat.

187. Para penerima dana bantuan menggunakan uangnya dengan berbagai cara. Pengobatan, pendidikan anak, dan melakukan berbagai kegiatan yang menghasilkan pendapatan seperti berternak, adalah rencana-rencana yang umum mereka lakukan. Penggunaan lainnya, misalnya untuk membeli makanan, pakaian dan untuk rumah.

Penggunaan dana bantuan Reparasi Mendesak

Para penerima reparasi mendesak memang bebas untuk menggunakan uang yang diberikan sesuai kemauan mereka sendiri. Namun Komisi menekankan, agar uang yang diterimanya digunakan untuk perbaikan kualitas hidup seterusnya. Bagi banyak orang memang inilah yang terjadi.

“Saya pakai uangnya untuk membeli obat, untuk mengobati penyakit saya, dan sekarang saya merasa sedikit lebih baik. Saya merasa cukup sehat untuk melakukan beberapa pekerjaan ringan. Saya biasanya batuk parah dan sekarang saya jarang batuk,” ujar seorang korban ketika dikunjungi beberapa bulan, setelah menerima dana bantuannya.

“Sewaktu saya menerima uang dari Komisi saya menggunakannya untuk membeli...obat tradisional Timor dan juga obat dari apotik, untuk mengobati sakit saya. Sejak saat itu saya merasa sehat,” kata korban yang lain. Ia menambahkan, dengan sisa uangnya ia juga membeli seekor babi untuk ditenakkan dan untuk berbelanja.

Manuel Laka Suri juga menggunakan sebagian dari uangnya untuk memperbaiki kesehatannya. Sisanya ia gunakan “untuk membayar orang yang menjaga ladang saya, berbelanja, dan membayar uang sekolah anak-anak.”

188. Kebanyakan penerima bantuan berterima kasih kepada Komisi atas bantuan keuangan ini, meskipun banyak yang mengatakan bahwa uang US\$ 200 tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Karena masalah kesehatan merupakan kebutuhan yang paling sering dikemukakan oleh para korban, dan juga kerugian ekonomi akibat pelanggaran yang telah mereka alami, masih perlu dipertimbangkan langkah-langkah reparasi yang bersinambung, termasuk bantuan yang berkesinambungan bagi para penerima Skema Reparasi Mendesak. Rekomendasi Komisi tentang reparasi, membahas masalah ini (lihat Bagian 11 Rekomendasi)

Tanggapan anggota komunitas

Memberi dana bantuan kepada perorangan dalam konteks kemiskinan umum di Timor-Leste selalu memiliki potensi untuk bermasalah. Sementara banyak keluarga dan anggota komunitas mendukung, ketika mereka mengetahui bahwa seseorang telah menjadi penerima dana bantuan, kadang kecemburuan menjadi masalah. Karena adanya potensi reaksi komunitas yang negatif, maka Komisi tidak mengumumkan bantuan yang diberikan, dan memberitahu kepada para penerima, bahwa bagi Komisi dana bantuan tersebut bersifat rahasia.

Seseorang lelaki penduduk Maliana (Bobonaro), menyembunyikan penerimaan uang tersebut dari komunitasnya: "Uang itu adalah rahasia, jadi saya tidak beritahu siapa pun, dan tak seorang pun bertanya mengenai hal itu."

Demikian pula, seorang perempuan dari Bobonaro mengatakan:

Saya tidak beritahu siapa pun mengenai uang tersebut karena Komisi berkata itu rahasia. Saya takut kalau orang-orang dengar, mereka akan pukul saya, karena banyak korban lain yang tidak terima uang.

Namun, untuk beberapa korban menyembunyikan tidaklah mungkin. Ketika anggota komunitas mendengar bahwa tetangga mereka telah menerima uang, tanggapan mereka beragam. Komunitas tempat tinggal Manuel Laka Suri, yang sepenuhnya menghargai keadaannya, berterima kasih kepada Komisi atas bantuannya kepada Manuel untuk mengobati sakitnya.

Para anggota komunitas Ponciano Maia tidak menolak tapi juga tidak mendukung secara aktif. Menurut Ponciano Maia, komunitasnya "tidak membuat masalah dengan saya, karena mereka tahu bahwa saya telah sangat menderita dalam peperangan, jadi mereka diam saja."

Ponciano de Araujo memperoleh pengalaman yang berbeda. Beberapa anggota komunitasnya bertanya: "Kenapa kami tidak mendapatkan uang sedikit pun? Kita semua adalah korban."

Tinjauan terhadap Skema Reparasi Mendesak

189. Dampak bantuan Reparasi Mendesak bervariasi antara penerima yang satu dengan penerima yang lain. Semua itu bergantung pada, antara lain, keadaan fisik dan psikologis si penerima sebelum menerima bantuan, jenis kebutuhan yang dihadapi, dan lingkungan keluarga dan sosial orang tersebut. Namun Komisi percaya, bahwa Skema tersebut telah berhasil mewujudkan perbaikan-perbaikan kualitas hidup yang kecil namun bermakna bagi para korban berbagai pelanggaran hak asasi manusia.

190. Skema juga merupakan bagian dari proses yang lebih luas untuk pengakuan secara resmi atas penderitaan para korban, dan berusaha untuk membangun hubungan yang multi-dimensi dengan mereka. Proses ini dimulai ketika para korban memberikan pernyataan kepada Komisi. Selanjutnya beberapa dari mereka memberikan kesaksian pada audiensi publik; yang lainnya lagi berpartisipasi dalam berbagai lokakarya pemulihan, sementara yang lain berpartisipasi dalam audiensi-audiensi rekonsiliasi komunitas di desa mereka masing-masing.

191. Komentar orang-orang yang berpartisipasi dalam Skema Reparasi Mendesak banyak yang menekankan pentingnya hubungan dengan Komisi ini bagi mereka. Warga desa Ritabou, Tiimatan (Bobonaro) berkata: "Saya merasa sangat bahagia, karena masih ada beberapa teman yang memperhatikan kami." Mengungkapkan perasaannya tentang kerawanan dan kurangnya dukungan terhadap korban, warga desa Colegio (Bobonaro) mengatakan:

Saya merasa senang, karena Komisi membantu memperhatikan para korban. Kalau tidak, kami tidak tahu siapa lagi. Saya merasa senang karena masih ada sebuah Komisi dan LSM yang baik, seperti Komisi dan CEP yang membantu para korban.

192. Ponciano de Araújo merangkum tanggapan dari banyak korban, ketika ia mengatakan:

Saya ingin berterima kasih kepada semua teman yang bekerja di Komisi, yang telah memberikan pengakuan atas perjuangan dalam perang dan penderitaan serta kekhawatiran kami yang luar biasa.

193. Secara keseluruhan jumlah korban yang diuntungkan secara langsung dari Skema Reparasi Mendesak kecil dibandingkan dengan 7,824 pernyataan yang diambil dalam pekerjaan pencarian kebenaran Komisi. Namun bantuan yang diberikan telah memberi perbedaan yang nyata terhadap kehidupan sejumlah korban yang paling rawan. Skema tersebut juga memberikan semacam dukungan moral, emosional dan spiritual. Sebagai langkah sementara selama keseharian kerja Komisi, Skema itu memperlihatkan komitmen Komisi dalam memberi kepastian pada para korban untuk menerima bantuan semacam ini. Skema Reparasi Komisi, yang tercantum dalam Bagian 11: Rekomendasi, menjelaskan secara ringkas berbagai rekomendasi Komisi mengenai berbagai kebutuhan, yang harus dipenuhi untuk melanjutkan dan mengembangkan pekerjaan ini.

10.3.5 Profil Komunitas

Latar Belakang

194. Lokakarya Profil Komunitas menambahkan dimensi kelompok pada pekerjaan tim distrik dalam pencarian kebenaran dan dukungan pada korban. Kelompok-kelompok kecil dari masyarakat desa mendiskusikan dampak pelanggaran hak asasi manusia di tingkat desa. Lokakarya-lokakarya ini difasilitasi dan direkam oleh para anggota bantuan pada korban dari tim distrik. Dengan demikian masyarakat berkemungkinan untuk memeriksa sejarah konflik itu dari perspektif setempat mereka sendiri. Fokus komunal lokakarya juga mengakui bahwa, seperti halnya orang-per-orang, masyarakat juga menjadi korban selama masa-masa konflik dan juga membutuhkan dukungan.

195. Di sebagian besar daerah, tim distrik menggunakan lokakarya profil komunitas untuk memperkenalkan program mereka kepada komunitas. Selain membicarakan mandat dan program Komisi, tim distrik juga melakukan kegiatan praktis yang berbasis komunitas sehingga karenanya bersifat terbuka. Dengan memilih lokakarya sebagai pintu-masuk ke program yang lebih luas, Komisi bermaksud memperlihatkan rasa hormatnya pada komunitas, dan memperoleh pemahaman terhadap kekhususan dari setiap komunitas. Tim juga memiliki kesempatan untuk mengajukan pertanyaan mengenai kelompok-kelompok tertentu dalam komunitas, yang mungkin akan membutuhkan dukungan tambahan, atau, apakah kegiatan-kegiatan rekonsiliasi komunitas relevan bagi komunitas yang bersangkutan.

196. Profil komunitas menjadi bagian yang penting dan memperkaya pekerjaan Komisi, karena berbagai alasan. Singkatnya, alasan-alasan itu ialah:

- Di daerah pedesaan Timor-Leste, kegiatan yang bersifat komunal dan bukan perorangan, seringkali merupakan cara yang secara kultural lebih tepat dan efektif untuk membahas masalah-masalah yang penting. Kegiatan ini juga merupakan cara yang baik untuk menggali kekayaan tradisi lisan masyarakat pedesaan.
- Lokakarya ini merupakan kesempatan untuk mencari tahu pandangan komunitas mengenai apa yang dapat dilakukan oleh korban, untuk membantu pemulihan mereka dari pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu. Bahkan juga bagi komunitas-komunitas yang tidak banyak membicarakan kebutuhan untuk pemulihan komunitas, pengingat kembali pada pengalaman masa lalu itu sendiri sudah merupakan suatu proses pemulihan.
- Dari sudut pandang pencarian kebenaran, lokakarya-lokakarya Profil Komunitas melengkapi hasil pengumpulan pernyataan individu. Lokakarya tersebut sangat berguna khususnya dalam mengidentifikasi pola-pola pengalaman sosial, ekonomi dan politik yang lebih luas, dan dampak mendalam dari pelanggaran hak asasi manusia terhadap komunitas selama 25 tahun periode mandat.
- Cerita-cerita yang muncul dari lokakarya-lokakarya profil komunitas mengungkapkan, bagaimana daerah-daerah dan komunitas-komunitas mengalami penderitaan di sepanjang masa konflik, dalam bentuk dan kurun waktu yang berbeda-beda. Dari perspektif nasional cerita-cerita yang beraneka ragam dari daerah ke daerah seperti itu tidak bisa diperoleh, sementara itu perspektif komunitas yang lebih luas tidak dapat diperoleh melalui pernyataan-pernyataan perseorangan.
- Cerita-cerita ini semakin membawa kita dalam memahami situasi komunitas-komunitas setempat pada saat mutakhir, dan dalam merencanakan cara-cara bagaimana mencegah konflik di masa depan.

Proses seleksi

197. Komisi melatih dua orang staf distrik Dukungan Korban, seorang perempuan dan seorang laki-laki di tiap distrik, mengenai metode partisipatoris dalam memfasilitasi lokakarya profil komunitas. Masing-masing tim menargetkan untuk memfasilitasi lima diskusi komunitas di tiap sub-distrik. Sekurang-kurangnya satu dari lima diskusi tersebut harus melibatkan para pengungsi yang baru kembali, dengan mengutamakan mereka yang mengalami pengucilan oleh komunitas tempat mereka kembali. Satu kelompok diskusi lainnya dikhususkan untuk perempuan. Ini dimaksud untuk mengatasi berbagai hal yang menjadi halangan bagi partisipasi aktif perempuan dalam diskusi kelompok, khususnya apabila yang didiskusikan adalah cerita sejarah yang secara tradisional sudah menjadi bagian kaum laki-laki.

198. Pemilihan desa-desa dan kelompok-kelompok khusus yang akan melaksanakan lokakarya menjadi tanggung jawab staf Dukungan Korban Distrik bersama dengan Koordinator Distrik dan Komisaris Regional. Pemilihan ini didasarkan atas pengetahuan anggota tim lokal yang biasanya sudah terlebih dahulu mengenali sesuatu daerah, atau atas dasar informasi yang muncul dalam pertemuan tingkat sub-distrik, yang diadakan pada awal periode tiga bulan program sub-distrik. Pada pertemuan-pertemuan ini para pejabat sub-distrik, kepala desa, dan tetua masyarakat biasanya mengidentifikasi desa-desa yang ditempati oleh banyak pengungsi yang baru kembali. Mereka juga memilih orang-orang perempuan yang akan mengikuti kelompok diskusi, dengan mengutamakan mereka yang mengalami pelanggaran atau pernah aktif dalam gerakan perlawanan.

199. Pada prakteknya banyaknya lokakarya Profil Komunitas di masing-masing sub-distrik berbeda-beda. Beberapa tim tidak dapat mencapai target lima diskusi komunitas, sementara yang lainnya bisa mengadakan lokakarya-lokakarya di tiap-tiap desa dalam distrik mereka. Terkadang staf distrik mengadakan lokakarya gabungan yang diikuti oleh dua atau lebih desa-desa. Di beberapa sub-distrik seperti, misalnya, di sub-distrik Natarbora (Manatuto) dan sub-distrik Bobonaro (Bobonaro), beberapa komunitas yang mempunyai sejarah konflik sengaja

dipertemukan. Dalam kasus-kasus yang demikian, lokakarya ini memainkan peran rekonsiliasi tambahan. Melalui cerita tentang kebenaran dan tukar-menukar pandangan, masing-masing komunitas dapat memahami lebih baik asal-usul permusuhan sehingga dapat mengatasinya bersama. Dengan begitu lokakarya-lokakarya ini berperan sebagai sarana untuk rekonsiliasi.

Diskusi komunitas meredakan ketegangan sejarah

Bobonaro adalah sebuah sub-distrik besar yang terdiri dari 18 desa. Tim Distrik Komisi memutuskan, penting bagi semua desa itu untuk ikut serta dalam lokakarya-lokakarya Profil Komunitas, karena semuanya telah menderita akibat pelanggaran hak asasi manusia selama tahun 1974-1999, dan semua menyatakan setuju untuk ikut ambil bagian. Beberapa desa mengadakan diskusi gabungan.

Desa-desa yang bertetangga seperti Oeleu, Tapo, dan Leber sengaja dipilih untuk ikut dalam diskusi gabungan, karena sejarah konflik yang panjang telah terjadi di desa-desa tersebut. Sudah sejak puluhan tahun yang lalu, orang-orang laki-laki dari desa-desa ini berperang satu sama lain untuk memperebutkan tanah dan batas-batas komunitas. Selama konflik sipil tahun 1974-1975 itu ketegangan antara tiga desa tersebut meledak menjadi tindak kekerasan. Walaupun invasi dan pendudukan Indonesia telah menghentikan konflik terbuka mereka, perbedaan komunal dan politik yang terjadi sebelumnya dipertajam oleh hubungan mereka yang berbeda dengan pasukan pendudukan. Rasa tidak percaya dan keinginan balas dendam terus terpendam, dan meluap kembali setelah Konsultasi Rakyat pada bulan Agustus 1999.

Dalam lokakarya Profil Komunitas, para peserta dari desa-desa itu saling menuduh satu sama lain, sehingga dengan lebih jelas mengungkap ciri konflik mereka yang bersejarah.

Masyarakat desa Leber menyangka desa-desa Tapo dan Oeleu merupakan pusat aktifitas partai UDT, yang loyal terhadap pemerintah kolonial Portugal. Penduduk desa Tapo sudah lama menaruh curiga terhadap penduduk desa Leber, pertama-tama sebagai desa Apodeti dan kemudian sebagai basis pasukan khusus Indonesia (Kopassus). Tapo menuduh Leber telah membunuh rakyat sipil, sementara Leber mengingatkan kepada mereka yang hadir bahwa pada pertengahan tahun 1970-an, para pendukung Fretilin di Tapo dan Oeleu telah menyerang Leber, membakar ratusan rumah dan mengakibatkan penduduk Leber melarikan diri ke gunung-gunung. Sebaliknya, para peserta dari Oeleu menyalahkan Fretilin atas pemindahan paksa di tahun 1975, terhadap ratusan pendukung UDT yang mengungsi ke pegunungan Covalima atau lari ke Timor Barat. Walaupun kemudian Tapo dan Oeleu dianggap sebagai basis pendukung Fretilin, menjelang kemerdekaan desa-desa ini juga dikenal sebagai kubu milisi pro-integrasi.

Namun kecurigaan dan ketegangan ini mulai mereda, ketika masing-masing komunitas menceritakan kisah-kisah kekerasan yang mengerikan yang terjadi pada mereka.

Peserta dari Oeleu mengatakan, bahwa militer Indonesia telah membunuh ratusan orang pada tahun 1975-1976. Ini diikuti pada tahun 1978-1979 ketika ratusan orang mati akibat penyakit dan kelaparan. Mereka menceritakan, bahwa sekitar seratus orang laki-laki dari desa mereka ditangkap dan direkrut dengan paksa oleh ABRI. Pada tahun 1986 Program Keluarga Berencana Indonesia diperkenalkan, dan mengakibatkan kematian empat perempuan di Oeleu. Selama tahun 1980-an, perekrutan paksa sejumlah laki-laki untuk menjadi Hansip (Pertahanan Sipil) disertai dengan pemukulan dan penyiksaan. Pada pertengahan sampai akhir 1990-an, organisasi klandestin muncul, dan sekitar 80 orang pemuda desa masuk organisasi-organisasi klandestin. Banyak pemuda Oeleu dicurigai, ditangkap dan disiksa. ABRI juga menjawab perkembangan demikian ini dengan memaksa pemuda desa menjadi Hansip. Mereka yang menolak dipukuli dan dihantam dengan parang. Dalam tahun 1999 beberapa pemuda diintimidasi supaya masuk kelompok milisi, Dadurus Merah Putih. Pada minggu-minggu menjelang Konsultasi Rakyat, mereka membakar sekitar 200 rumah, merampok yang lain, dan membunuh enam orang di Oeleu. Sebelum dan sesudah Konsultasi Rakyat banyak penduduk melarikan diri ke gunung-gunung. Sesudah hasil Konsultasi Rakyat diumumkan, sekitar 200 keluarga dievakuasi ke Atambua, dan di sana kira-kira 50 orang mati karena penyakit dan seorang dibunuh.

Para peserta dari Tapo menjelaskan tentang desa mereka yang menjadi kubu pendukung UDT pada pergolakan politik tahun 1974 - 1975. Kemudian beralih menggabung dengan Fretilin dalam melawan pendukung Apodeti dari Leber yang mendukung ABRI, yang telah membunuh penduduk sipil dan mengibarkan bendera Indonesia di desa tetangga. Dari tahun 1976 - 1977, ABRI dan Fretilin terus-menerus terlibat dalam konflik bersenjata, yang menyebabkan kematian di kedua belah pihak, juga rusaknya ratusan rumah di sekitar Tapo. Seperti penghuni Oeleu, penduduk desa Tapo bercerita tentang ratusan penduduk desa mereka yang menderita, pertama setelah evakuasi ke hutan-hutan, dan kemudian ketika dimukimkan di kamp-kamp pengungsi di distrik tetangga di Ermera. Ratusan orang mati karena kelaparan dan penyakit. Para peserta dari Tapo juga mengenal orang-orang laki-laki yang direkrut dengan paksa oleh militer Indonesia, yang selama tahun 1980-an ikut ambil bagian dalam operasi "Pagar Betis". Mereka menceritakan, bahwa pada tahun 1999 banyak pemuda dari desa mereka ditangkap dan disiksa di pos militer Maliana, kemudian direkrut dengan paksa untuk menjadi anggota milisi. Seperti kisah Oeleu, sejarah kekerasan Tapo juga berakhir dengan penderitaan para penduduk desa karena penyakit dan kelaparan di kamp-kamp pengungsi di Timor Barat.

Para peserta dari Leber menceritakan tentang ratusan rumah mereka yang dirampas dan dibakar, pada bulan Agustus 1975, oleh sekelompok pejuang Fretilin, termasuk orang-orang dari Tapo dan Oeleu. Menyusul invasi Indonesia pada bulan Desember 1975, ratusan orang lari ke hutan-hutan dan desa-desa sekitar. Pada tahun 1977 - 1978, sekitar 100 penduduk sipil Leber mati akibat kelaparan di gunung-gunung, dan ratusan orang lagi mati karena serangan-serangan ABRI. Dalam bulan Mei 1982 semua penduduk sipil berumur 17 tahun ke atas ditangkap, dan dipaksa untuk melakukan operasi-operasi militer Indonesia, termasuk operasi "Pagar Betis" yang berlangsung selama satu bulan. Selama operasi mereka tidak diberi makan, tetapi harus mencari makan mereka sendiri, ketika mereka mencari para pejuang Fretilin di Gunung Ramelau dan di Manufahi, Ainaro dan Atsabe. Penduduk Leber mengeluh, bahwa mereka selalu dipersalahkan karena tindak kekerasan yang dilakukan oleh ABRI. Pada tahun 1990-an beberapa pemuda desa bergabung dalam jaringan klandestin dan mengumpulkan uang dari sesama penduduk untuk membantu Falintil. Pada tahun 1998 Pasukan Khusus menangkap enam pemuda dari Leber, membunuh seorang di antara mereka dan menyiksa lainnya. Ketika TNI membentuk milisi Dadarus Merah Putih pada bulan Mei 1999, banyak lagi pemuda Leber yang ditangkap, dipukuli dan banyak rumah yang dihancurkan.

Tinjauan historis ini membantu para peserta untuk menyadari, bahwa tidak satu pun dari desa-desa itu yang pernah memiliki kesetiaan khusus kepada satu partai politik saja, dan bahwa semua telah menderita di tangan militer Indonesia. Semua mengetahui penderitaan hebat karena pemindahan paksa, yang mengakibatkan bencana kelaparan dan penyakit, semua mengalami perekrutan dan evakuasi paksa dari rumah mereka, semua contoh tentang pemukulan dan penyiksaan oleh pasukan Indonesia yang dilaporkan, dan semua menyaksikan pemuda-pemuda di desa mereka yang bergabung dengan tentara Indonesia dan menghancurkan komunitas mereka sendiri. Pola-pola umum mengenai pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia ini memberi pandangan baru pada penduduk desa tentang masa lalu mereka, dan tentang jalan untuk maju dengan rasa benci komunal yang berkurang antara satu dan lainnya.

Kisah ini dikumpulkan dari Profil Komunitas CAVR Desa Oe-Leu, Tapo dan Leber Sub-distrik Bobonaro, Distrik Bobonaro 24 November 2003.

Partisipasi

200. Walaupun jenis peserta lokakarya Profil Komunitas beragam, yang selalu hadir ialah kepala desa, wakil-wakil partai politik, anggota organisasi pemuda dan perempuan, tetua masyarakat, pimpinan gereja setempat, orang-orang yang pernah aktif dalam gerakan klandestin,

¹ Satu bentuk operasi militer Indonesia, yang, dalam hal Timor-Leste, dilakukan untuk menumpas gerakan perlawanan di hutan-hutan. Untuk keterangan lebih lanjut tentang ini, lihat bagian 3.11, Operasi Keamanan.

para korban serta pelaku. Komisi berusaha mencari keseimbangan pandangan, walaupun terkadang tidak selalu berhasil.

201. Dari 297 lokakarya Profil Komunitas yang diperiksa, tiga di antaranya tidak mencatat jumlah orang yang hadir. 294 lainnya menunjukkan bahwa rata-rata pertemuan dihadiri oleh 16 orang, yang berarti bahwa sekitar 4700 orang di seluruh negeri telah ikut serta dalam lokakarya ini.

202. Imbangan jumlah rata-rata laki-laki yang menghadiri lokakarya (76%) jauh lebih tinggi dari perempuan. Dalam 11,5% (31 dari 270) lokakarya yang dibuka baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan, sama sekali tidak dihadiri oleh peserta perempuan. Pada 24 pertemuan yang dikhususkan untuk perempuan, rata-rata diikuti oleh 15 orang peserta saja. Di dalam dua dari pertemuan khusus perempuan ini, beberapa laki-laki juga hadir dan ikut berbicara.

203. Semua tim distrik mencatat adanya ketidakseimbangan gender, baik dalam angka hadir maupun dalam partisipasi aktif di dalam diskusi. Alasan-alasan ketidak-seimbangan ini di antaranya, karena menurut tradisi perempuan memang tidak lazim ikut ambil bagian dalam pertemuan umum, dan karena beban kerja perempuan, khususnya tanggungjawab mengurus anak yang menyebabkan kebanyakan perempuan harus selalu di rumah. Bahkan jika mereka hadir pun, banyak yang merasa tidak bisa berbicara di depan umum tentang kekerasan yang mereka alami, atau tidak merasa enak berbicara di depan suami-suami mereka.

204. Lebih mudah bagi perempuan untuk berbicara langsung tentang pelanggaran yang mereka alami, misalnya pemerkosaan, ketika tidak ada laki-laki yang hadir. Jika pelanggaran seksual harus dibicarakan dengan kehadiran laki-laki, biasanya ini dilakukan secara tidak terusterang, misalnya dengan mengatakan bahwa mereka telah dibikin rusak atau dinodai. Tim distrik membahas perihal ini secara formal dalam pertemuan khusus perempuan, dan terkadang secara informal oleh seorang fasilitator perempuan yang bertemu secara terpisah dengan para perempuan yang hadir pada lokakarya campuran.

205. Lokakarya khusus perempuan menjadi forum yang berharga untuk memahami pengalaman komunitas selama masa konflik, dan menunjukkan bahwa lokakarya- lokakarya semacam ini akan berguna.

Metode Profil Komunitas

206. Lokakarya berlangsung dalam waktu yang berbeda-beda, mulai dari beberapa jam sampai sehari penuh. Selama lokakarya, staf Dukungan untuk Korban menggunakan kronologi sejarah, sketsa peta, dan diskusi kelompok sasaran untuk membantu anggota komunitas dalam memetakan pengalaman pelanggaran hak asasi manusia secara kronologis dan geografis.

207. Sebagian besar pembahasan dimulai dengan pengingatan kembali pada pelanggaran dari 1975-1999. Seorang fasilitator menjelaskan, mengapa ia sering memulai diskusi dengan menanya pada peserta pertanyaan seperti: Di mana anda pada tahun 1974-1975? Siapa yang memperkenalkan berbagai-bagai partai politik di desa anda? Mengapa anda dan tetangga anda memutuskan untuk bergabung dengan partai ini atau partai itu? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini akan memicu diskusi lebih jauh, sehingga akan berlanjut pada ulasan sejarah yang umumnya dicatat sebagai naskah cerita, dan bukan sekadar gambaran kronologi sejarah.

208. Pengalaman komunitas lebih lanjut diperjelas dengan membuat sketsa peta-peta. Kadang-kadang sketsa digambar secara garis besar oleh beberapa orang sebelum diskusi komunitas dimulai. Sebagai contoh, di distrik Bobonaro, anggota tim dan kepala desa mensurvei desa sebelum lokakarya dimulai, untuk membuat sketsa peta yang menunjukkan kawasan hutan, sawah dan ladang, pasar, gereja, klinik kesehatan dan sekolah. Peta topografi/sosiologi kasar ini kemudian dipajang selama lokakarya, untuk membantu anggota komunitas mengingat-ingat

pelanggaran hak asasi manusia. Sementara para peserta menceritakan kisah tentang pelanggaran di komunitas mereka, yang sedikit-banyak dalam urutan kronologis, mereka kemudian diminta agar menunjukkan di peta, di mana pelanggaran-pelanggaran itu terjadi. Ini membantu memberi konteks pada diskusi mengenai masalah-masalah tertentu. Cara seperti ini menghasilkan laporan-laporan Profil Komunitas, yang cenderung bisa menggambarkan sejarah komunitas dengan lebih baik, ketimbang analisis tentang dampak sosial dan ekonomi dari pelanggaran terhadap komunitas.

209. Dengan mengajak komunitas dalam diskusi seperti ini pada permulaan kerja mereka, para Komisariss Regional dan staf akan bisa menumbuhkan saling pengertian dan kepercayaan. Selanjutnya dibantu dengan pelaksanaan kegiatan yang lain, seperti meminta pernyataan pribadi, audiensi rekonsiliasi komunitas dan pekerjaan dukungan pada korban orang seorang.

Peta Sketsa

210. Salah satu aspek penting dari lokakarya ialah pembuatan peta-peta sketsa. Peta-peta yang terkadang digambar oleh peserta lokakarya dan terkadang oleh staf distrik Komisi itu, berguna untuk merekam pelanggaran serta membangkitkan ingatan terhadap kejadian-kejadian tersebut. Peta-peta ini menjadi alat yang sangat berguna untuk memancing diskusi di antara anggota komunitas yang kemampuan baca tulis mereka rendah. Peta-peta ini juga menyingkap teror berkepanjangan yang dialami banyak komunitas selama 24 tahun.

211. Beberapa peta menggunakan kode warna untuk membedakan kejadian-kejadian dan dampak yang diakibatkan. Sebagai contoh, pada beberapa peta pos-pos Falintil ditandai dengan bendera kuning dan putih, sehingga mudah dibedakan dengan pos-pos ABRI/TNI yang berbendera merah putih. Salib merah jambu untuk menandai tempat-tempat orang yang dibunuh oleh ABRI/TNI, dan salib biru untuk menandai tempat-tempat orang yang mati akibat kelaparan dan penyakit, atau untuk jumlah angka kematian ditandai dengan menggunakan penanda berwarna merah jambu atau merah (lihat Peta Sketsa 11 di bawah ini). Beberapa peta mengutamakan pada kejadian-kejadian selama kurun waktu satu atau dua tahun, sedangkan untuk yang berkurun waktu lebih lama diperlihatkan dengan cara yang lain. Sebagai contoh, Diagram 1 - Peta Sketsa Iliomar I (Iliomar, Lautém) menggunakan anotasi untuk mencatat informasi tentang periode, sedangkan Diagram 2 - Peta Sketsa Pairara Moro (Lautém) menambahkan tanda-tanda panah, untuk menandai pelanggaran-pelanggaran di tempat yang sama tapi dalam saat-saat yang berbeda dalam sejarah.

Diagram 1 - Peta sketsa Iliomar I
Diagram 2 - Peta sketsa Pairara

212. Komunitas-komunitas lain menjangkau jarak waktu yang panjang dengan membuat lebih dari satu peta. Jika diletakkan berjejer, sketsa peta-peta 3 dan 4 dari lokakarya komunitas di Beco 2/Tasilin (Zyumlai, Covalima) dengan jelas memperlihatkan pergolakan yang dialami komunitas ini, yaitu pada awal dan akhir pendudukan Indonesia, dalam tahun 1975 dan 1999. Peta 1977 memperlihatkan tank militer yang bergerak memasuki kawasan, peta 1999 memperlihatkan truk-truk pengungsi yang dievakuasi ke Atambua. Kedua peta itu memperlihatkan tentara bersenjata, rumah-rumah yang terbakar, dan penduduk desa yang melarikan diri ke gunung-gunung.

Diagram 3 - Peta sketsa Beco 2/Tasilin 1977
Diagram 4 - Peta sketsa Beco 2/Tasilin 1999

213. Diagram 5 – Sketsa peta desa Guda (Lolotoe, Bobonaro) dan Diagram 6 – Sketsa peta Oso-Huna (Baguia, Baucau) memperlihatkan dua pemboman dari udara terhadap desa dan penduduk desa yang bersembunyi di gunung-gunung.

Diagram 5 - Peta sketsa Guda
Diagram 6 - Peta sketsa Osso-Huna

214. Beberapa peta memperlihatkan jumlah korban dengan cara memberikan anotasi dan sisipan-sisipan salib, seperti terlihat pada Diagram 7 – Peta sketsa Uaitame (Quelicai, Baucau). Namun yang lebih lazim penyisipan gambar tengkorak atau tulang bersilang, cara sederhana untuk menyatakan trauma ialah dengan gambar sama yang diulang belaka, seperti tampak pada Diagram 8 – Peta sketsa Caimauk (Turisca, Manufahi), Diagram 9 – Peta sketsa Ura-Hoci (Hatolia, Ermera), dan Diagram 10 – Peta sketsa Mahaklusin (Alas, Manufahi).

Diagram 7 - Peta sketsa Uaitame
Diagram 8 - Peta sketsa Caimauk
Diagram 9 - Peta sketsa Ura-Hoci
Diagram 10 - Peta sketsa Mahaklusin

215. Bila dikumpulkan peta-peta sketsa yang dibuat oleh panitia pertemuan-pertemuan komunitas itu, mulai dari peta-peta yang sangat belum sempurna seperti Diagram 11 – Peta sketsa Rasa (Lospalos, Lautem) sampai ke Diagram 12 – Peta sketsa Miligu (Cailaco, Bobonaro) yang sangat lebih rinci, peta-peta seperti Diagram 13 – Peta sketsa Taiboco (Pantai Makasar, Oecusse), yang memetakan jalannya pelanggaran-pelanggaran -- semuanya memberikan gambaran visual yang dapat menangkap dampak kolektif pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia di Timor-Leste dari 1974 sampai 1999.

Diagram 11 - Peta sketsa Rasa
Diagram 12 - Peta sketsa Miligu
Diagram 13 - Peta sketsa Taiboco

216. Peta sketsa 14: Beidasi (Fatululik, Covalima) merupakan pengingat-ingat, bahwa meskipun pelanggaran di Timor-Leste begitu meluas dan mendalam, namun dampaknya pada komunitas-komunitas setempat tidak pernah tidak diketahui namanya. Ketajaman peta itu bisa ditangkap melalui nama-nama yang ditulis pada setiap rumah, yang memberi identitas tentang kepemilikan, tempat kediaman dan komunitas. Yaitu dengan menjajarkan antara komunitas yang erat hubungannya, di mana setiap orang saling tahu dan saling berhubungan satu sama lain, dan dengan sekadar anotasi pendek saja – “Veronica mati di sini” di samping dua salib hitam dan merah jambu, untuk menunjukkan bahwa ia dibunuh oleh milisi, “82 orang dibunuh TNI” tertulis di bawah salib merah jambu, dan “30 anak mati” ditulis di atas salib hitam, untuk menunjukkan kematian oleh kelaparan – yang sangat mencolok. Ia mengubah dari sebuah peta tentang lingkungan biasa menjadi sebuah dokumen yang mencatat sejarah kekerasan dan penderitaan di masyarakat. Selama bertahun-tahun pelanggaran telah terjadi pada rumahtangga Alberto dan Carlos, Martinho dan Mauseu, dan pada begitu banyak pribadi dan keluarga lainnya.

Diagram 14 - Peta sketsa Beidasi

Dampak

217. Lokakarya Profil Komunitas memberikan pada banyak komunitas desa rasa hormat dan pengakuan, dengan melalui mendengarkan pada dan mencatat tentang pengalaman-pengalaman mereka, sebagai bagian dari proses penceritaan kebenaran nasional secara resmi.

218. Semua tim distrik melaporkan umpan balik yang positif dari komunitas-komunitas desa, yang berterimakasih untuk kesempatan berbicara tentang pengalaman-pengalaman mereka selama masa konflik. Karena diskusi-diskusi itu lebih bersifat komunal ketimbang pribadi, saat-saat katarsis atau perenungan tentang masa lalu menjadi bagian dari pengalaman komunitas, seperti halnya yang telah mereka lakukan dalam audiensi korban.

219. Lokakarya tidak memberikan data-data empiris untuk dibikin tabel dan dianalisis sedemikian rupa, sehingga perbandingan-perbandingan regional dimungkinkan untuk disusun. Nilai bahan yang terkumpul dari lokakarya-lokakarya ini ialah pada rinciannya dan fokusnya yang bersifat lokal. Kelemahan informasinya karena biasanya komunitas tidak mungkin memberikan angka-angka statistik yang akurat, tentang jumlah orang yang mati akibat kelaparan atau dalam kampanye militer, yang sama sekali telah merusak kehidupan komunitas itu. Tanggal-tanggal kejadian tidak selalu spesifik atau akurat, dan angka-angka tentang harta kekayaan, misalnya ternak yang musnah, seringkali angka pukul-rata saja. Selanjutnya kisah-kisah yang diceritakan bergantung pada peserta yang hadir – yaitu pada umur mereka, sehingga karenanya berpengaruh pada derajat kehandalan dan luasnya ingatan, taraf melek-huruf, gender, dan juga pertalian politik mereka. Misalnya jika sebagian besar peserta ialah anggota partai tertentu, ini akan menjadi kendala dalam diskusi tentang pelanggaran yang dilakukan oleh partai tersebut.

220. Apa pun kekurangannya sebagai sarana untuk mencari kebenaran, namun pada akhirnya Profil Komunitas dapat memberikan liputan luas tentang pengalaman komunitas selama rentang waktu 24 tahun konflik politik. Tapi Profil sering memberikan jauh lebih dari itu, yaitu dengan mengemukakan wawasan tentang dampak terhadap komunitas, baik dampak dari gejala-gejala umum seperti pemindahan massal dan pencarian tenaga pasukan secara paksa, maupun dari peristiwa-peristiwa khusus seperti pemberontakan Mauchiga, dan masaker di Kraras dan Santa Cruz, seperti juga halnya dari banyak peristiwa lainnya yang sampai sekarang, di luar kawasan tempat peristiwa itu terjadi, belum diakui.

10.3.6 Pelajaran yang dapat dipetik

Penerimaan (Acolhimento), orang-orang yang kembali dan Timor Barat.

221. Aktor-aktor negara dan non negara di Timor-Leste harus terus-menerus berkerja sama dengan orang Timor-Leste di Timor Barat. Pekerjaan ini harus difokuskan kepada pengembangan saling percaya dan saling pengertian, berbagi informasi, dan membantu mereka yang memutuskan untuk kembali ke Timor-Leste. Pekerjaan ini dapat dilaksanakan hanya kalau ada kerja sama antara orang Timor Leste dan lembaga-lembaga negara dan non-negara Indonesia. Satu unsur terpenting untuk mengembangkan saling percaya antara orang Timor-Leste di Timor Barat adalah bahwa hubungan antara orang Timor-Leste di kedua sisi perbatasan seharusnya tidak meresahkan tetapi menunjukkan komitmen berkelanjutan terhadap kebutuhan mereka.

222. Perkerjaan Komisi dengan orang Timor Leste di Timor Barat menunjukkan kontribusi kepada proses yang telah dimulai sebelum Komisi didirikan, dan akan berlanjut setelah amanat Komisi selesai. Walaupun dukungan dari masyarakat Internasional sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan ini, dukungan tersebut tidak akan diterima tanpa adanya komitmen yang jelas dan tinggi dari Pemerintah Timor-Leste terhadap pekerjaan ini.

223. Pekerjaan apapun menyangkut hal ini di masa depan harus memberi perhatian kepada beberapa masalah yang sulit. Masalah-masalah tersebut lain adalah:

- Mencari cara untuk berbicara kepada para pengungsi tentang rekonsiliasi dengan cara yang konstruktif. Salah satu halangan kepada pembicaraan yang berguna adalah jurang antara yang melihat rekonsiliasi sebagai isu politik yang berkaitan dengan amnesti atas kejahatan-kejahatan yang dilaksanakan pada masa lalu, dan mereka yang melihatnya sebagai isu sosial berkaitan dengan pemulihan perpecahan antara perseorangan dan komunitas. Kenyataan bahwa hirarki kekuasaan di Timor Barat sudah memperkuat perbedaan-perbedaan paham ini, membuat perbedaan-perbedaan itu sangat sulit untuk dihilangkan.
- Terus-menerus mencari cara untuk mengatasi halangan-halangan bagi para perempuan untuk berpartisipasi secara penuh di dalam proses pengambilan keputusan tentang masa depan mereka dan masa depan keluarga mereka.
- Membangun kemitraan, pengalaman, dan keinginan baik yang telah dibangun dengan individu orang Indonesia, Pemerintah dan organisasi-organisasi non pemerintah Indonesia.

224. Masih dibutuhkan dukungan terus-menerus untuk menyatukan kembali mereka yang akan pulang kepada komunitas mereka dan kepada komunitas yang menerima mereka. Penyatuan kembali bukanlah proses yang segera tetapi membutuhkan perhatian dan dukungan secara tetap selama jangka waktu yang panjang. Kepercayaan satu sama lain dan rasa percaya diri hanya akan kembali sedikit demi sedikit. Walaupun banyak dari pekerjaan-pekerjaan penyatuan kembali adalah sangat penting dilaksanakan oleh para individu, para keluarga dan komunitas yang melaksanakan, dengan bantuan dari lembaga setempat seperti Gereja dan pemuka adat, pengalaman Komisi di dalam bidang ini menyatakan bahwa lembaga-lembaga tersebut dapat dibantu dengan dukungan dari lembaga nasional terpercaya dan dihormati.

Reparasi-reparasi mendesak

225. Program Reparasi Mendesak Komisi telah membantu banyak para korban yang paling dirugikan untuk memenuhi kebutuhan mereka yang paling mendesak. Skema ini menawarkan bantuan baik finansial maupun bukan finansial kepada individu dan komunitas. Lewat perkerjaan

ini Komisi memperoleh pengertian yang jernih tentang kekuatan dan kelemahan dari jenis-jenis skema reparasi yang berbeda-beda dalam konteks Timor-Leste, dan oleh karena itu membuat merekomendasikan sebuah pendekatan yang lebih menyeluruh.

226. Komisi mengerti bahwa Skema Reparasi Mendesak merupakan sebuah tindakan sementara yang tidak dapat dianggap sebagai pengganti untuk program jangka panjang yang lebih menyeluruh.

227. Komisi yakin bahwa ada kebutuhan yang sangat mendesak akan sebuah program reparasi yang menyeluruh dan mempunyai berbagai segi untuk dimatangkan setelah tugas Komisi berakhir. Program ini harus memusatkan perhatian kepada kebutuhan para korban dengan menawarkan pengakuan resmi terhadap para korban dengan memelihara dan menghormati ingatan akan mereka, dan penyediaan pelayanan sosial dan bantuan ekonomi. Program itu harus diberikan pada tingkat perorangan dan masyarakat.

228. Komisi telah mempelajari bahwa sulit untuk mendapatkan dukungan finansial untuk sebuah skema reparasi, dari sumber-sumber dana nasional maupun internasional. Para Politisi, pengambil kebijakan dan mereka yang berada dalam posisi menyediakan dana sangat sering menggolongkan program-program reparasi dalam domain pembangunan nasional secara umum. Reparasi tidak seharusnya diperlakukan demikian: reparasi memainkan peran melingkupi pembangunan nasional, tetapi juga agak berbeda karena reparasi merupakan dasar untuk memberi keadilan dan perlindungan atas hak asasi manusia dalam masyarakat pasca-konflik ini. Masalah ini dibahas secara lebih menyeluruh di dalam Bagian: 11 Rekomendasi.

Para Korban

229. Dalam bekerja dengan para korban selama tiga tahun keberdaannya, Komisi telah belajar banyak. Kekuatan dan ketabahan banyak korban, martabat dan kebaikan hati terhadap sesama orang lainnya, dan keinginan mereka untuk berpartisipasi dalam membentuk negara merdeka baru, memberikan inspirasi. Kehidupan keluarga dan komunitas dan kebudayaan orang Timor kadang dapat membantu menopang dan memulihkan para korban. Di waktu lainnya mereka justru menjadi rintangan bagi pemulihan. Komisi juga telah memahami dengan jelas, bahwa sekarang ini banyak orang-orang yang hidup dalam keadaan susah, karena kekerasan yang pernah mereka alami. Sekali mereka memperoleh kadar rasa aman tertentu, baik itu rasa aman secara fisik, mental maupun ekonomi, individu-individu, keluarga-keluarga dan komunitas dapat berbuat banyak untuk membantu pemulihan mereka. Tetapi mereka juga terkadang memerlukan bantuan pihak luar, seperti layanan kesehatan fisik dan mental, pendidikan dan pelatihan, bantuan untuk memulihkan kelangsungan ekonomi, pengakuan dan perasaan bahwa negara memperhatikan kesejahteraan mereka.

230. Kesehatan, termasuk kesehatan mental, adalah hal yang utama untuk pekerjaan dukungan pada korban di masa mendatang. Pengalaman kekerasan dan kehilangan dapat memiliki dampak yang mendalam bagi kesehatan mental dan kesejahteraan para korban. Lokakarya pemulihan merupakan upaya untuk memahami lebih banyak mengenai kebutuhan para korban dalam hal ini, untuk memberikan dukungan, untuk mengantar orang-orang kepada layanan-layanan khusus jika tersedia. Komisi juga bekerja dengan komunitas gabungan dan tim kesehatan mental dari University of New South Wales, untuk mengembangkan peninjauan awal atas kebutuhan-kebutuhan para korban pelanggaran hak asasi manusia dalam terang temuan-temuan Komisi, berkenaan dengan kesehatan dan kesejahteraan mental.

231. Komisi menemukan bahwa banyak korban pelanggaran berat hak asasi manusia terus-menerus menderita karena perlakuan kejam yang mereka alami. Komisi telah menemui korban dengan peluru di dalam tubuh mereka, luka luka yang belum sembuh, tulang-tulang yang tidak dipulihkan secara benar, masalah kewanitaan berakibat pemerkosaan, dan macam-macam kecacatan fisik yang diakibatkan oleh penyiksaan yang berkepanjangan atau yang berulang kali.

Tanpa perhatian kepada kebutuhan kesehatan ini, para korban ini tidak akan mampu mengambil tempat mereka yang syah sebagai warga negara aktif Timor-Leste.

232. Temuan-temuan ini mengarisbawahi perlunya sebuah peninjauan yang menyeluruh yang dapat menjadi dasar untuk program dukungan kesehatan yang akan menjadi bagian dari skema Reparasi yang mendatang.

233. Komisi memperhatikan, bahwa ada kelompok-kelompok tertentu dalam komunitas yang tampak begitu rawan dalam menghadapi masalah-masalah yang berhubungan dengan kesejahteraan mental mereka. Ini bukan semata-mata isu-isu medis mengenai gangguan mental, melainkan kesejahteraan mental yang seluas-luasnya, yang memungkinkan seseorang untuk menjalani kehidupan yang baik dan berarti. Keadilan, belas kasihan dan pencarian akan masyarakat yang adil dan inklusif, semua langkah yang perlu untuk memulihkan mental dan kesejahteraan fisik kepada para korban yang kehilangan semua itu sebagai akibat dari penyalahgunaan. Kelompok-kelompok yang dicatat oleh Komisi sebagai kelompok yang beresiko tinggi, dan yang harus menjadi fokus untuk program di masa mendatang, diuraikan di bawah ini:

Survivor pemerkosaan

234. Melalui lokakarya pemulihan dan kegiatan-kegiatan lain menjadi jelaslah, bahwa perempuan yang mengalami perkosaan sangat besar kemungkinan menderita trauma dibanding korban pelanggaran lainnya. Sedikit-banyak mungkin hal ini disebabkan oleh karena, banyak perempuan yang diperkosa atau dipaksa ke dalam situasi menjadi budak-budak seks oleh tentara Indonesia, melaporkan bahwa mereka dijauhi oleh keluarga dan masyarakat mereka, dan sebagai akibatnya mereka kehilangan bantuan yang diperlukan untuk pemulihan dan kesehatan mental. Penderitaan perempuan yang beranak dari hasil perkosaan atau dipaksa menjadi budak seks, lebih menyedihkan lagi. Ada beberapa komunitas, misalnya Suai, di mana banyak perempuan menjadi sasaran perkosaan massal sesudah Konsultasi Rakyat 1999, dimana banyak di antara mereka itu benar-benar memerlukan bantuan.

235. Komisi menemukan bahwa secara umum, perempuan muda umumnya yang diperkosa selama kekerasan 1998-1999, menderita lebih parah dan lebih banyak gejala trauma dibanding dengan para korban yang mengalami perkosaan pada periode-periode sebelum konflik. Penjelasan untuk perbedaan ini barangkali karena perempuan korban yang berumur lebih tua sering lebih bisa bergantung kepada bantuan yang disebabkan oleh peran mapan mereka sebagai anggota keluarga dan komunitas, sedangkan pelanggaran yang dialami oleh perempuan muda agaknya justru menjadi penghalang untuk mengembangkan peranan yang demikian itu. Sementara itu apa yang dialami kelompok perempuan tua tersebut umumnya kurang menonjol, sehingga karenanya walaupun mereka memerlukan bantuan, kecil kemungkinan untuk menerimanya.

Pemuda, terutama yang di daerah perkotaan

236. Di dalam konflik politik di Timor-Leste, banyak lelaki muda yang terlibat dalam kekerasan, baik sebagai korban maupun pelaku. Munculnya gerakan klandestin khususnya pada tahun 1980-an menyebabkan banyaknya pemuda-pemuda yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan perlawanan. Pemuda lainnya terlibat dalam kelompok-kelompok yang dibentuk oleh militer Indonesia untuk menghadapi kegiatan perlawanan tersebut. Pendidikan mereka seringkali terhambat akibat keterlibatan dalam kegiatan-kegiatan klandestin, masuk penjara, dan luka parah sebagai akibat siksaan dan kekejaman yang mereka alami.

237. Banyak di antara pemuda, yang berumur belasan tahun pada tahun 1990-an itu, sekarang dalam umur duapuluhan atau awal tigapuluhan tahun. Kurangnya pendidikan dan pelatihan, banyak di antara mereka yang sekarang merasa tersisih dari kesempatan di Timor-Leste baru. Beda dari kaum perempuan muda yang biasanya mempunyai peranan sosial sebagai

pengurus rumahtangga dan keluarga, kaum laki-laki muda kebanyakan hidup terpinggirkan dalam masyarakat. Komisi melihat adanya rasa marah dan kekecewaan di kalangan banyak laki-laki muda korban. Isolasi mereka diperburuk oleh batasan budaya, yang merintang laki-laki meminta bantuan atau bicara tentang soal-soal kesusahan perasaan. Kurangnya kesempatan kerja dan pendidikan semakin membikin parah kesulitan mereka.

238. Soal-soal tersebut di atas menempatkan banyak laki-laki muda dalam resiko mendapat masalah kesehatan mental. Beserta dengan kekerasan hebat yang mereka alami pada tahun-tahun remaja mereka, ini pun menimbulkan masalah stabilitas rumahtangga dan sosial. Orang-orang muda seperti inilah yang harus menerima prioritas utama untuk bantuan di masa depan.

Laki-laki cacat tengah-baya

239. Komisi melihat banyak korban laki-laki tengah baya dengan “tubuh yang rusak” sebagai akibat penyiksaan atau pemukulan hebat yang berulang-ulang. Terutama pada orang-orang desa yang kehidupan mereka bergantung pada kemampuan menggarap tanah, cacat tubuh seperti itu membawa akibat perekonomian yang parah. Banyak dari mereka yang menyatakan kesusahan dan memperlihatkan ketegangan jiwa, oleh karena mereka tidak lagi mampu menghidupi keluarga, dan hal ini akan berdampak pada pendidikan anak-anak serta kesempatan masa depan mereka. Tidak bisa memenuhi tugas sosial mereka sebagai penopang keluarga, banyak di kalangan laki-laki ini menjadi rawan terhadap problem kesehatan mental.

Eks-tahanan politik dan korban siksaan

240. Komisi berulang-ulang mendengar, bagaimana tentara keamanan Indonesia terus-menerus menyiksa para tawanan. Juga Komisi mendengar tentang penyiksaan dan kekejaman yang dilakukan dalam tahun-tahun awal konflik oleh partai-partai politik Timor-Leste. Akibat-akibat psiko-sosial siksaan itu dicatat dengan baik. Komisi bekerja erat dengan banyak eks-tapol dan korban penyiksaan. Pada beberapa kasus eks-tapol memperlihatkan kemampuan mereka sendiri dalam mengatasi ketegangan usai-trauma. Tetapi Komisi juga mendengar dari banyak eks-tapol lainnya, bahwa mereka tetap memendam dalam-dalam penderitaan di hati mereka. Sementara dalam hidup mereka sehari-hari memperlihatkan kemampuan mengatasi, namun mereka tetap merasa menderita. Beberapa korban berkata kepada Komisi, bahwa perasaan mereka yang mendalam itu kadang-kadang meluap dalam bentuk kekerasan terhadap keluarga. Para bekas tahanan ini merupakan kelompok dengan resiko tinggi, yang semestinya dibantu dalam program-program mendatang.

Korban dan keluarga korban kekerasan Fretilin/Falintil

241. Komisi mendengar tentang keengganan orang bicara sekitar kekerasan yang dilakukan partai-partai politik Timor-Leste. Terutama tentang konflik intern 1975, dan sebagai akibat perbedaan politik dalam tubuh Fretilin dalam tahun 1970-an. Banyak korban, atau keluarga mereka yang terbunuh atau hilang, menyatakan keinginan mereka untuk membersihkan nama-nama anggota keluarga dan teman-teman. Kurangnya pengakuan terhadap kekerasan dan kehilangan yang diderita keluarga, serta terhadap ketidak-adilan perlakuan mereka, telah mengakibatkan tekanan perasaan yang dalam dan terkucilnya golongan orang-orang seperti ini. Tanpa pengakuan publik bahwa peristiwa itu telah terjadi, akan sulit bagi mereka yang menderita untuk tampil mencari bantuan yang mungkin mereka perlukan.

Masa depan

242. Pola-pola atau penggolongan-penggolongan tersebut tidak bersifat menyeluruh, dan tidak dimaksud untuk mengecilkan korban perorangan dan juga pengalaman serta kebutuhan

komunitas yang tidak dapat dimasukkan ke dalam penggolongan-penggolongan ini. Hal-hal di atas menunjukkan bahwa terdapat kelompok-kelompok tertentu dalam komunitas orang Timor yang membutuhkan bantuan. Penilaian luas tentang keperluan mereka seharusnya dilaksanakan sebelum sebuah program reparasi dibuat. Juga sangat penting bahwa Pemerintah, LSM Timor-Leste dan lembaga masyarakat sipil yang lain, dan organisasi agama, serta dengan lembaga Internasional dan para pemberi dana, terus-menerus memberi dukungan dan melanjutkan usaha untuk memulihkan penderitaan para korban pelanggaran hak asasi manusia, Komisi ini telah menguraikan Skema Reparasi yang diuraikan di dalam Bagian 11: Rekomendasi.

¹ CAVR, wawancara dengan Manuel Cárceres, asisten repatriasi/proteksi UNHCR, Dili, 25 November 2002.

² Ibid

³ Ibid

⁴ Arsip CAVR

⁵ Wawancara CAVR Iria Moniz, Desa Ilat Laun, Bobonaro, Bobonaro 19 Desember 2003.

⁶ Arsip CAVR